



**Laporan Dampak
Sertifikasi RSPO terhadap
Peningkatan TPB Desa**

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Gambar	2
Daftar Tabel	3
Bab 1. Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	6
1.3 Metodologi	7
Bab 2. Tinjauan Literatur	10
2.1 Sertifikasi RSPO dan Dampaknya terhadap Masyarakat & Lingkungan	10
2.2 TPB dan Pembangunan Pedesaan	12
2.3 Kontribusi Minyak Sawit Berkelanjutan terhadap Pencapaian TPB	14
Bab 3. Survei Dampak Sertifikasi RSPO terhadap TPB	19
3.1 Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	19
TPB 1. Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>)	19
TPB 2. Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>)	20
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health & Well-being</i>)	21
TPB 4. Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>)	23
TPB 5. Kesetaraan Gender (<i>Gender Equality</i>)	23
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (<i>Clean Water & Sanitation</i>)	24
TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau (<i>Affordable Clean Energy</i>)	26
TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work & Economic Growth</i>)	27
TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, & Infrastructure</i>)	28
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan (<i>Reduced Inequalities</i>)	29
TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities & Communities</i>)	30
TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Consumption & Production</i>)	31
TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim (<i>Climate Action</i>)	31
TPB 15. Ekosistem Daratan (<i>Life on Land</i>)	32
TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice, & Strong Institutions</i>)	33
3.2 Pembahasan Lebih Rinci Terkait Temuan	34
3.3 Lamanya Sertifikasi RSPO	34
3.3.1 Bersertifikasi RSPO di bawah 1 Tahun	34
3.3.2 Bersertifikasi RSPO antara 2-5 tahun	35
3.4 Pemetaan Kasus-Kasus Khusus dalam Tiap Tujuan TPB	36
Bab 4. Dampak Sertifikasi RSPO terhadap TPB Tingkat Desa	44
Bab 5. Meningkatkan Peran Stakeholders dalam Memperkuat Kontribusi Sertifikasi RSPO terhadap SDGs	58
5.1. Peningkatan Peran Para Pemangku Kepentingan	59
5.2. Peningkatan Peran RSPO	65
Bab 6. Kesimpulan	68
Referensi	70

LAMPIRAN	73
Lampiran 1: Instrumen Pertanyaan Survei SDGs	73
Lampiran 2: Rekapitulasi Temuan Survei	81
Lampiran 2: Data Rinci Kontribusi Kelompok ke TPB Desa	170
KUD Sawit Jaya (Desa Suka Maju)	170
KUD Tani Subur (Desa Pangkalan Tiga)	171
KSU Marga Indah (Desa Marga Mulia)	173
KSU Pantun Sejahtera (Desa Sri Pantun)	174
Perkumpulan Cahaya Putra Harapan (Desa Karya Mukti)	176
KUD Pemura (Desa Bina Karya)	177
Koperasi Sawit Bangkit (Desa Sukorejo)	178
KUD Tuhu Asih (Desa Setia Marga)	180
KSU Makarti (Desa Sidomulyo)	181
KUD Mitra Bersama (Desa Makarti Jaya)	183
Forum pekebun Sawit Swadaya Semarak Mudo (Desa Tandun)	184
Asosiasi Pekebun Swadaya Sawit Pelalawan Siak	186
PPKS Beringin Jaya (Desa Koto Ringin)	187
Koperasi Konsumen Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera (Desa Tebing Tinggi)	189
Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit (PSKS) Tayo Barokah (Desa Dayo & Desa Tapung Jaya)	190
Forum pekebun Swadaya Merlung Renah Mendaluh (Desa Pulau Pauh)	191
Asosiasi pekebun Berkah Mandah Lestari (Desa Taman Raja)	193
Gapoktan Tanjung Sehati (Desa Mekar Jaya)	195
Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya (Desa Nagori Boluk)	196
Koperasi Produsen Gaharu Seratus Bosar Maligas (Kecamatan Bosar Maligas)	198
UD Lestari (Desa Simpang Kopi)	199
Asosiasi pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri (Desa Sungai Buluh)	201
Asosiasi pekebun Sawit Swadaya Amanah (Desa Trimulya Jaya)	202
KUD Karya Mulya (Desa Bumi Makmur)	204
KUD Mekar Sari (Desa Mekar Sari)	205
KUD Permai Jaya (Desa Kencana Sari)	207
KUD Damai (Desa Sukaharjo)	208
KUD Karya Lestari (Desa Karya Mulya)	209
KUD Makarti (Desa Sidomukti)	211
KUD Marga Jaya (Desa Petaling Jaya)	212
KUD Teratai Biru (Desa Peninggalan)	214
Koperasi Rimba Harapan (Desa Merarai Satu)	215
BUMDES Karya Mandala Makmur (Desa Lada Mandala Jaya)	216
Koperasi Mulia Bakti (Desa Banjar Sari)	218

Daftar Gambar

Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	5
--	---

Gambar 2. Prinsip-Prinsip RSPO dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	8
Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian	9
Gambar 4. Theory of Change RSPO	14

Daftar Tabel

Tabel 1. Proporsi Kelompok terhadap Populasi Desa	45
Tabel 2. Potensi Dampak Kelompok Dirasakan di Tingkat Desa untuk Setiap TPB	50
Tabel 3. Dampak Sertifikasi RSPO terhadap Kontribusi TPB Tingkat Desa	54
Tabel 4. Data Diri Responden	81
Tabel 5. Screening Awal	89
Tabel 6. TPB 1. Tanpa Kelaparan	94
Tabel 7. TPB 2. Tanpa Kemiskinan	101
Tabel 8. TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	107
Tabel 9. TPB 9. Pendidikan Berkualitas	111
Tabel 10. TPB 5. Kestaraan Gender	115
Tabel 11. TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	119
Tabel 12. TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau	125
Tabel 13. TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	135
Tabel 14. TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	139
Tabel 15. TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	144
Tabel 16. TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	148
Tabel 17. TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	152
Tabel 18. TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim	156
Tabel 19. TPB 15. Ekosistem Daratan	160
Tabel 20. TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	165

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Selama ini pembahasan mengenai sektor kelapa sawit cenderung berpusat pada dua pendapat. Pendapat pertama memandang sektor kelapa sawit dari peran pentingnya terhadap pembangunan nasional Indonesia. Pendapat kedua memandang sektor kelapa sawit dari berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Dari sudut pandang pendapat pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor kelapa sawit mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan, tapi di sisi lain terjadi konversi lahan ke arah perkembangan monokultur, praktik pembakaran untuk pembukaan kebun yang bisa berdampak luas hingga ke kawasan gambut, peminggiran pekebun melalui hubungan yang tidak adil, dan pengabaian masyarakat adat. Para pihak yang berada di pendapat kedua sebenarnya mengakui peran sektor kelapa sawit terhadap pembangunan nasional Indonesia, namun menuntut perbaikan mendasar pada pengelolaan sektor bisnis ini.

Dalam polarisasi kedua kutub ini, perspektif yang cukup berimbang terhadap peran sektor kelapa sawit jarang tersedia. Upaya melakukan kajian secara cukup berimbang ini dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB (Sustainable Development Goals atau SDGs) dari adanya pertumbuhan sektor kelapa sawit mulai dari tingkat nasional sampai lokal. TPB mempunyai legitimasi yang kuat karena merupakan inisiatif multi pihak tingkat global dengan inisiatif dari PBB yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah dari 194 negara, LSM dan berbagai pelaku ekonomi) dari seluruh dunia, TPB berupaya memberikan kerangka yang lebih sistematis dan terintegratif dalam upaya-upaya mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, kesetaraan gender dan perubahan iklim serta kemudiam menuangkannya dalam aksi nyata. Secara keseluruhan ada 17 tujuan TPB. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia untuk dapat hidup sejahtera. Ketujuh belas tujuan ini ialah sebagai berikut:

Tujuan 1	Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat
Tujuan 2	Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
Tujuan 3	Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
Tujuan 4	Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
Tujuan 5	Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
Tujuan 6	Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
Tujuan 7	Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
Tujuan 8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua
Tujuan 9	Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi
Tujuan 10	Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
Tujuan 11	Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
Tujuan 12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Tujuan 13	Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
Tujuan 14	Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15	Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
Tujuan 16	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Secara skematis, TPB digambarkan dengan diagram sebagai berikut.



Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: <https://www.sdg2030indonesia.org/news/3-masyarakat-sipil-indonesia-and-pemerintah-dorong-percepatan-pembangunan-berkelanjutan>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendorong capaian TPB. TPB diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan pelaksanaan langsung di bawah kepemimpinan Presiden. Melalui Perpres 59/2017 ini dirumuskan sasaran nasional pelaksanaan TPB, rencana aksi nasional dan peta jalan nasional. Perpres 59/2017 ini menjadi acuan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB. Langkah-langkah ini kemudian diintegrasikan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB). Tujuan dari dikeluarkannya RAN-TPB ialah menciptakan sinergi kerja dari pemerintah dan institusi non-pemerintah sehingga upaya-upaya pencapaian TPB menjadi gerakan gotong royong dan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi dan akademisi. RAN-TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional Indonesia telah diselaraskan dengan 17 tujuan dalam TPB

dan target-target agenda pembangunan berkelanjutannya. Agenda ini telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tingkat nasional serta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tingkat daerah, beserta anggarannya.

Di tingkat pelaku bisnis, perusahaan-perusahaan secara aktif mencoba menyesuaikan strategi bisnisnya dengan TPB. Berbagai dokumentasi memperlihatkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan akan menghadapi risiko yang lebih rendah dan unggul dalam jangka panjang. Risiko menjadi berkurang terutama karena perusahaan akan memikirkan berbagai aspek terkait usahanya dalam pengambilan keputusan bisnis. Sementara peluang-peluang tercipta melalui pasar yang baru, peningkatan reputasi, dan semakin berkurangnya halangan untuk melakukan ekspansi pasar dan operasional ke negara-negara lain. Peluang-peluang ini memacu perusahaan-perusahaan untuk secara sigap menyesuaikan strategi bisnisnya dengan TPB. Pembahasan mengenai kontribusi dunia usaha ini terhadap TPB marak dibicarakan dengan dikembangkannya kerangka ESG (*Environment, Social and Governance*). ESG adalah pedoman dasar bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan investasi berdasarkan sejumlah kriteria utama. Kriteria ini meliputi hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar (*environment*), masyarakat luas (*social*), hingga tata kelola (*governance*). Tujuan ESG adalah untuk mengukur dampak sosial dan keberlanjutan dari investasi yang dilakukan perusahaan dan tolak ukurnya ialah beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Khusus untuk sektor kelapa sawit, adalah suatu tantangan untuk menemukan keterkaitan antara peningkatan tata kelola praktik bisnis dari produsen paling kecil ke paling besar dengan pencapaian TPB. Indonesia memiliki posisi yang khusus mengenai hal ini karena pesatnya perkembangan bisnis kelapa sawit di Indonesia saat ini. Minyak sawit dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, di antaranya kebutuhan rumah. Di tingkat global, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) didorong oleh perusahaan pembeli dan LSM lingkungan. Dua negara produsen utama mengembangkan sertifikasi berbasis negara melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil). Penerapan sertifikasi berkelanjutan dapat membantu berbagai aspek yang mana di antaranya aspek ekonomi, sosial dan budaya dan lingkungan, walaupun aspek ekonomi merupakan aspek yang paling menonjol dalam pembangunan kelapa sawit tetapi berdasarkan *triple bottom line* yakni *people, planet* dan *prosperity*.

Terkait Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang mempunyai tujuan pokok adalah mempromosikan produksi, perdagangan, dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan. RSPO membentuk Certification Working Group yang merumuskan Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit berkelanjutan (RSPO Principles & Criteria, atau RSPO P&C). Sejak diterapkan pada bulan Mei 2008 sampai pertengahan Desember 2022, luasan kebun sawit yang sudah disertifikasi mencakup 4.826.853 hektar yang memproduksi 14.874.906 ton TBS (tandan buah segar) atau 19% dari minyak sawit yang diproduksi di dunia, yang di dalamnya juga mencakup 170.552 pekebun swadaya yang memiliki 473.407 hektar.

1.2 Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk membahas hal-hal sebagai berikut sehubungan dengan dampak implementasi sertifikasi RSPO terhadap pencapaian TPB di tingkat desa:

1. Studi literatur mengenai sertifikasi RSPO dan tujuan pembangunan berkelanjutan

2. Pemetaan terhadap dampak implementasi penerapan standar RSPO oleh pekebun swadaya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa.
3. Mengembangkan rekomendasi terkait *enabling factors* dan strategi yang harus ditempuh untuk penguatan kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap TPB
4. Mengembangkan rekomendasi terhadap pekebun swadaya bersertifikat RSPO dalam bersumbangsih untuk pencapaian TPB di tingkat desa.

1.3 Metodologi

Penelitian ini didasarkan kerangka analisis utama yaitu penilaian dampak yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penilaian dampak ini dapat dilakukan pada dampak yang sifatnya langsung, dampak yang sifatnya tidak langsung pada masyarakat setempat, dan dampak yang sifatnya tidak langsung pada masyarakat yang lebih luas.

Adapun tahapan dalam melakukan analisis ialah sebagai berikut:

- a. Finalisasi instrumen penelitian baik untuk pengumpulan data melalui *in-depth interview* dengan para anggota Fortasbi dan para nara sumber terkait.
- b. Kesepakatan mengenai sampel untuk fokus studi dengan Fortasbi dan RSPO, yaitu dari koperasi atau Gapoktan yang sudah memperoleh sertifikasi RSPO dan dianggap mempunyai kasus menarik untuk diulas lebih lanjut dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur mengenai sertifikasi RSPO dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Studi literatur ini sifatnya pengumpulan data sekunder. Data sekunder diambil dari artikel jurnal ilmiah baik internasional maupun nasional, buku, publikasi lembaga dan data statistik.
- d. Pengumpulan data primer melalui *in-depth interview* dengan anggota Fortasbi dan para nara sumber terkait.
- e. Data dampak dari sertifikasi RSPO ini kemudian dipetakan dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah dirumuskan secara nasional untuk implementasi TPB.
- f. Dari analisis dengan mengacu pada indikator nasional, kemudian dapat dikembangkan peta untuk memahami bagaimana sektor kelapa sawit di Indonesia berkontribusi pada indikator-indikator pencapaian TPB, baik kontribusi yang sifatnya positif maupun negatif
- g. Dalam proses pemetaan ini, tim peneliti akan lebih memahami operasionalisasi dari indikator TPB. Dari pemahaman ini, dapat diidentifikasi *enabling factors* dan strategi apa saja yang harus ditempuh untuk penguatan kontribusi perkebunan sawit rakyat terhadap TPB

Analisis mengenai pemberlakuan standar RSPO di tingkat pekebun ialah berdasarkan prinsip dan kriteria RSPO untuk pekebun. Prinsip dan kriteria RSPO untuk pekebun dapat dibagi ke dalam tiga bidang yaitu:

I. Sasaran Dampak Kesejahteraan: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan

Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan

Prinsip 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak

Prinsip 3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan

II. Sasaran Dampak Masyarakat: Penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan

Prinsip 4. Menghormati masyarakat dan HAM serta memberi manfaat

Prinsip 5. Mendukung keikutsertaan pekebun

Prinsip 6. Menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja

III. Sasaran Dampak Planet: Ekosistem dikonservasi, dilindungi dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang

Prinsip 7. Melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan

Prinsip-prinsip dari RSPO ini dalam banyak aspeknya beririsan dengan TPB. Irisan-irisan tersebut dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut:

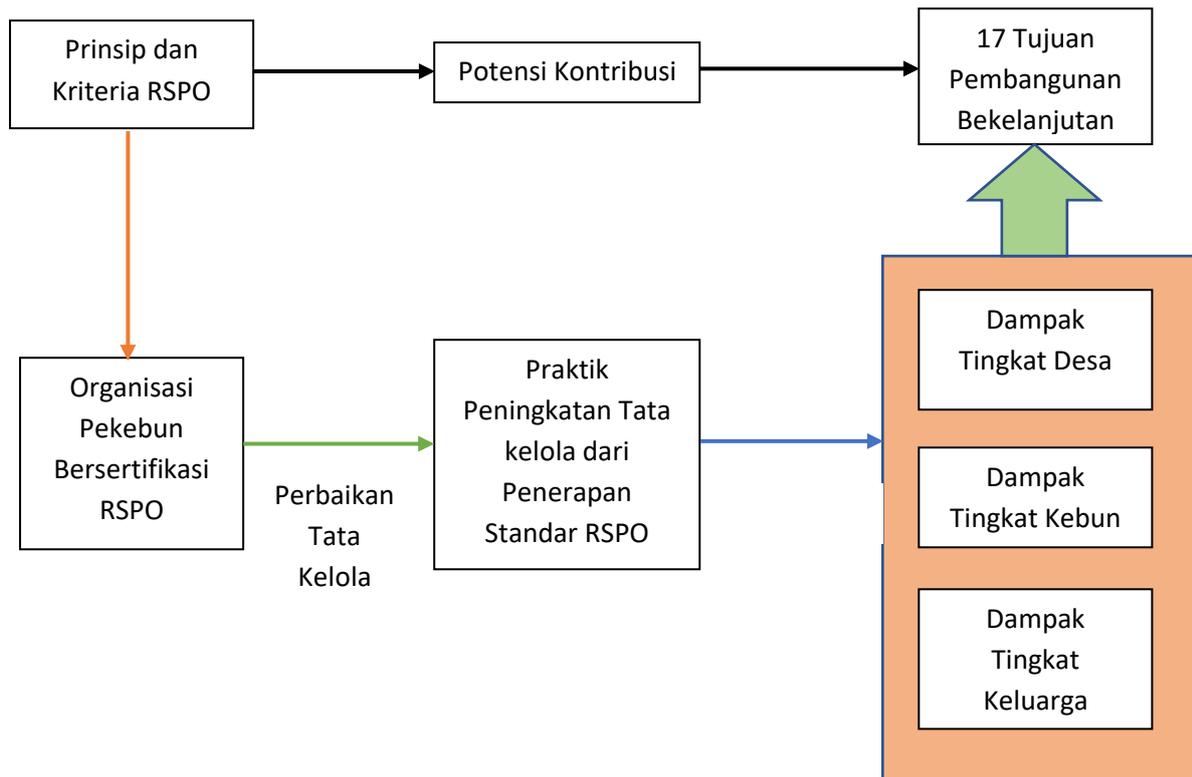
1. **Pilar pembangunan sosial** (meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5) yang banyak beririsan dengan prinsip 1, 2, 4, 5 dan 6 dalam RSPO.
2. **Pilar pembangunan ekonomi** (meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17) yang banyak beririsan dengan prinsip 3 RSPO.
3. **Pilar pembangunan lingkungan** (meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15) yang banyak beririsan dengan Sasaran Dampak Planet dalam RSPO
4. **Pilar pembangunan hukum dan tata kelola** (meliputi Tujuan 16) yang sejalan dengan semangat RSPO untuk meningkatkan kepatuhan para aktor dalam rantai minyak sawit untuk menaati peraturan perundangan di negara masing-masing.



Gambar 2. Prinsip-Prinsip RSPO dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: RSPO (2021)

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip RSPO serta irisannya dengan TPB, kajian ini dilakukan berdasarkan landasan pemikiran yang dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Bab 2. Tinjauan Literatur

2.1 Sertifikasi RSPO dan Dampaknya terhadap Masyarakat & Lingkungan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang paling potensial untuk meningkatkan surplus perdagangan internasional (Tandra et al., 2021). Malaysia dan Indonesia adalah dua negara yang menghasilkan kelapa sawit paling banyak secara global di mana menurut perkiraan USDA (United States Department of Agriculture) Indonesia memproduksi 58,92% dari produksi dunia di tahun 2022, dan diikuti oleh Malaysia dengan produksi 24,34% dari total produksi dunia (USDA, 2022). Berdasarkan data, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diestimasikan mencapai 15.380.981 hektar dengan produksi 48.235.405 pada tahun 2022 (Ditjenbun, 2021). Dampak terhadap lapangan pekerjaan di Indonesia ialah terciptanya 4,2 juta pekerjaan langsung dan 12 juta pekerjaan tidak langsung, adanya 2,4 juta pekebun sawit rakyat yang menyerap 4,6 juta orang pekerja, serta rata-rata ekspor sejak tahun 2019 sejumlah US\$ 21,4 milyar per tahunnya (14,19% dari jumlah ekspor non-migas) dengan kontribusi terhadap pajak sejumlah Rp. 14-20 triliun per tahun atau US\$ 900 juta – 1,3 milyar (BPDPKS, 2022). Sementara untuk Malaysia, luas total perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021 mencapai 5,74 juta hektar (turun dari 5,87 juta hektar di tahun 2020) dengan produksi TBS 15,47 ton/ha dengan total produksi 18,12 juta hektar dan menyumbang ekspor sebesar RM 108,52 milyar atau US\$ 24,5 milyar (Parveez, et.al., 2022).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan berbagai dampak, baik bagi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai dampak negatif ekspansi perkebunan kelapa sawit di antaranya kerusakan lingkungan (Setiawan et. al. 2016; ;Susanti dan Maryudi 2016; Fitzherbert et. al. 2008), perubahan pola nafkah yang menimbulkan kerentanan ekonomi (Amalia 2016; Zunariyah 2012) dan dampak sosial, seperti konflik lahan (Koczberski dan Curry 2005). Lebih terinci, Ayompe, et.al. (2021) mengungkapkan bahwa mayoritas literatur lebih banyak membahas dampak negatif sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal konflik, tempat tinggal dan perampasan lahan, sementara dampak positif langsung yang dibahas meliputi peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Secara ringkas dapat dikatakan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit sering kali telah memunculkan perdebatan di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Perdebatan tersebut seringkali terkait erat dengan isu lingkungan, seperti polusi udara, perampasan lahan, deforestasi yang mana telah memiliki implikasi pengurangan keanekaragaman hayati secara global (Oosterveer, 2015). Analisis yang lebih detail dari Meijaard, et al. (2020) mengungkapkan bahwa dampak perkebunan kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati sejatinya bervariasi tergantung konteks, yaitu tergantung pola ekspansi, tipe lahan yang dipilih, jenis spesies yang mendiami kawasan ekspansi tersebut, dan siapa yang dominan terlibat dalam ekspansi – industri atau pekebun kecil. Oleh karena itu, kelapa sawit tidak bisa sepenuhnya diklaim sebagai tanaman penghasil minyak terbaik karena peluang dampak yang sama juga terindikasi pada tanaman penghasil minyak lainnya.

Namun demikian, secara umum dampak yang sudah teridentifikasi disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan citra buruk bagi produk kelapa sawit di pasar nasional dan internasional (Amalia et al., 2019). Kondisi ini, pada akhirnya meningkatkan tekanan konsumen

internasional (Brandi et al., 2013; Shahida et al., 2018). Pada tahun 2020 misalnya, negara-negara Eropa telah menargetkan 100% sumber minyak nabati berasal dari produk-produk yang bersertifikasi berkelanjutan, termasuk kelapa (Novelli, 2016). Dalam mengatasi isu-isu negatif kelapa sawit, sertifikasi berkelanjutan telah dikembangkan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) (Malau dan Rambe, 2022; Tandra et al., 2021). RSPO merupakan organisasi nirlaba yang menyatukan kepentingan pelaku pada industri sawit di antaranya produsen, pengolah atau pedagang kelapa sawit, produsen barang konsumsi, pengecer, bank atau investor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menerapkan standar global dalam produksi minyak sawit berkelanjutan (RSPO, 2022; RSPO, 2015). Salah satu sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang didirikan pada tahun 2004 (Malau dan Rambe, 2022; Tandra et al., 2021; Shahida et al., 2018; Brandi et al., 2013). Tujuan utama untuk pengembangan sertifikasi sawit berkelanjutan adalah untuk melaksanakan standar-standar praktik-praktik berkelanjutan di industri kelapa sawit (Tandra et al., 2021; Shahida et al., 2018; Brandi et al., 2013).

Penerapan skema sertifikasi berkelanjutan RSPO ini pertama diterapkan pada tahun 2009 di Indonesia. Sedangkan di Malaysia telah diterapkan sejak satu tahun sebelumnya (Maretna et al., 2021). Sampai tahun 2022, sudah 4.826.8563 hektar lahan kebun sawit bersertifikasi RSPO dengan produksi diperkirakan mencapai 14.874.906 ton yang melibatkan 3.739 perusahaan dan 6,433 fasilitas dengan sertifikat rantai pasok seperti dijelaskan pada RSPO Impact Report 2022 (RSPO, 2022). Lebih lanjut, RSPO Impact Report 2022 mengungkapkan bahwa *Certified Sustainable Palm Oil (CSPO)* berkontribusi pada 19% dari total minyak sawit yang diperdagangkan di dunia, dan di Indonesia sudah 19% dari total produksi disertifikasi dengan RSPO, 19% potensial untuk disertifikasi menurut RSPO dan 62% tidak tersertifikasi RSPO.

Ada beberapa kritik yang ditujukan terhadap RSPO. Pertama, walaupun sudah mengembangkan sistem sertifikasi sejak tahun 2004, namun menurut Environmental Investigation Agency yang bekerjasama dengan Grassroots (organisasi dari Malaysia), RSPO masih memberikan ruang terhadap penebangan hutan primer dan pelanggaran hak-hak masyarakat (EIA & Grassroots, 2019). Kedua, dari *overlay* peta dari 78 perkebunan di Malaysia dan 173 perkebunan di Indonesia yang sudah tersertifikasi RSPO dengan area sebaran mamalia besar langka ditemukan bahwa masih terjadi perubahan hutan tropis oleh produksi kelapa sawit bersertifikasi (Gatti & Velichevskaya, 2020). Selain itu, RSPO beserta pendekatan sertifikasi lainnya dikritik karena dalam pendekatan pasar berdasarkan logika imbalan dari peningkatan akses pasar dan penjualan tapi bukan terhadap produksi *sustainable*, di samping mengandalkan kemampuan para konsumen untuk melakukan penilaian terhadap produk mana yang harus dibeli (Greenpeace, 2021). Keterbatasan dalam menghadirkan solusi bagi pekebun juga disebutkan sebagai kelemahan mendasar dari sistem sertifikasi (Ogahara, et.al., 2022). Selain itu ada kritik yang menyoroti ketidakefektifan RSPO dalam mengatasi masalah *land grabbing* dalam sektor kelapa sawit dengan banyaknya anggota RSPO dan perkebunan yang sudah tersertifikasi RSPO yang ternyata masih terlibat konflik lahan dengan komunitas lokal yang hampir tidak menerima manfaat dari adanya sertifikasi (Kusumaningtyas, 2018).

Di tengah kritik-kritik tersebut, berbagai laporan penelitian empiris justru membantah berbagai kritik tersebut di atas. Secara faktual, dampak penerapan sertifikasi RSPO bervariasi antara perusahaan dan pekebun sawit. Dapat diamati penurunan emisi karbon secara signifikan dengan penerapan sertifikasi minyak sawit (Schmidt & de Rosa, 2020). Bagi negara (Rosyadi et al., 2020)

menemukan bahwa RSPO memiliki dampak positif yang signifikan terutama peningkatan nilai ekspor ke negara-negara tujuan utama ekspor minyak mentah (CPO) kelapa sawit. Sementara, bagi pekebun sawit, RSPO berdampak pada peningkatan pendapatan karena adanya harga yang lebih baik dan juga produksi yang meningkat, pengakuan hak-hak masyarakat lokal dan adat (Kurniawati et al. 2015; Brandi et al., 2013; Nesadurai, 2013; RSPO, 2007), dan kesehatan sebagai akibat peningkatan kesadaran pekebun terhadap bahaya penggunaan pestisida (Opijnen et al., 2013), serta peningkatan peluang untuk mendapatkan pendanaan internasional, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat (Donough et al., 2009; Beuningen dan Knorringa, 2009; Mollenar et al., 2010). Dampak lain RSPO terhadap pekebun adalah partisipasi sertifikasi pekebun menguntungkan organisasi pekebun, terutama dalam hal membina ikatan bisnis dan modal sosial dan manusia pekebun, praktik GAP, perlindungan HCV dan satwa (Hidayat et al., 2015). Sedangkan bagi perusahaan, RSPO telah meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik, dengan besar peningkatan pada taraf nyata 10 persen (Malau dan Rambe, 2022). Di samping hal-hal ini, Ayompe et.al. (2021) mengingatkan bahwa sertifikasi harus lebih diarahkan ke perbaikan aspek sosial, bukan hanya menyoroiti hal-hal terkait aspek lingkungan saja.

2.2 TPB dan Pembangunan Pedesaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs) adalah tujuan global yang diadopsi pada 2015 dalam kerangka untuk mengentaskan kemiskinan dari setiap bidang kehidupan dan membuat dunia menjadi tempat yang layak untuk ditinggali pada tahun 2030 (Singh, dan Gautam, 2022). Di Indonesia TPB dipopulerkan dengan nama Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB (Panuluh, dan Fitri, 2016). Tujuan utama pembangunan berkelanjutan (TPB) adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga hasilnya mempengaruhi semua bidang secara positif (Singh, dan Gautam, 2022). Pada 25 September 2015, Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari Agenda Pembangunan Pasca-2015. TPB dibangun di atas Tujuan Pembangunan Milenium, agenda global yang dikejar dari tahun 2000 hingga 2015, dan akan memandu aksi global dalam pembangunan berkelanjutan hingga 2030 (UCLA, 2015). 17 tujuan berbeda tersebut ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memenuhi berbagai bidang pembangunan seperti kelaparan, kemiskinan, masalah kesehatan, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan (Singh, dan Gautam, 2022). Berbeda dengan pendahulunya, TPB mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif dengan mengakomodasi isu-isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs, maupun kuantitatif sesuai penyelesaian terhadap setiap tujuan dan sarannya. TPB juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara—baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang—untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai TPB (Panuluh, dan Fitri, 2016).

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah rencana pembangunan jangka panjang yang diberikan kepada negara-negara anggota PBB dalam periode jangka waktu 15 tahun. Ini membentuk kerangka kerja pembangunan yang dapat diatasi melalui kebijakan dan penataan ulang rencana dan program untuk memenuhi setiap tujuan tertentu. Rencana dalam konteks ini akan memasukkan semua alternatif yang mungkin. Untuk itu, perwujudannya memerlukan keterlibatan semua sektor

dan pemangku kepentingan dalam pembangunan. Inilah sebabnya mengapa integrasi masyarakat pedesaan atau komunitas menjadi perlu. Dimasukkannya masyarakat pedesaan dalam rencana pembangunan, dengan kebijakan dan cara yang konkret dan spesifik untuk mentransmisikan rencana ini akan menandai pencapaian luar biasa dalam agenda visi 2030 (Hanachor, dan Olumati, 2018). Fokus mendasar untuk mencapai TPB pada tahun 2030 adalah untuk mempromosikan pembangunan manusia khususnya pada satu miliar masyarakat yang tinggal di pedesaan yang membutuhkan transformasi pedesaan. Transformasi dan perbaikan daerah pedesaan sangat penting untuk pembangunan holistik masyarakat pedesaan (Voola, and Kalyanasundaram, 2020).

Mengapa transformasi dan integrasi pembangunan pedesaan dalam kerangka untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan penting? Kemiskinan pedesaan menyumbang 75% dari kemiskinan global (Genewa: WHO, 2010). Di daerah pedesaan sepertinya orang hidup tidak terlalu miskin namun fenomena kemiskinan itu nyata dan lebih dominan dari perkotaan. Memerangi kemiskinan pedesaan adalah memerlukan pendekatan multidimensi (Voola, and Kalyanasundaram, 2020). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dengan menghadapi situasi harapan hidup rendah (Hanachor, dan Olumati, 2018). Kemiskinan di pedesaan berasal dari pengaruh masyarakat dan pola pikir yang dapat menyebabkan deprivasi sosial dan eksklusi dewasa (Voola, and Kalyanasundaram, 2020). Kemiskinan pedesaan merupakan konsekuensi dari berbagai bentuk marginalisasi seperti keterpencilan, terbatasnya akses informasi dan layanan, buta huruf, lemahnya institusi dan organisasi, atau terbatasnya akses terhadap sumber daya alam. Kemiskinan juga sering ditandai dengan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (IFAD, 2018; Olinto et al. 2013). Kemiskinan pedesaan perlu ditargetkan dan diakhiri sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama TPB 1 tentang penghapusan kemiskinan di atas bumi (Oyeshola 2007).

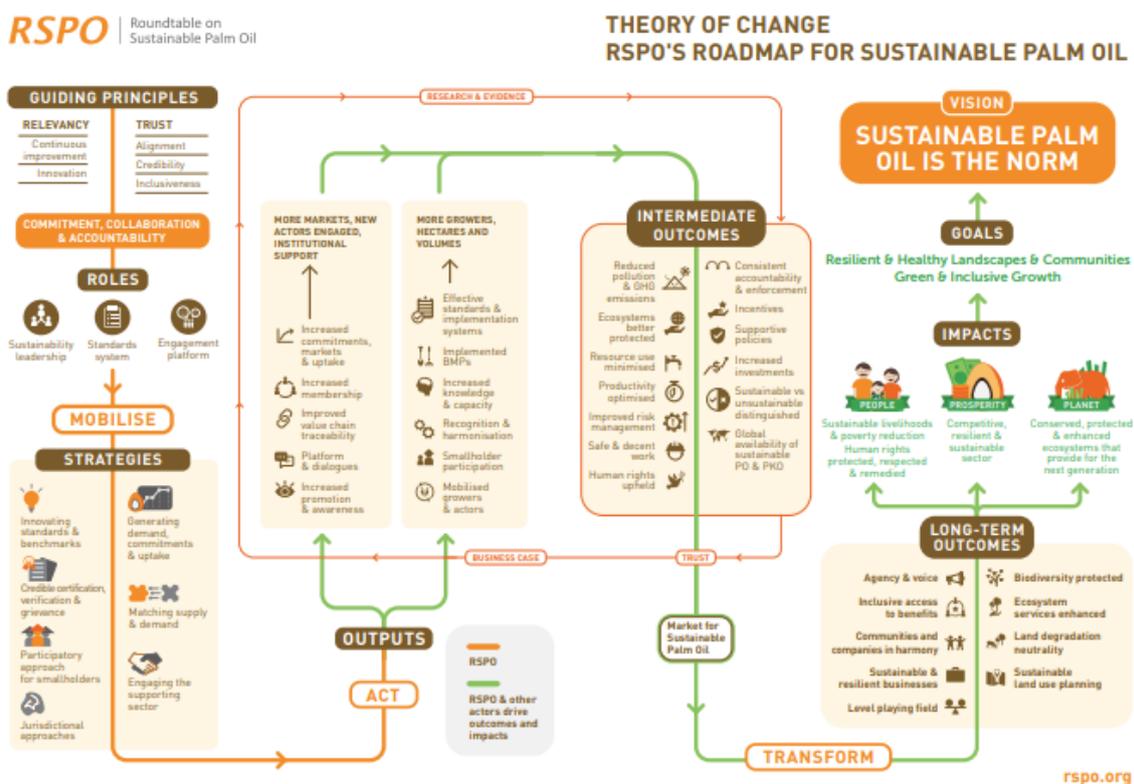
Laporan Bank Dunia 2013 menjelaskan, pertanian adalah pekerjaan utama untuk hidup di antara dua pertiga dari penduduk miskin pedesaan (Voola, and Kalyanasundaram, 2020). Secara global, orang-orang di daerah pedesaan kekurangan akses ke layanan energi modern, yang antara lain mempengaruhi produktivitas, pendidikan dan layanan kesehatan, memperburuk kemiskinan pedesaan (Del Arco et al., 2021). Pembangunan pedesaan adalah kunci untuk mengakhiri kemiskinan, dan penting untuk memenuhi TPB (IFAD, 2018). Pedesaan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, orang desa, kehidupan, atau pertanian. Biro Sensus mengacu pada istilah "pedesaan" secara umum untuk orang-orang yang tinggal di daerah dengan populasi lebih sedikit dengan kepadatan penduduk kurang dari 1000 per Km. Umumnya wilayah pedesaan didefinisikan sebagai wilayah geografis yang terletak di luar kota (Voola, and Kalyanasundaram, 2020).

Dalam TPB, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memusatkan perhatian pada misi inklusivitas (*leaving no one behind*) dan orientasi masyarakat (*people first*). Sehubungan dengan hal ini, Bidarbakhtnia (2019) mengusulkan elemen analisis metode pengukuran ketercapaian TPB yang akomodatif terhadap kelompok tertinggal dengan mengedepankan pengukuran kemajuan (*progress assessment*) yang menggarisbawahi penentuan target nilai spesifik, operasionalisasi standarisasi dan penetapan tolok ukur serta agregasi di level indikator dan negara/kawasan. Sehubungan dengan himbuan ini, faktor-faktor seperti kurangnya ketahanan sistem pangan lokal dalam menghadapi peristiwa terkait iklim dan cuaca, ketidaksetaraan berbasis gender yang terus-menerus dihadapi oleh pekebun kecil perempuan, pengangguran kaum muda dan konflik atas sumber daya alam yang langka

harus diatasi untuk mencapai tujuan ambisius TPB (IFAD, 2018). Pemerintah desa dapat mengelola sumber daya kolektif dan mereformasi kepemilikan lahan dengan cara yang melindungi hak-hak kelompok miskin (UCLA, 2015). Mengalokasikan manfaat sosial, ekonomi, dan hukum terkait aset produktif seperti lahan kepada masyarakat sangat penting untuk memenuhi komitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Tirumala dan Tiwari, 2022).

2.3 Kontribusi Minyak Sawit Berkelanjutan terhadap Pencapaian TPB

Pelbagai peningkatan praktik yang dikembangkan dalam kerangka konsep minyak sawit berkelanjutan mempunyai semangat untuk memperbaiki dampak dari sektor kelapa sawit terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemikiran yang paling jauh berkembang ialah yang dilakukan oleh RSPO. RSPO berupaya menciptakan norma transformatif untuk tercapainya sektor kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Prinsip dan kriteria RSPO yang telah melalui diskusi mendalam untuk memperoleh persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di RSPO, menjadi cetak biru untuk menuju transformasi menuju produksi sawit berkelanjutan yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomis dan berlanjut secara lingkungan. Untuk menjelaskan peta jalan bagi pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, RSPO mengembangkan *roadmap* seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4. Theory of Change RSPO

Sumber: RSPO (2022)

Berdasarkan diagram yang menggambarkan teori perubahan dari RSPO tersebut, dapat diterangkan bahwa visi untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma dicoba diwujudkan dengan

tujuan untuk menciptakan komunitas dan lanskap yang resilien dan sehat, serta pertumbuhan yang hijau dan inklusif. Tujuan ini berupaya diraih melalui transformasi melalui terciptanya pasar minyak sawit berkelanjutan yang akan mendorong capaian-capaian jangka panjang dalam hal pengelolaan lanskap, kesetaraan dan harmoni, inklusivitas dan kemampuan menyuarakan untuk menjamin terciptanya dampak baik itu untuk *people, prosperity* dan *planet*. Capaian-capaian ini dibangun baik di tingkat pasar maupun produsen minyak sawit melalui strategi inovasi standar dan *benchmark*, membangun kredibilitas, mengembangkan pendekatan partisipatif dan yurisdiksi, melibatkan berbagai sektor pendukung, serta menciptakan permintaan dan menyeimbangkannya dengan pasokan. Strategi ini diharapkan dalam jangka menengah dapat mengurangi polusi gas rumah kaca, perlindungan terhadap ekosistem, peningkatan produktivitas, pengurangan risiko terhadap alam dan masyarakat, mengembangkan insentif, meningkatkan transparansi pada sektor, serta pembedaan yang jelas dengan produk yang tidak *sustainable*.

Pengukuran kinerja terhadap RSPO berpegang pada Prinsip dan Kriteria RSPO. Prinsip dan Kriteria RSPO dikembangkan dengan menganut prinsip *Planet, People, dan Prosperity* (P3) yang diperkuat dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha. Standar Prinsip dan Kriteria RSPO mengadopsi konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT), menggunakan proses *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam hal pemindahan hak dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan mengatur pembukaan perkebunan baru melalui *New Planting Procedure* (NPP). Mengingat jumlah dan peran pekebun kelapa sawit yang cukup besar maka RSPO juga memungkinkan pekebun kelapa sawit berperan dalam produksi minyak sawit berkelanjutan melalui penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk pekebun kelapa sawit. RSPO merupakan sistem sertifikasi yang paling banyak diteliti, namun penelitian yang ada masih cenderung paling banyak untuk isu sosial-ekonomi serta aspek legal dan prosedural (Abdul Majid, et.al.,2021).

Sementara untuk TPB, ada beberapa usulan untuk mengukur kinerja capaian TPB. Miola dan Schiltz (2019) membandingkan tiga metode paling terkemuka untuk mengukur performa ketercapaian TPB berdasarkan implementasi kebijakan di tingkat negara. Ketiga metode tersebut yaitu pengukuran rata-rata sederhana (*simple mean*), pengukuran jarak (*distance measure*), dan pengukuran kemajuan (*progress measure*). Perbedaan cara mengukur ini berdampak pada perbedaan peringkat dan evaluasi ketercapaian TPB secara signifikan. Oleh karenanya, apapun metode yang dipakai menonjolkan analisis yang bergantung pada konteks negara (*context-dependent analysis*) sementara satu metode tidak akan dapat mengakomodasi seluruh target dan indikator TPB secara sempurna, tapi dapat selalu diperkaya dengan menambahkan elemen-elemen yang belum tercakup berdasarkan referensi berbagai metode lain.

Terlepas dari pilar-pilar TPB yang menggarisbawahi aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, Biermann et al. (2022) melihat TPB sebagai sesuatu yang tidak luput memantik dinamika politik. Analisis Biermann et al. terhadap 3.000 literatur mengenai TPB dari tahun 2016 hingga April 2021 menunjukkan bahwa institusi lokal dan global merasakan dampak politik TPB secara: (1) diskursif (perubahan perdebatan nasional dan global); (2) normatif (perubahan kerangka legislatif dan kebijakan), serta; (3) institusional (penyesuaian susunan institusi). Dampak ini dianalisis dalam dimensi pemerintahan global, sistem politik domestik, integrasi dan koherensi antara institusi dengan kebijakan, inklusivitas pemerintahan lokal hingga global, serta perlindungan integritas ekologis. Akan

tetapi, transformasi politis TPB dirasa terbatas karena lebih banyak terjadi dalam ranah diskursus semata tanpa membawa perubahan signifikan dalam norma dan institusi.

Dampak dari pertumbuhan sektor kelapa sawit terhadap TPB dibahas di beberapa artikel. Chiriaco et al. (2022) menyoroti dampak sosial-ekonomi dari produksi kelapa sawit dengan melakukan tinjauan mendalam terhadap 82 literatur yang diterbitkan dari tahun 2010. Analisis dijalankan dengan berpatok pada 8 TPB yang dinilai paling mendekati aspek pengembangan sosial-ekonomi, yakni: (1) pengentasan kemiskinan (TPB 1); (2) pengentasan kelaparan (TPB 2); (3) penciptaan kehidupan yang sehat dan sejahtera (TPB 3); (4) penyediaan pendidikan berkualitas (TPB 4); (5) penegakan kesetaraan gender (TPB 5); (6) penyediaan air dan sanitasi bersih (TPB 6); (7) penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8), dan; (8) pengurangan kesenjangan (TPB 10). Hasil analisis menunjukkan bahwa literatur memberi kerangka dampak sosial-ekonomi kelapa sawit secara tidak seragam, yakni secara positif, negatif, netral atau bervariasi, dan bahkan kontradiktif. Secara garis besar, negara produsen sawit merasakan pengaruh positif sektor kelapa sawit melalui perannya sebagai jantung dari pertumbuhan ekonomi dan penghidupan komunitas lokal. Hal ini lebih jauh ditunjukkan dengan berkurangnya angka kemiskinan dan naiknya ketahanan pangan. Meski begitu, beberapa kasus menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit dan industrinya dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan absennya fasilitas kondisi kerja yang baik. Dampak negatif ini berusaha diperbaiki dengan skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang kontribusinya paling terlihat dalam realisasi TPB 1 (pengentasan kemiskinan) dan paling sedikit tampak dalam realisasi TPB 5 (kesetaraan gender), tapi tetap secara garis besar berdampak positif bagi masyarakat di sekitar area produksi sawit.

Selanjutnya Mardiharini et al. (2021) mendalami sejauh mana upaya mewujudkan TPB dalam sektor kelapa sawit Indonesia menyentuh aspek kesetaraan gender yang menjadi tujuan kelima TPB. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan kerangka Gender Equality and Social Inclusion (GESI) yang berfokus pada observasi kelompok marginal. Perempuan secara umum berada dalam relasi gender yang tidak setara di berbagai industri, tidak terkecuali industri kelapa sawit, karena ekspektasi masyarakat terhadap perempuan yang idealnya cukup berperan sebagai “pengasuh” atau “manajer” keluarga di aspek reproduksi dan produksi. Keikutsertaan perempuan semakin terbatas dengan keberadaan faktor penghambat lain seperti kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja. Meski begitu, kajian Mardiharini et al. menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor kelapa sawit melalui peran perempuan sebagai: (1) pekebun kelapa sawit yang terlibat aktif dalam aktivitas agronomis; (2) karyawan industri sawit; (3) pekerja perkebunan kelapa sawit. Secara umum, kebanyakan perempuan masih terlibat mengerjakan pekerjaan yang cenderung manajerial (terlihat dari lebih banyaknya perempuan yang mengikuti kegiatan pelatihan finansial) dan melakukannya untuk membantu suami memperoleh lebih banyak penghasilan. Namun, posisi kepemimpinan dan keanggotaan organisasi berbasis komunitas juga mulai dipegang oleh perempuan.

Terkait dengan dampak kelapa sawit terhadap TPB di Indonesia dapat dibahas pada tiga referensi berikut. Referensi pertama ialah dari Hasan dan Hidayat (2018) yang menyajikan analisis terhadap pencapaian konsep dan implementasi pengembangan kelapa sawit Indonesia dari lensa TPB. Sektor sawit Indonesia dinilai mampu berkontribusi terhadap setidaknya 6 butir TPB, yakni: (1) pengentasan kemiskinan (TPB 1); (2) pengentasan kelaparan (TPB 2); (3) pengurangan kesenjangan (TPB 10); (4) penciptaan kehidupan yang sehat (TPB 3); (5) implementasi aksi iklim (TPB 13); (6)

penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8). Walau begitu, Indonesia dianggap belum dapat merealisasikan TPB secara maksimal karena belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun untuk menghindari *middle income trap*, mengentaskan kemiskinan, serta menurunkan tingkat pengangguran. Hasan dan Hidayat menggarisbawahi praktik-praktik berikut untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan sosial sektor sawit Indonesia: (1) peningkatan praktik manajemen, kualitas bibit, dan kualitas pupuk yang lebih baik bagi peningkatan produktivitas pekebun kecil; (2) pengadaan kebijakan yang lebih efektif dan agresif dalam mengentaskan kemiskinan; (3) pembentukan iklim investasi dan bisnis yang kondusif; (4) pembentukan sertifikasi yang inklusif terhadap pekebun kecil. Artikel kedua ditulis oleh Purba (2019) yang menggarisbawahi peluang kebijakan penanaman ulang pemerintah Indonesia dan penetapan tonggak pencapaian sektor kelapa sawit Indonesia dalam mendukung TPB. Kelapa sawit dinilai mampu mendukung TPB berdasarkan indikator multifungsi pertanian (*multifunctional agriculture*) yang didefinisikan OECD dan mencakup: (1) fungsi hijau – manajemen lanskap agrikultur yang merepresentasikan pilar lingkungan TPB (*planet*); (2) fungsi biru – manajemen perairan yang juga tercakup dalam pilar *planet*; (3) fungsi kuning – manajemen kohesi sosial-ekonomi pedesaan yang merepresentasikan pilar sosial TPB (*people*); (4) fungsi putih – manajemen ketahanan dan keamanan produksi agrikultur yang merepresentasikan pilar ekonomi TPB (*profit*). Walau begitu, realisasi pilar-pilar tersebut perlu didukung dengan kebijakan (*policy*) dari pemerintah Indonesia. Melalui Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018, Indonesia menargetkan peningkatan produktivitas kelapa sawit dalam skenario 35-26 (35 ton tandan buah segar/TBS per hektar dan kenaikan 26% produksi) yang diprediksi menghasilkan 94,64 juta ton total produksi minyak sawit mentah pada tahun 2050. Seiring dengan berakhirnya siklus 25 tahun penanaman kelapa sawit di berbagai kawasan Indonesia, peta jalan kebijakan penanaman ulang Indonesia dipandang dapat mencapai target demikian apabila mencakup: (1) strategi peningkatan produktivitas tanaman sawit melalui peningkatan kultur teknis, dan; (2) strategi penanaman bibit unggul varietas terkini. Artikel ketiga ditulis oleh Sukiyono, et.al. (2022) yang menemukan adanya 13 poin dan 47 indikator TPB yang sesuai dan dapat diwujudkan oleh para pekebun dalam perkebunan mandiri maupun plasma. Dalam pilar sosial, pekebun sawit dapat berkontribusi dalam SDG 1–7. pekebun sawit selanjutnya dapat berperan merealisasikan SDG 7, 8, 9, 10, dan 17 dalam pilar ekonomi. Terakhir, SDG 6, 13, dan 15 terbuka dalam pilar lingkungan. Meski begitu, pekebun sawit belum memperlihatkan peran signifikan dalam pilar kerja sama dan penciptaan perdamaian. Peran-peran pekebun sawit merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara terpisah karena saling berhubungan dekat. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada aspek interelasi tersebut dan mencakup lebih banyak data.

Ada dua studi dengan konteks Malaysia yang sudah dilakukan. Studi pertama ialah dari Naidu dan Moorthy (2021) yang melakukan kajian terhadap dinamika industri kelapa sawit di ranah internasional dengan fokus pada tingkat nasional di Malaysia berdasarkan literatur akademik yang dirilis dari tahun 2000 hingga 2021. Dalam upaya menjembatani kampanye anti kelapa sawit yang kadang menimbulkan miskonsepsi serta intervensi regulasi dari negara-negara konsumen kelapa sawit (terutama di Uni Eropa), ditunjukkan adanya perubahan konteks dalam diskursus kelapa sawit internasional, mulai dari tuduhan bahaya kesehatan pada tahun 1980s hingga penekanan pelanggaran hak pekerja dan kerusakan lingkungan pada masa kini. Walaupun isu-isu yang diangkat ini mempengaruhi citra kelapa sawit, data di lapangan menunjukkan bahwa industri kelapa sawit tetap mampu mendukung pencapaian TPB seperti pengentasan kelaparan (TPB 2), peningkatan kesehatan (TPB 3), perkembangan energi terbarukan (TPB 7), serta pola konsumsi dan produksi yang

berkelanjutan. Studi kedua ialah dari Hanafiah et al. (2022) yang menganalisis manfaat dan trade-off dalam strategi mitigasi industri kelapa sawit di Malaysia sebagai negara terbesar kedua penghasil komoditas tersebut. Industri kelapa sawit di Malaysia dinilai membawa manfaat bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi (ditunjukkan dalam TPB 9 dan 12), pengentasan kemiskinan (TPB 1, 8, dan 10), peningkatan ketahanan pangan (TPB 2), energi alternatif (TPB 9), dan kesempatan kerja jangka panjang (TPB 1). Meski begitu, dinamika industri kelapa sawit Malaysia masih diwarnai dengan isu-isu hak asasi manusia dan ketidaksetaraan (TPB 8), peningkatan emisi gas rumah kaca akibat ekspansi besar-besaran perkebunan sawit (TPB 13), perubahan sifat iklim mikro dan kandungan nutrisi tanah (TPB 6 dan 13), peningkatan sedimentasi dan perubahan sifat hidrologi sungai-sungai dekat lereng (TPB 6), serta peningkatan konflik kemasyarakatan dengan satwa liar, spesies invasif, dan pengurangan keragaman hayati (TPB 14 dan 15). Hanafiah et al. mengusulkan beberapa langkah mitigasi yang perlu dikaji ulang skala implementasinya untuk memaksimalkan pencapaian TPB dalam aspek lingkungan tanpa mengorbankan elemen sosial ekonominya, yakni pengendalian hama, manajemen sampah sirkular, dan sertifikasi multi-tanaman.

Spesifik berhubungan dengan RSPO, pada tahun 2021 ada studi yang dilakukan oleh Copenhagen Business School terhadap potensi dampak terhadap TPB dari sertifikasi RSPO (Jespersen, et.al., 2022). Pada kajian ini dilakukan identifikasi kukan identifikasi terhadap keselarasan sertifikasi RSPO terhadap TPB. Identifikasi dilakukan dengan merumuskan kata kunci dari 169 target dan 244 indikator TPB, membandingkan kata kunci tersebut dengan 163 indikator RSPO, dan melihat persamaan di antaranya. Terdapat 89 kecocokan kata kunci antara TPB dan RSPO, di mana RSPO memiliki potensi paling besar untuk mendukung TPB 15 (penanganan ekosistem darat), TPB 2 (pengentasan kelaparan), dan TPB 16 (institusi yang damai, adil, dan kuat). Kontribusi RSPO minim terlihat bagi TPB 13 (penanganan perubahan iklim), TPB 14 (penanganan ekosistem laut), dan TPB 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Bab 3. Survei Dampak Sertifikasi RSPO terhadap TPB

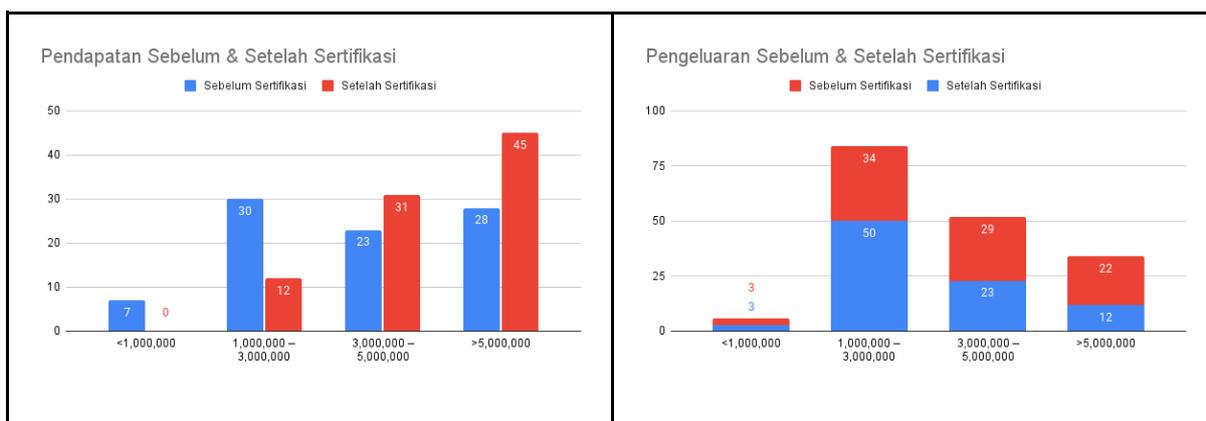
Pada bab ini, kami akan memaparkan hasil dari survei yang telah dilakukan kepada kelompok-kelompok bersertifikasi RSPO yang merupakan anggota FORTASBI. Pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada responden merupakan hasil dari formulasi turunan TPB yang kami anggap relevan dengan konteks sertifikasi RSPO yang dilakukan oleh pekebun sawit swadaya. Tentunya tidak semua poin-poin TPB kami masukkan ke dalam panduan pertanyaan, dari 17 poin yang terdapat dalam TPB, hanya 2 poin yang tidak kami ikut sertakan di dalam panduan pertanyaan survei karena tidak memiliki korelasi yang riil terhadap sertifikasi RSPO. Poin-poin tersebut adalah TPB 14. Life Below Water & TPB 17. Partnership for the Goals. Paparan dari temuan di masing-masing TPB adalah sebagai berikut.

3.1 Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB 1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty)

TPB yang pertama adalah pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Pada konteks Indonesia, permasalahan kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, tidak hanya terkait pendapatan saja, namun juga: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Temuan dari survei yang dilakukan pada responden pekebun yang telah mengalami sertifikasi ialah sebagai berikut.



Dari grafik tersebut terlihat bahwa sertifikasi berpengaruh terhadap pendapatan pekebun, di mana sebelum sertifikasi masih terdapat 6 responden yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 1.000.000 dan 28 responden yang memiliki penghasilan di rentang Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000. Namun pasca sertifikasi terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan secara signifikan. Dari hasil wawancara terungkap bahwa sudah tidak ada responden dengan penghasilan di bawah Rp. 1.000.000 sementara terjadi peningkatan responden berpenghasilan di atas Rp. 5.000.000,-. Demikian juga terjadi peningkatan kemampuan untuk pengeluaran di mana terjadi peningkatan dari responden yang

mampu membelanjakan di atas Rp. 3.000.000,- sementara terjadi penurunan jumlah responden yang mampu membelanjakan di bawah Rp. 3.000.000,-.

Berdasarkan hal tersebut, jika melihat pada hasil survei yang sudah dilakukan terkait dampak sertifikasi RSPO terhadap peningkatan TPB desa,¹ maka dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi RSPO berpengaruh dalam peningkatan pendapatan dan kemampuan pembelanjaan. Dalam beberapa hal, peningkatan pendapatan dan kemampuan pembelanjaan ini berkaitan dengan peningkatan pemasukan secara finansial dan konsumsi. Peningkatan pemasukan secara finansial dan konsumsi sedikit banyak bisa menjadi indikasi adanya peningkatan terhadap upaya pencapaian pengentasan kemiskinan.

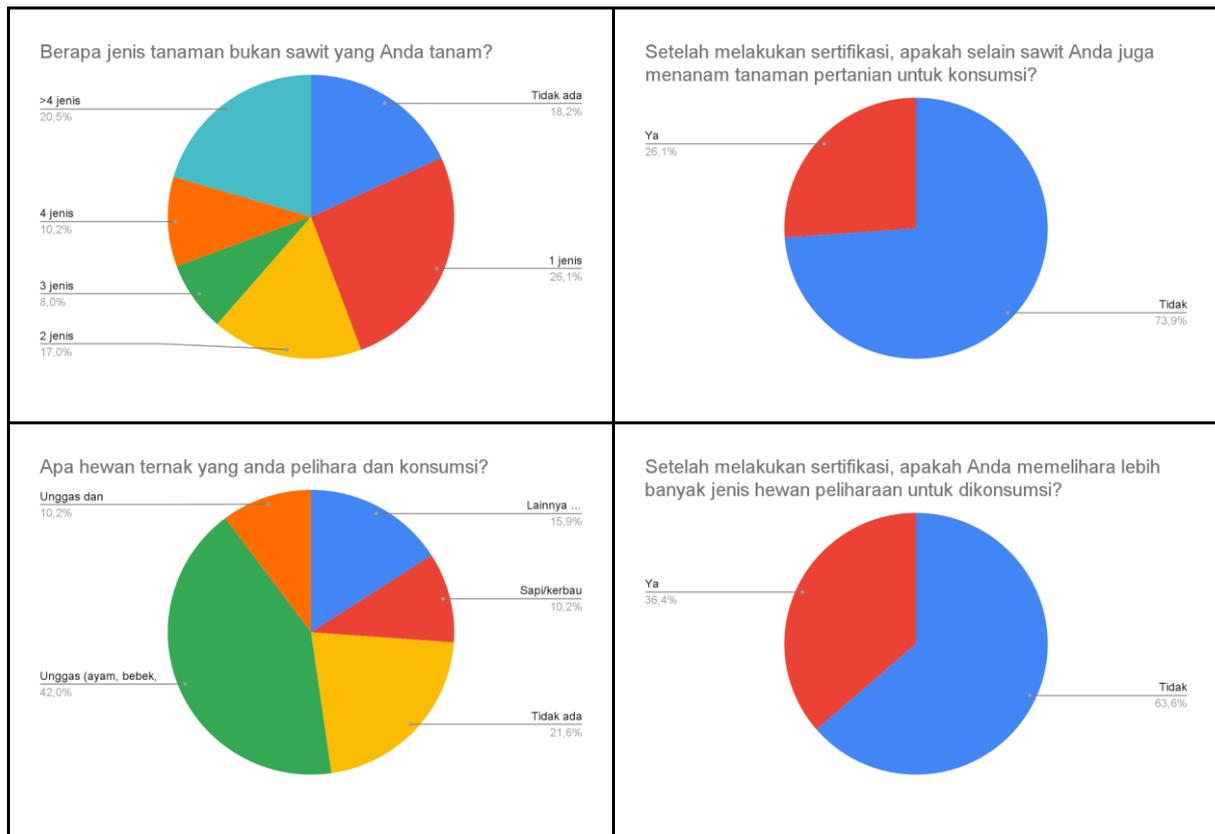
TPB 2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)

TPB yang kedua adalah menuju dunia tanpa kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan riil dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan.

Dalam melakukan survei untuk TPB 2, dipakai beberapa variabel yang diasumsikan terkait dengan TPB 2. Beberapa variabel tersebut ialah pengeluaran biaya makan, dan jenis tanaman/hewan yang dipelihara dan dikonsumsi oleh responden. Survei terhadap ketiga variabel tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:



¹ Survei dilakukan pada rentang waktu Agustus s/d September 2022 terhadap 88 responden yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia

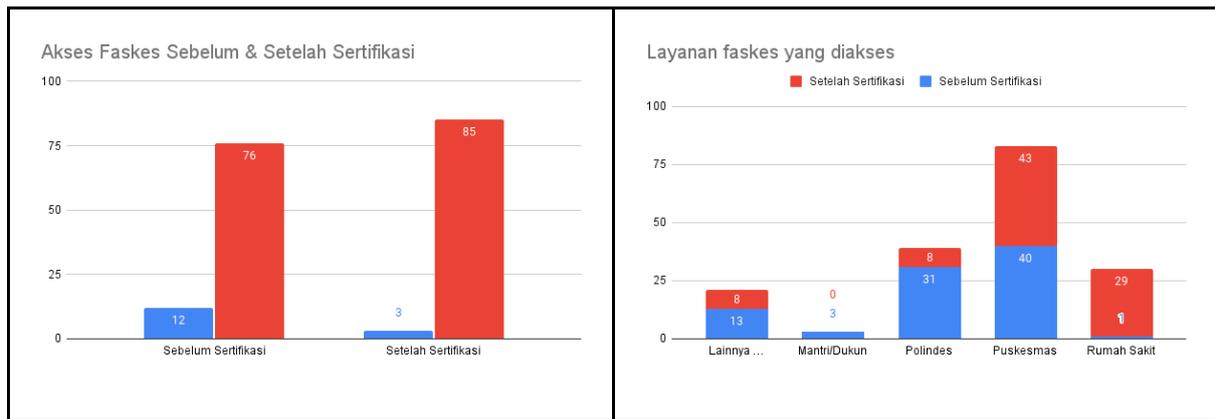


Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan di dalam biaya pengeluaran untuk kebutuhan makanan yang dikeluarkan oleh para responden. Namun di sisi lain, berdasarkan data yang ada mayoritas mengklaim jumlah pengeluaran untuk bahan makanan berkisar di rentang Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, yang notabene merupakan pengeluaran ideal bagi standar rumah tangga di Indonesia. Sementara itu, pada konteks jenis tanaman dan hewan yang dipelihara dan dikonsumsi oleh para responden, terlihat pasca sertifikasi mayoritas responden merasa tidak dapat menanam tanaman non-sawit (73,9%) dan mengembangbiakkan hewan ternak (63,6%). Walaupun hanya sedikit responden yang mengklaim adanya peningkatan untuk jenis tanaman pertanian dan hewan ternak pasca sertifikasi, namun mayoritas responden mengakui bahwa sebelum adanya sertifikasi mereka sudah menanam tanaman non-sawit dan memelihara hewan ternak, setidaknya satu jenis.

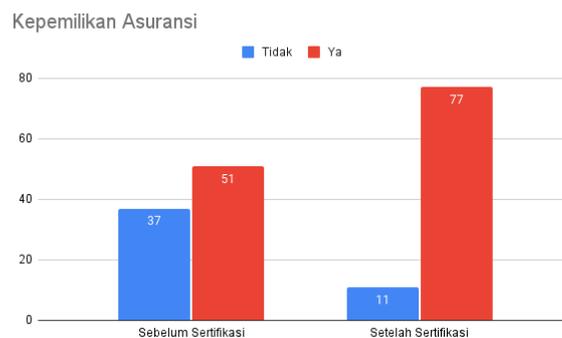
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health & Well-being*)

Seluruh isu kesehatan dalam TPB diintegrasikan dalam TPB 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. Pada konteks Indonesia, program yang diusung untuk mewujudkan TPB dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, dari survei yang telah dilakukan setidaknya terdapat dua poin dari Program Indonesia Sehat yang terlihat sejalan dengan sertifikasi RSPO, yakni pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (86%) sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan sebelum menjalankan sertifikasi. Sesudah sertifikasi, hanya ada peningkatan 11% (atau 9 orang dari 88 responden) dari jumlah responden yang mengakses fasilitas kesehatan. Namun demikian, ternyata setelah sertifikasi ada perubahan jenis layanan fasilitas kesehatan yang dijangkau oleh para pekebun. Para responden yang sebelumnya mengakses Polindes (35,22%) kemudian beralih ke puskesmas (48,86%) atau rumah sakit (32,95%). Perubahan akses ini sebetulnya menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pekebun yang menjalankan sertifikasi untuk mengakses fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan lebih jauh. Ada dua faktor yang mungkin mempengaruhi yaitu: (1) adanya kesadaran yang meningkat tentang perlunya mengakses fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan lebih baik, atau (2) adanya kemampuan yang meningkat secara finansial untuk bisa mengakses pengobatan yang lebih lengkap, daya beli obat yang meningkat (adanya BPJS tetap mengharuskan pasien mengeluarkan biaya untuk beberapa obat dalam pengobatan yang lebih lengkap), serta kemampuan untuk menyediakan biaya transportasi dan biaya keluarga yang mengantar perawatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit.

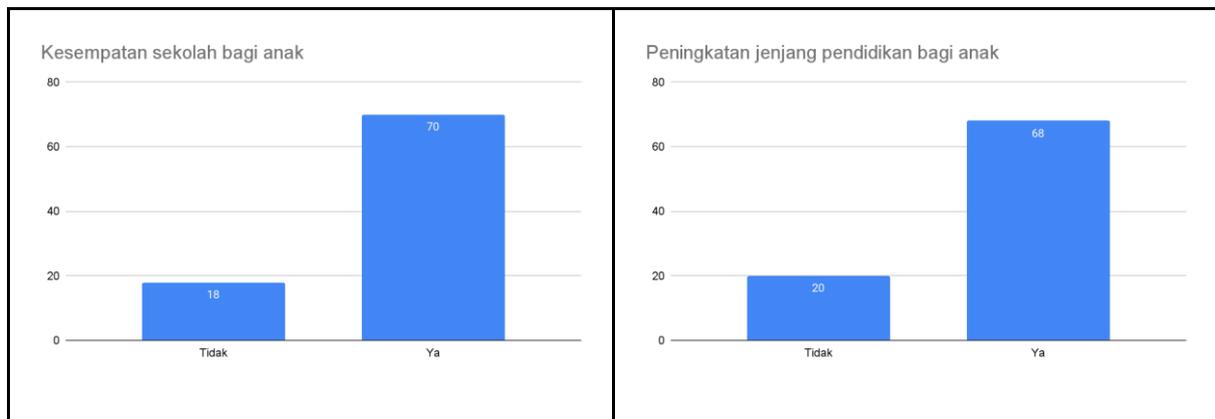


Sementara variabel lain yang disurvei ialah adanya kepemilikan asuransi kesehatan. Dari hasil survei, terlihat bahwa sebelum sertifikasi, sudah terdapat 62,5% responden yang memiliki asuransi dengan jenis JKN-KIS. Berdasarkan cerita dari berbagai responden, dengan adanya sertifikasi RSPO yang mewajibkan tiap kelompok perlu memiliki asuransi untuk dapat melakukan sertifikasi, menyebabkan mereka harus mengurus pendaftaran JKN-KIS, sehingga pasca sertifikasi terdapat peningkatan jumlah responden yang memiliki asuransi menjadi 87,5%. Kepemilikan asuransi bisa menjadi indikasi adanya peningkatan kemudahan para responden untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan yang lebih baik.

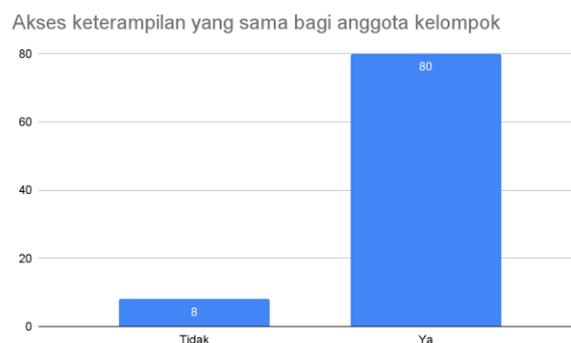
TPB 4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

TPB yang keempat adalah pendidikan yang berkualitas dengan target pada tahun 2030 pendidikan menjadi dimensi tematik dengan fokus utamanya memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada prinsipnya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia sebagai pintu untuk meningkatkan penguasaan teknologi, pengorganisasian, pengelolaan ekonomi dan pengelolaan sosial budaya.

Berdasarkan survei yang dilakukan, pekebun mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam tersedianya kesempatan sekolah bagi anak yaitu dengan peningkatan 79,55%. Sementara, terdapat peningkatan jenjang pendidikan bagi anak-anak dengan peningkatan sebesar 77,27%.



Tidak hanya itu, sertifikasi pun juga memberikan akses kesempatan yang sama kepada seluruh anggota kelompok, baik laki-laki dan perempuan. Dari survei terhadap para responden, mereka mengakui bahwa peningkatan keterampilan terjadi secara merata bagi hampir seluruh pekebun (90,91%).

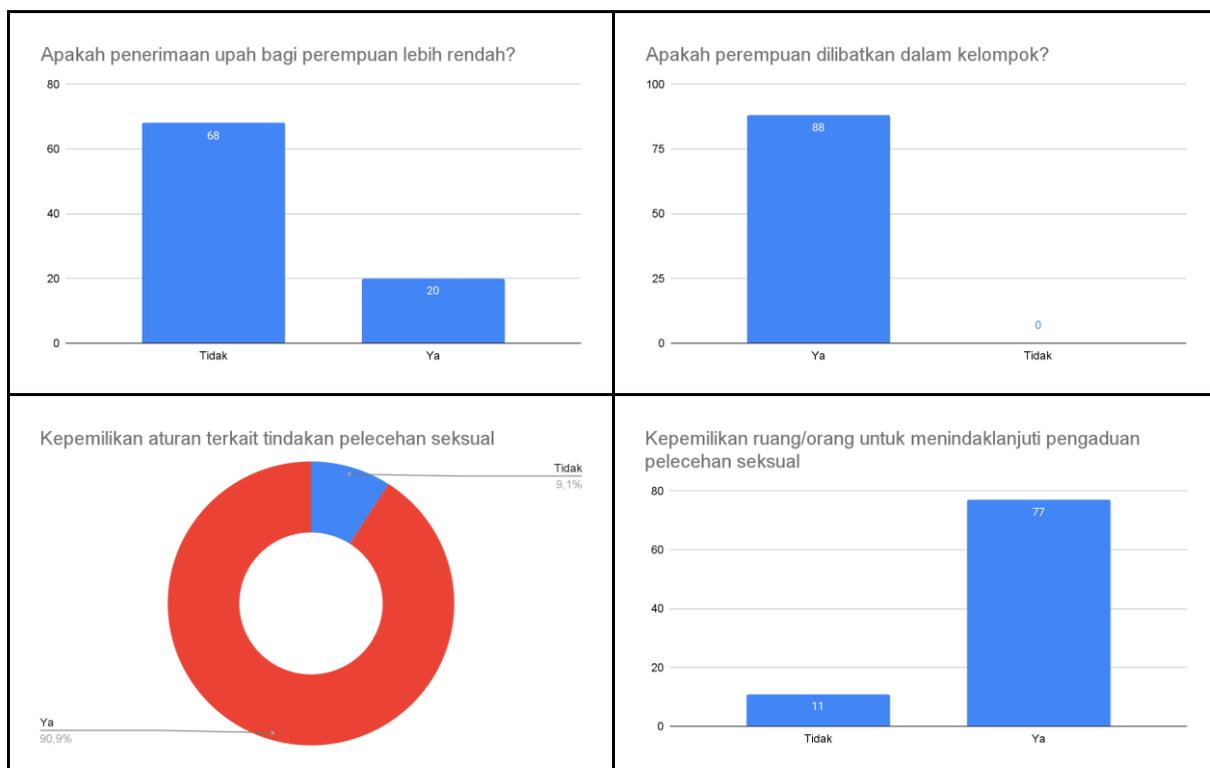


TPB 5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

SDGs kelima adalah kesetaraan gender. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat

ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

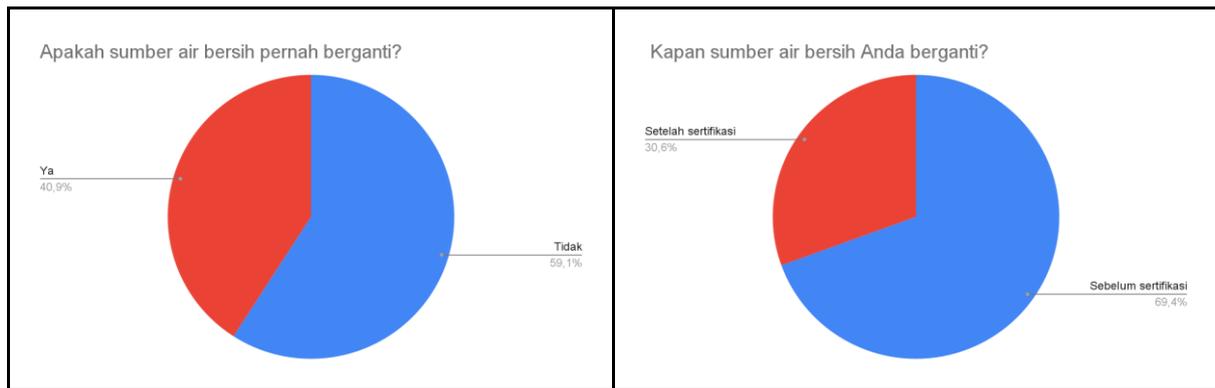
Terkait dalam gender, beberapa variabel yang diteliti dalam survei ialah upah, keterlibatan dalam kegiatan kelompok, juga mengenai pencegahan potensi tindak pelecehan seksual. Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, terlihat bahwa hampir seluruh responden mengklaim kalau kelompok perempuan tidak dibeda-bedakan dengan kelompok laki-laki, baik dari pendapatan (77,27%), hingga akses pelibatan di dalam kelompok (100%). Selain itu, kelompok juga memiliki kepemilikan aturan terkait tindak kekerasan seksual (90,9%) dan memberikan akses ruang aman untuk pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap kelompok perempuan (87,5%). Hasil survei dapat diperlihatkan dengan grafik berikut.



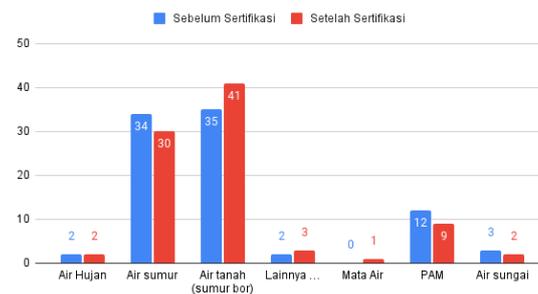
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water & Sanitation*)

Keterbatasan akses masyarakat pada air bersih tidak hanya terjadi karena bencana alam, tapi juga pada beberapa daerah yang kesulitan. Oleh karena itu, inti persoalan yang diangkat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 adalah akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Peran vital air dalam kehidupan sehari-hari tak sebatas untuk pemenuhan kebutuhan dasar saja, seperti minum dan mandi. Termasuk di dalamnya kebutuhan irigasi area pertanian, mengingat hal tersebut juga mendukung ketahanan air dan pangan.

Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak diamati dalam beberapa variabel yaitu ketersediaan sumber air bersih dan pergantian sumber air bersih yang digunakan oleh para pekebun sebelum dan sesudah sertifikasi.

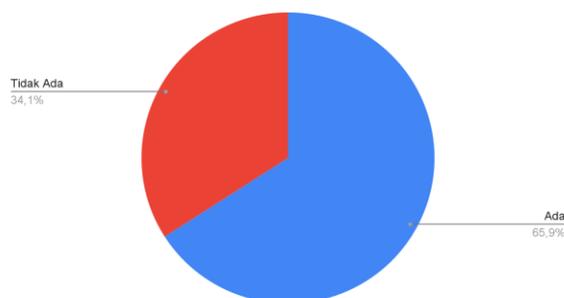


Sumber air bersih sebelum & setelah sertifikasi



Berdasarkan data dari responden, sekitar 59,1% mengakui tidak pernah mengganti sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara itu bagi mereka yang mengganti sumber air bersih (36 responden), terbagi lagi menjadi sebelum sertifikasi (69,4%) dan setelah sertifikasi (30,6%). Dari jenis sumber air bersih yang digunakan saat ini, mayoritas responden menggunakan air sumur (34,09%) dan air tanah/sumur bor (46,59%).

Fasilitas air bersih & sanitasi pasca penyemprotan pestisida



Ketersediaan air bersih juga merupakan hal yang vital untuk mencegah kontaminasi bahan kimia yang terpapar dari proses pemeliharaan kebun. Contoh yang umum terjadi ialah paparan pestisida karena tidak mencuci tangan atau badan dengan bersih setelah penyemprotan kebun dengan pestisida sehingga bahan kimia berbahaya dari pestisida masuk ke rantai makanan. Sejalan dengan itu, RSPO mewajibkan bagi kelompok yang sudah bersertifikasi untuk memiliki sarana tersebut agar dapat digunakan pasca penyemprotan. Dari 88 responden yang kami wawancarai, terdapat sekitar 65,9% responden yang sudah memiliki fasilitas tersebut di dalam kelompoknya.

TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable Clean Energy*)

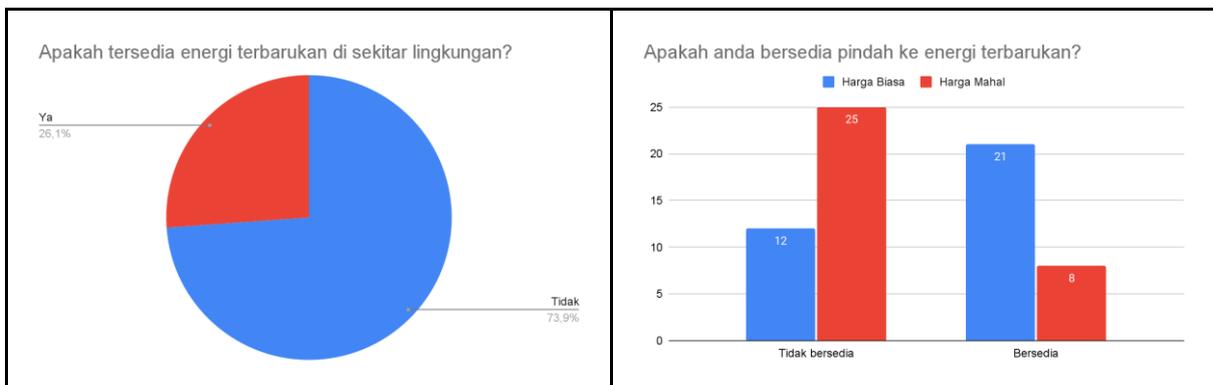
Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Pada konteks responden yang mengisi survei ini, sebagian besar sudah mempunyai akses terhadap listrik PLN untuk penerangan dan gas untuk memasak. Listrik sudah merupakan sumber penerangan 97,73% bagi rumah tangga pekebun dan gas (baik tabung gas ukuran 3 kg untuk 64,8% dari seluruh keluarga pekebun dan tabung gas 12 kg untuk 30,7% dari seluruh keluarga pekebun) merupakan sumber bahan bakar yang umum digunakan untuk memasak. Hal ini menunjukkan sebetulnya bahwa pekebun yang telah menjalankan sertifikasi kebanyakan kondisinya cukup mapan secara ekonomi sehingga memungkinkan mereka mengakses energi listrik dan gas.



Walaupun demikian, pemanfaatan energi terbarukan belum berkembang. Mayoritas responden mengakui bahwa sejauh ini belum ada sumber energi terbarukan di sekitar tempat tinggal mereka. Namun 26,1% dari responden mengungkapkan bahwa ada potensi sumber energi terbarukan.

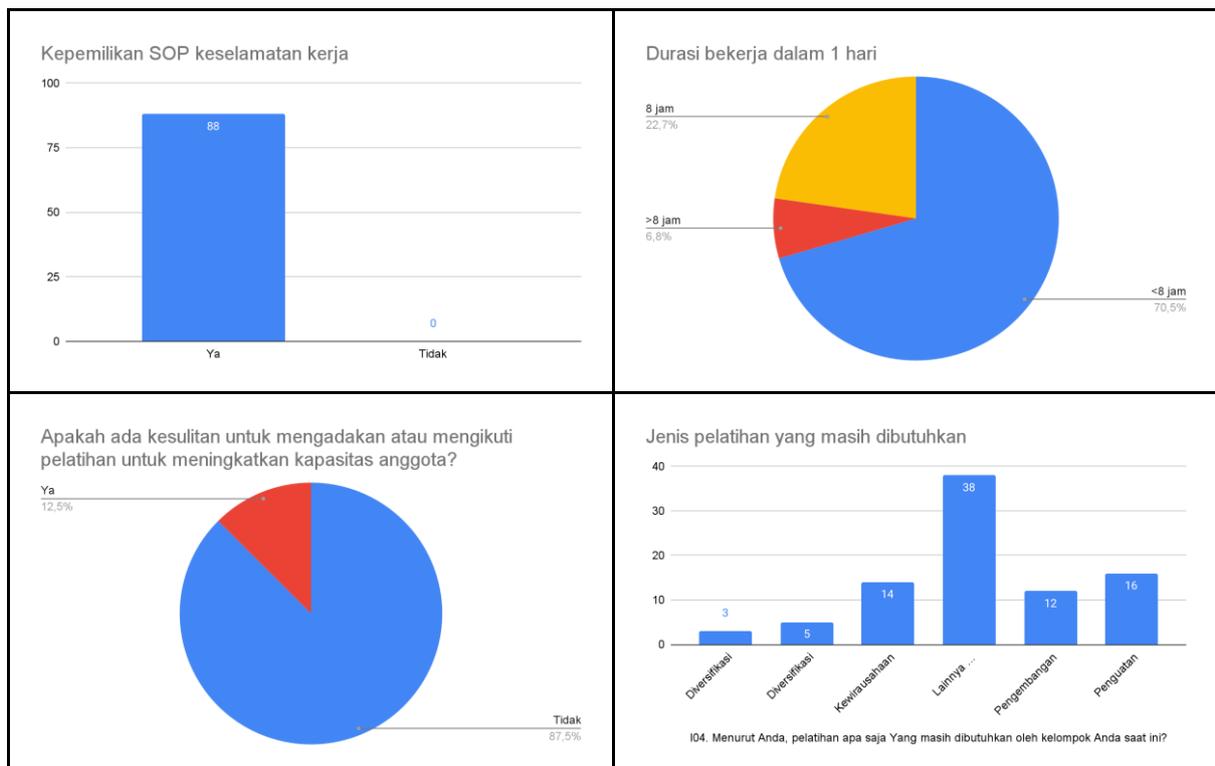


TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work & Economic Growth*)

Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh TPB 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. Untuk masyarakat demokratis, berlaku prinsip bahwa semua kemajuan harus dibagi bersama. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam TPB.

Kontribusi sertifikasi RSPO terhadap terciptanya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dalam survei ini dilihat dari 3 aspek yaitu tersedianya SOP keselamatan kerja, ketentuan tentang lama bekerja dalam satu hari, serta pelatihan bagi anggota. SOP keselamatan kerja merupakan kewajiban dari pelaksanaan sertifikasi RSPO, dan para responden memahami keberadaan SOP sebagai hasil dari sertifikasi RSPO. Sementara 70,5% dari para responden berpendapat bahwa jangka waktu yang dirasa efektif untuk melakukan suatu pekerjaan adalah kurang dari 8 jam.

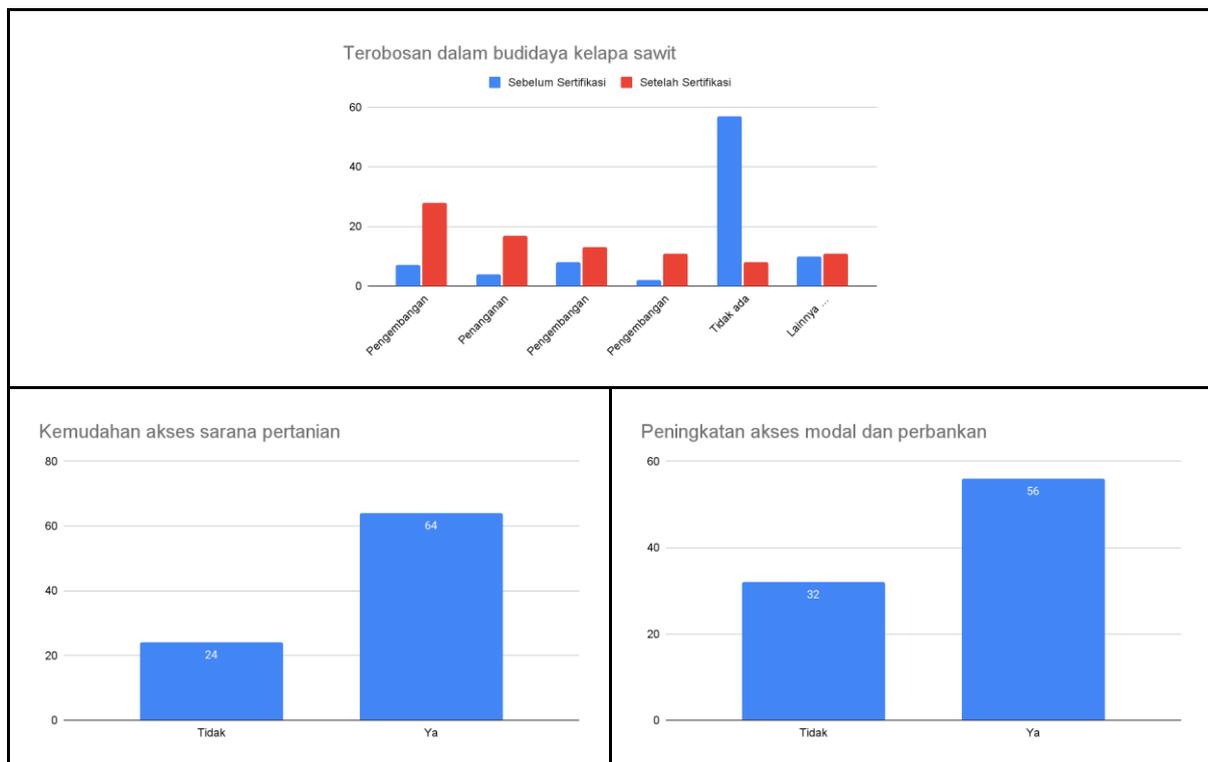
Selain itu, para responden melihat bahwa sertifikasi mempermudah akses pada pelatihan. Pelatihan yang dapat diakses oleh para responden contohnya pembuatan pupuk organik atau teknik pekebunan berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan keterampilan dan kemampuan bagi para anggota yang tergabung di dalamnya (87,5%).



TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, & Infrastructure*)

TPB ke-sembilan adalah investasi pada infrastruktur dan inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut bisa dicapai melalui peningkatan infrastruktur lokal, investasi dalam energi yang tangguh dan teknologi komunikasi, serta membuat teknologi ini tersedia untuk semua orang, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang mungkin tidak memiliki akses.

Terkait dengan para pekebun sawit, pencapaian terhadap TPB terkait industri, inovasi dan infrastruktur diidentifikasi melalui variabel tentang terobosan dalam penerapan GAP dalam budidaya kelapa sawit, serta kemudahan akses sarana pertanian dan modal.



Pada konteks sertifikasi, terlihat bahwa sebelum sertifikasi, masih banyak responden yang mengakui kalau mereka belum memiliki terobosan inovasi dalam budidaya kelapa sawit. Namun, semenjak melakukan sertifikasi, mereka dapat melakukan terobosan tersebut. Terobosan dalam melakukan budidaya ini banyak terjadi karena peningkatan pengetahuan mereka tentang cara berproduksi yang baik melalui GAP.

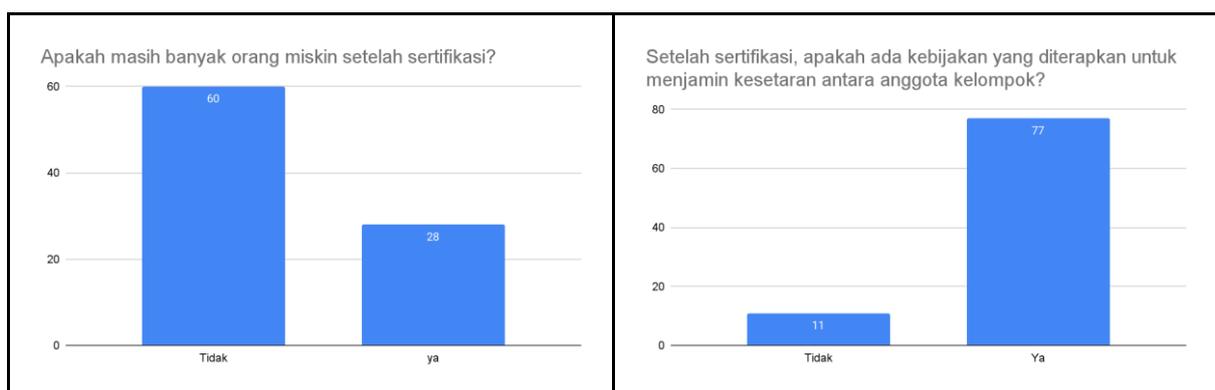
Di samping itu, pekebun mengalami peningkatan akses sarana pertanian. Sebanyak 72,73% pekebun menyatakan memperoleh kemudahan akses sarana pertanian setelah mereka melakukan sertifikasi. Kemudahan akses sarana pertanian ini dapat diasumsikan ada hubungannya dengan kondisi mereka yang berkelompok sehingga memudahkan untuk mendapatkan sarana pertanian secara bersama-sama. Peningkatan kebutuhan atas sarana pertanian ini juga berhubungan dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang cara berproduksi yang baik.

Sementara itu, para responden menyatakan bahwa ada peningkatan akses terhadap modal dari perbankan. Sebanyak 63,64% pekebun menyatakan memperoleh kemudahan akses modal dari perbankan, dan ada peningkatan sebesar 75% dari kondisi sebelum sertifikasi bagi pekebun untuk bisa mengakses modal dari perbankan. Ada tiga hal yang bisa diterangkan sebagai peningkatan akses terhadap modal perbankan ini. Pertama ialah tingkat pengorganisasian pekebun yang meningkat dengan adanya sertifikasi menjadikan mereka lebih mudah untuk mengakses modal perbankan. Kedua, perbankan lebih yakin untuk menyalurkan pinjaman karena pekebun menunjukkan peningkatan kemampuan dalam berbudidaya dengan penerapan GAP. Namun demikian ada kemungkinan ketiga, yaitu sejalan dengan waktu setelah program sertifikasi, cakupan pelayanan kredit perdesaan dari pemerintah juga meningkat. Kondisi petani yang lebih terorganisir dan menunjukkan kemampuan teknis yang lebih baik membantu menguatkan keputusan peminjaman bank kepada mereka.

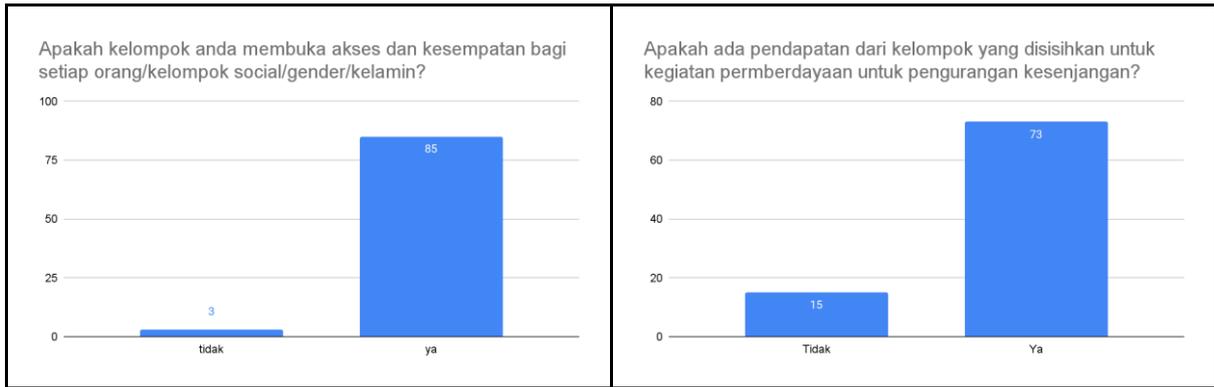
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

SDGs ke-sepuluh adalah mengurangi kesenjangan. Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi yang melibatkan perbaikan aturan, pengawasan pasar dan institusi finansial, serta mendorong bantuan pembangunan dan investasi secara langsung pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Memfasilitasi perpindahan dan pergerakan penduduk yang aman juga menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan yang semakin lebar.

Untuk survei ini, ada empat variabel yang diukur untuk pengurangan kesenjangan, yaitu jumlah orang miskin, kebijakan yang menjamin kesetaraan antar anggota kelompok, serta terbukanya kesempatan bagi semua orang tanpa memandang gender maupun kelompok sosialnya. Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa sertifikasi cukup mengurangi tingkat kesenjangan para anggota kelompok. Hal ini terlihat dari jawaban para responden yang mengklaim kalau jumlah penduduk miskin di desa mereka sudah berkurang semenjak sertifikasi (68,18%), selain itu mereka juga menjamin adanya kesetaraan antar anggota kelompok agar tidak terjadi kesenjangan (87,5%). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

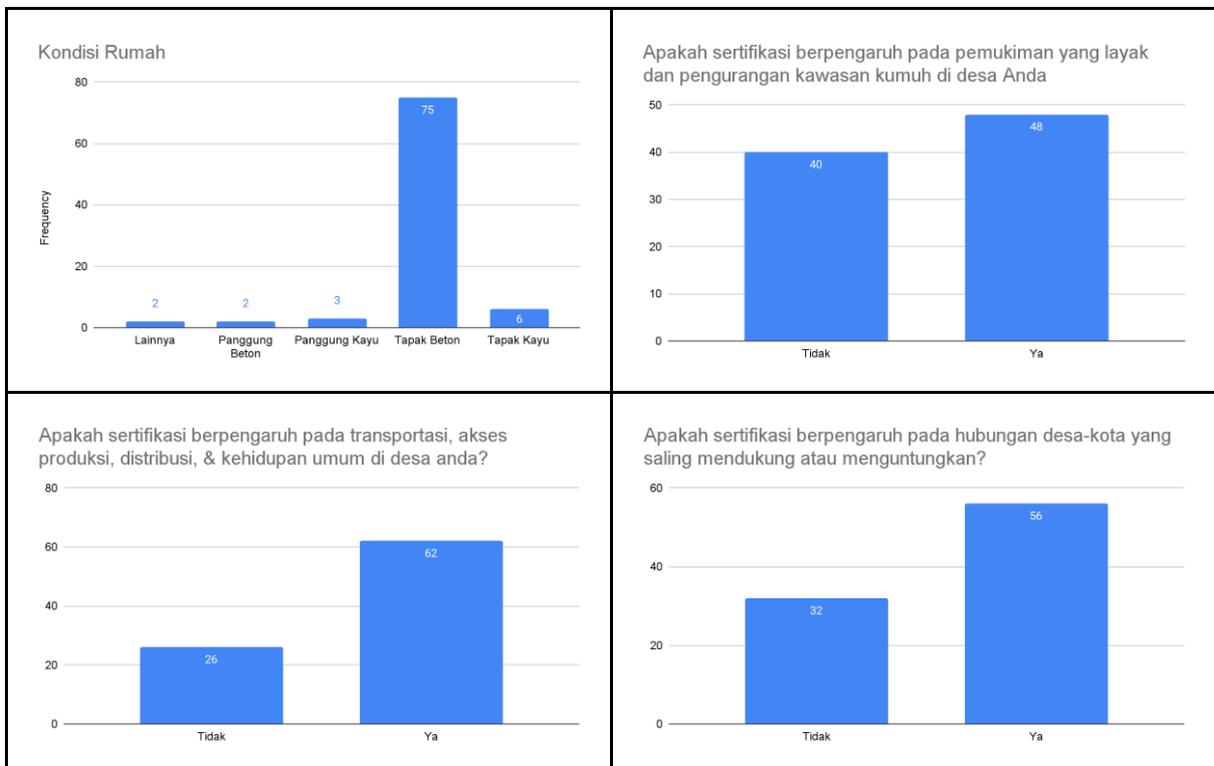


Selain itu, mayoritas responden juga mengklaim mereka membuka kesempatan meningkatkan taraf hidup bagi setiap orang (96,59%), dan adanya pendapatan dari kelompok yang disisihkan untuk kegiatan pemberdayaan dalam hal pengurangan kesenjangan antar masyarakat (82,95%).



TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities & Communities*)

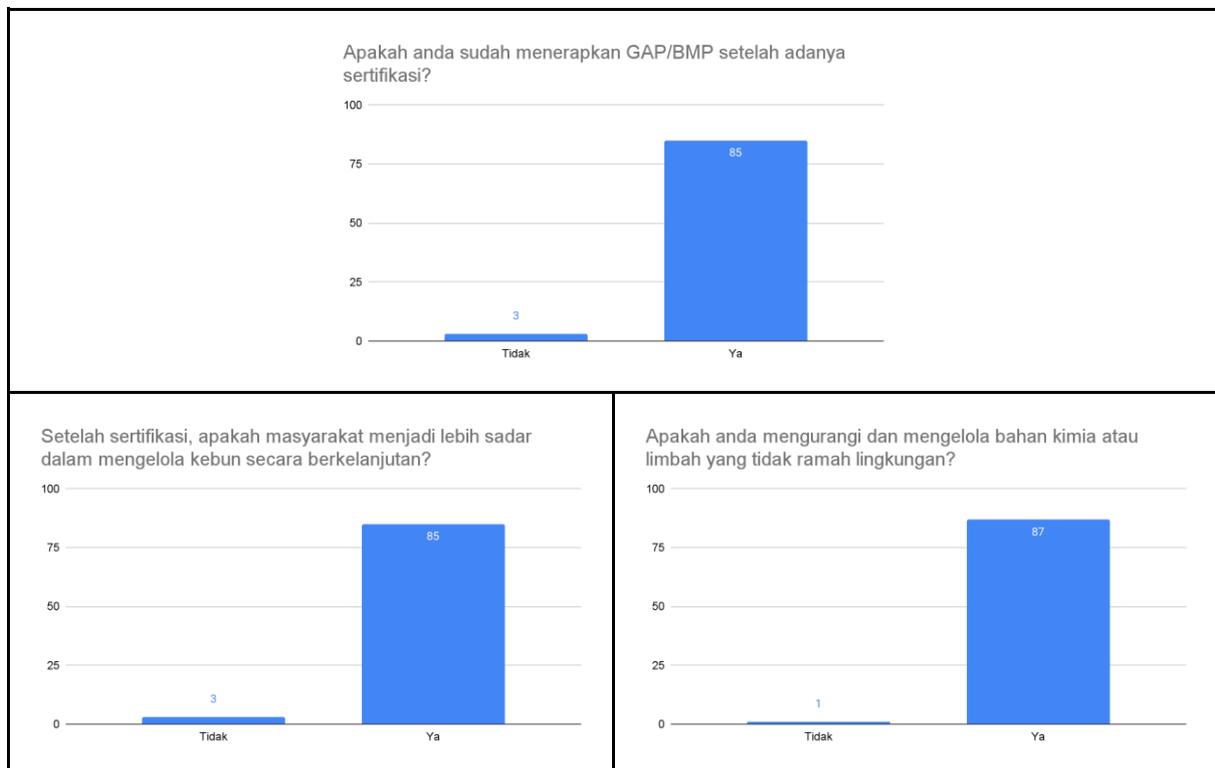
TPB kesebelas adalah kehidupan kota yang berkelanjutan. Telah diprediksi pada tahun 2050, 70% dari populasi dunia akan hidup di kota, yang mana menjadikan kota sebagai tempat yang penting dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan bagi dunia. Pada konteks sertifikasi, terlihat bahwa responden sudah sejalan terhadap beberapa poin yang dianggap turut mendukung TPB ke-sebelas ini. Yakni hampir setengah responden menganggap terdapat pertumbuhan pemukiman yang layak huni dan pengurangan pemukiman kumuh (54,54%), hal ini terlihat dari bentuk rumah tapak beton yang dimiliki oleh mayoritas responden (85,23%). Selain itu, terdapat pula pengaruh terhadap akses transportasi, distribusi, produksi, & kehidupan umum di desa (70,45%), serta pengaruh terhadap hubungan desa-kota yang menguntungkan (63,64%). Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption & Production*)

TPB ke-duabelas adalah produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Pola konsumsi perlu dibuat berkelanjutan, terutama gaya hidup di masyarakat industri dan pengurangan jejak ekologis perlu diterapkan agar regenerasi sumber daya alam, di mana kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, bisa terjadi.

Pada konteks sertifikasi RSPO, terlihat bahwa responden sudah sejalan dengan pokok-pokok dari TPB ke-12 ini. Hal ini dapat terlihat dari mayoritas yang menjawab sudah menerapkan *good agriculture practice/best management practice* dalam kegiatan mereka (96,59%). Selain itu, kesadaran responden menjadi lebih meningkat dalam pengelolaan kebun secara berkelanjutan (96,59%) dan pengurangan penggunaan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan (98,86%). Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

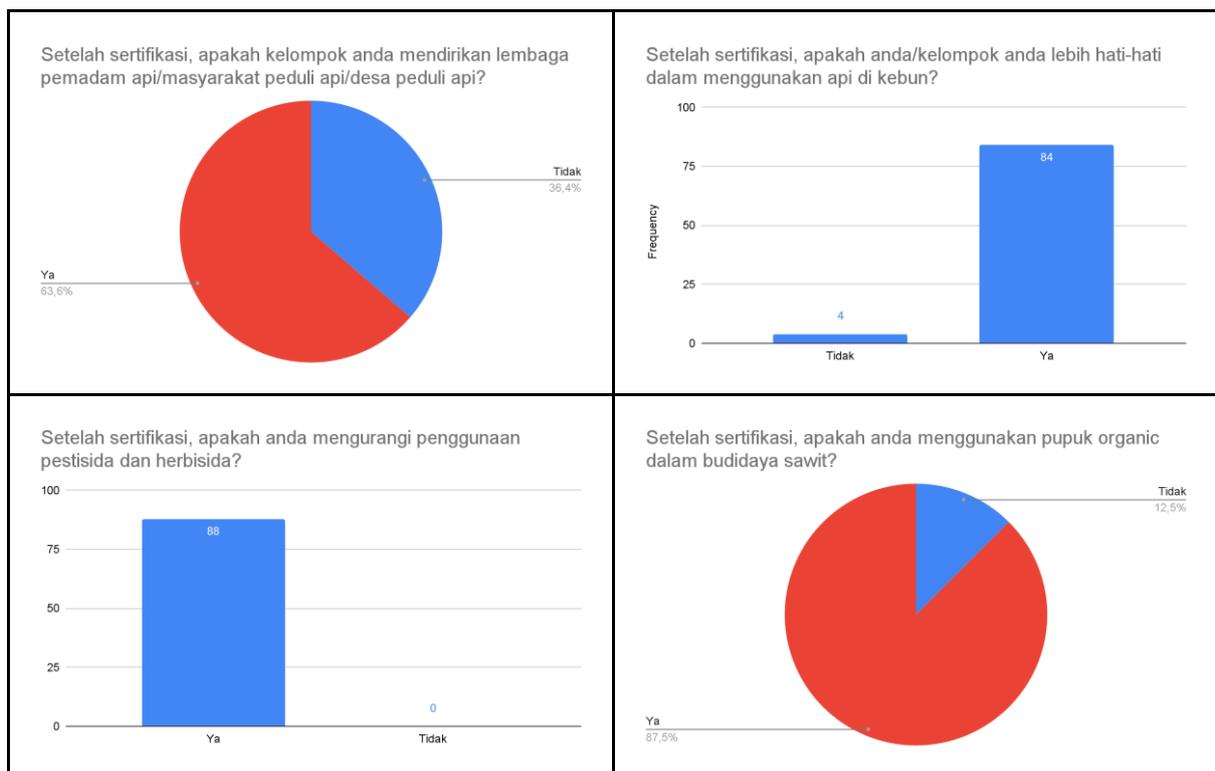


TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

TPB ke-13 adalah penanganan perubahan iklim. Emisi antropogenik CO₂ dan gas rumah kaca lainnya merupakan penyebab dari perubahan iklim. Peningkatan suhu permukaan rata-rata global, peristiwa cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan laut dan pengasaman laut yang berdampak pada sistem alami manusia secara global disebabkan oleh perubahan iklim. Berbagai potensi risiko ini pada akhirnya akan memunculkan efek langsung pada mata pencaharian masyarakat terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua, dikarenakan sumber daya, makanan dan air menjadi semakin langka.

Sertifikasi bisa diharapkan mempunyai kontribusi dalam melakukan dekarbonasi operasi dan rantai pasokan melalui peningkatan efisiensi energi secara terus-menerus, mengurangi jejak karbon dari produk, layanan dan proses produksi. Selain itu sertifikasi perlu menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius sejalan dengan ilmu iklim, serta meningkatkan investasi di pengembangan produk dan layanan rendah karbon yang inovatif, dan yang tak juga kalah penting membangun ketahanan dalam operasi, rantai pasokan, dan komunitas kelompok beroperasi.

Berkaitan dengan climate action, ada beberapa variabel yang diidentifikasi dalam survei ini. Variabel-variabel tersebut ialah kepedulian serta kehati-hatian dalam mencegah dan menangani potensi kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan pertanian berkelanjutan yang diharapkan lebih ramah terhadap iklim. Survei terhadap variabel-variabel ini dapat dilihat pada grafik-grafik berikut.



Kesadaran kelompok yang sudah disertifikasi dalam menjaga lingkungan dapat terlihat pada grafik di atas. Pada konteks ini, kelompok semakin sadar untuk membentuk kelompok peduli api (63,6%) dan meminimalisasi penggunaan api di sekitar kebun mereka (95,45%). Selain itu, pada konteks pengelolaan kebun, mereka meminimalisasi penggunaan pestisida (100%) dan meningkatkan penggunaan pupuk organik dalam budidaya kelapa sawit (87,5%).

TPB 15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*)

TPB ke-15 adalah melindungi hutan dan ekosistem lainnya. Dalam hal ini, pengelolaan lahan berkelanjutan merupakan kunci untuk mempertahankan integritas dan vitalitas sumber daya alam, baik saat ini dan untuk generasi mendatang. Selain itu, tindakan ini juga dapat memastikan pertumbuhan dan kemakmuran sosio-ekonomi jangka panjang. SDG berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan dan gunung pada 2020.

Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim.



Berdasarkan data survei yang ada, sertifikasi memberikan pengetahuan terhadap para responden untuk tidak lagi menebang pohon/hutan (84,09%) dan adanya upaya perlindungan hewan di areal-areal yang dilindungi (79,55%). Selain itu, terdapat beberapa responden yang mengklaim kalau setelah sertifikasi, mereka mendirikan kelompok pekebun peduli konservasi (63,64%). Hal ini sesuai dengan salah satu target TPB ke-15, yakni menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, serta melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi.

TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, & Strong Institutions*)

TPB ke-16 adalah mendorong perdamaian dan keadilan. Lingkungan yang damai dengan lembaga yang efektif, di mana biaya operasi dapat diprediksi dan lingkungan kerja yang stabil, dapat membuat organisasi berkembang. Kegagalan dalam menerapkan praktik organisasi yang bertanggung jawab dapat berdampak pada biaya dan risiko tambahan (keuangan, hukum, reputasi) untuk organisasi itu sendiri, serta disisi lain dapat memperburuk ketegangan dan ketidakstabilan di masyarakat, juga merusak aturan hukum.

Dalam hal ini, salah satu isu yang muncul yaitu korupsi, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan di pasar karena membuat biaya transaksi tidak pasti anti persaingan, dan menghambat kemampuan organisasi untuk mematuhi hak asasi manusia dan kewajiban lainnya. Pada konteks survei sertifikasi, kelompok yang sudah melakukan sertifikasi memiliki kesadaran untuk mengikuti pelatihan penyelesaian konflik (72,73%) dan membentuk lembaga penyelesaian konflik internal (69,32).



3.2 Pembahasan Lebih Rinci Terkait Temuan

3.3 Lamanya Sertifikasi RSPO

Berdasarkan hasil interview dengan 34 kelompok yang telah bersertifikasi RSPO, kami menemukan bahwa responden kami terbagi menjadi dua klasifikasi, yakni mereka yang baru kurang dari 1 tahun bersertifikasi RSPO (48 responden) dan mereka yang sudah bersertifikasi RSPO antara 2-5 tahun (40 responden), dari dua klasifikasi ini kami menemukan beberapa kasus-kasus yang dianggap menarik dan erat kaitannya dengan SDGs. Kasus-kasus tersebut kami rangkum dan narasikan pada dua sub-bab di bawah ini:

3.3.1 Bersertifikasi RSPO di bawah 1 Tahun

Lebih dari 50% responden yang kami wawancarai mengklaim kalau mereka belum lama melakukan sertifikasi RSPO, dengan rentang waktu kurang lebih di bawah 1 tahun. Hal ini menyebabkan mereka belum merasakan manfaat secara signifikan, mulai dari adanya peningkatan hasil pertanian atau finansial dari pendapatan berkebun, dengan mengikuti program sertifikasi tersebut. Meskipun demikian para responden menganggap kalau saat ini manfaat yang dapat mereka rasakan secara langsung adalah adanya beragam pelatihan yang dapat mereka ikuti pasca melakukan sertifikasi dan kemudahan terhadap beberapa akses, seperti akses sarana produksi pertanian, akses terhadap sarana perbankan, dan akses kesehatan.

Jenis-jenis pelatihan yang telah mereka ikuti cenderung beragam, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, penguatan kelembagaan, diversifikasi produk pertanian, dan diversifikasi komoditas pertanian. Ragam pelatihan yang mereka ikuti tersebut, dianggap dapat meningkatkan kemampuan mereka, terutama dalam hal melakukan kegiatan perkebunan yang berkelanjutan. Menurut mereka, biasanya pelatihan-pelatihan yang sudah mereka jalani ini diadakan oleh mitra pendamping, bekerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini perusahaan-perusahaan sawit yang terdapat di sekitar wilayah kelompok mereka.

Pada konteks kemudahan terhadap beberapa akses, para responden mengakui meski baru kurang dari 1 tahun mendapatkan sertifikasi RSPO, tapi semenjak mendapatkan sertifikasi tersebut mereka mendapatkan berbagai kemudahan untuk mengakses beragam hal yang sebelumnya mereka anggap cukup sulit. Mulai dari akses terhadap sarana produksi pertanian yang mumpuni, akses terhadap bantuan finansial berupa pinjaman dari bank, dan akses terhadap berbagai layanan kesehatan. Semisalnya adalah ada beberapa responden yang mengakui kalau sebelum mendapatkan sertifikasi RSPO, mereka cukup kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank, selain itu ada pula yang menganggap aturan RSPO terkait adanya asuransi justru mempermudah mereka dalam mengakses layanan kesehatan yang lebih baik dibandingkan yang ada di dalam desa.

Kemudahan dalam memperoleh akses ini dalam beberapa hal dipengaruhi oleh kondisi para responden yang sekarang sudah tergabung dalam organisasi formal. Keuntungan dari bergabung dengan organisasi formal ialah organisasi tersebut memiliki pencatatan dan manajemen data yang baik sehingga meningkatkan keyakinan pihak lain dalam menjalin hubungan kerja sama. Hal ini menjadi penting karena lemahnya pengorganisasian petani di Indonesia. Peningkatan

pengorganisasian petani - walau masih dalam tahap awal - sering disambut baik berbagai kalangan termasuk pemerintah dan sektor swasta.

3.3.2 Bersertifikasi RSPO antara 2-5 tahun

Sementara itu, para responden yang sudah melakukan sertifikasi lebih lama, yaitu antara 2-5 tahun dapat dengan mudah menunjuk berbagai hal-hal yang dianggap sebagai manfaat dari adanya sertifikasi RSPO. Sertifikasi RSPO meningkatkan keterampilan teknis pekebun swadaya untuk mengelola perkebunan mereka, seperti meningkatkan penggunaan pupuk, panen, dan pemilihan benih.

Di samping itu, RSPO mengembangkan platform yang dinamai RSPO Credit. Melalui platform ini, pekebun dapat memperdagangkan kredit RSPO mereka. Selain dari penyisihan hasil jual beli TBS yang disepakati bersama, pembeli Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) bisa memberikan dana dengan perhitungan yang disepakati dalam platform RSPO Credit untuk kemudian diberikan kepada kelompok pekebun bersertifikasi yang menjual kepada mereka. RSPO Credit menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi organisasi pekebun yang sudah bersertifikasi.

Namun demikian, dalam aspek harga, ternyata hanya 50% pekebun yang merasa bahwa sertifikasi meningkatkan harga buah sawit. Selebihnya mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara harga yang diberikan kepada anggota pengurus dan anggota biasa mengenai dampak sertifikasi terhadap harga TBS. Pada responden yang sudah melakukan sertifikasi antara 2-5 tahun, sebagian besar melaporkan bahwa sertifikasi RSPO telah meningkatkan produksi kelapa sawit mereka.

Dari penjelasan di atas, sertifikasi RSPO lebih memberikan manfaat non finansial dibandingkan dengan manfaat finansial. Hal ini sesuai dengan apa yang dibahas di literatur yaitu sertifikasi dapat meningkatkan pengetahuan teknis pekebun tentang pengelolaan kelapa sawit, dan meningkatkan modal sosial – misalnya, pengakuan oleh pekebun lain (Hidayat, 2015). Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebagian besar pekebun swadaya yang kami survei tidak memiliki banyak pengalaman sebelumnya dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, dan oleh karena itu pengetahuan mereka yang terbatas tentang praktik pertanian yang baik mengakibatkan hasil yang rendah. Belajar tentang praktik pertanian yang lebih baik adalah manfaat non finansial utama dari sertifikasi RSPO yang disepakati adalah mendapatkan akses ke platform minyak sawit bersertifikat (misalnya PalmTrace).

Mayoritas responden setuju bahwa mereka sekarang dapat mengakses platform untuk memperdagangkan kredit RSPO mereka. Namun, sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka memperoleh akses ke pabrik baru yang membeli minyak sawit bersertifikat mereka. Manfaat non finansial lain yang diidentifikasi dalam literatur adalah pengakuan sosial dari pekebun lain. Namun, kurang dari setengah pekebun kecil melihat ini sebagai keuntungan. Mayoritas responden setuju bahwa mereka diakui oleh para pekebun yang tidak bersertifikat, yang bertanya kepada mereka tentang sertifikasi dan meminta nasihat untuk mengelola perkebunan mereka. Pengakuan sosial ini mungkin tidak biasa bagi sebagian kecil responden yang kami wawancarai.

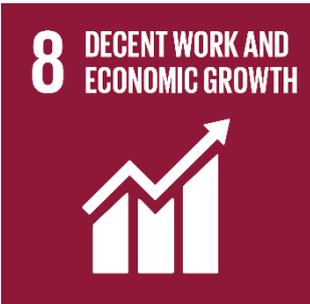
3.4 Pemetaan Kasus-Kasus Khusus dalam Tiap Tujuan TPB

Bagian ini fokusnya ialah pada kaitan kasus-kasus sertifikasi terhadap tiap poin yang terdapat dalam TPB dengan tidak mengabaikan adanya keterkaitan antar kasus dari tiap-tiap responden yang telah diwawancarai.

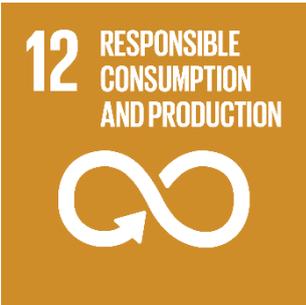
SDGs	Kasus Menarik
 <p>1 NO POVERTY</p>	<p>KUD Tani Subur yang terletak di Desa Pangkalan Tiga di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, kini memiliki banyak kegiatan dan unit usaha sejak mendapatkan Sertifikasi RSPO pada tahun 2017.</p> <p>Tani Subur kini memiliki beberapa kegiatan dan unit usaha antara lain pembibitan kelapa sawit, ternak sapi, minimarket (convenient store), credit union, pusat pengumpulan Tandan Buah Segar (TBS), dan agrowisata. Koperasi juga telah mempekerjakan lebih banyak orang, dan beberapa dari mereka adalah lulusan universitas baru.</p> <p>Unit pembibitan bertujuan untuk menjaga kualitas kelapa sawit dari Tani Subur. Peternakan, lanjutnya, menjadi contoh sistem terpadu, di mana limbah sawit diolah menjadi makanan ternak, sedangkan kotoran sapi digunakan sebagai pupuk organik di perkebunan. Dengan banyaknya unit usaha, pengurus KUD Tani Subur yakin mereka akan bertahan lama.</p>
 <p>2 ZERO HUNGER</p>	<p>Selain mengajarkan praktik pertanian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, BUMDES Karya Mandala Makmur juga memberikan pelajaran mengenai menanam sayuran, seperti terong, cabai, dan kangkung, di ladang dekat perkebunan kelapa sawit. Sejak saat itu, para petani kecil juga dapat membudidayakan tanaman komersial dengan praktik berkelanjutan sebagai bentuk ketahanan pangan yang lebih baik di rumah tangga.</p> <p>Praktek berkelanjutan juga telah diterapkan dalam peternakan sapi. Ada semacam sistem pertanian terpadu antara sapi dan sawit, di mana petani mengumpulkan dan memasok limbah sawit untuk dijadikan pakan ternak, sedangkan kotoran ternak bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi pupuk kompos di kebun.</p>
 <p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	<p>Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Siak Pelalawan pada pertengahan 2021 menerima RSPO Credit. Pembayaran tahap pertama tersebut digunakan untuk membayar program asuransi kesehatan nasional (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) untuk satu tahun. Mengingat bahwa kecelakaan dapat terjadi selama panen, hal ini mendorong para petani untuk mencari cara untuk menutupi asuransi</p>

	<p>kesehatan bagi para pemanen yang secara teratur bekerja untuk mereka.</p> <p>Ketika kecelakaan terjadi, banyak petani hanya mampu membayar sebagian dari tagihan medis yang dikeluarkan oleh pemanen yang terluka. Akibatnya, para pemanen ini harus membayar biaya pengobatan yang tersisa sementara petani kehilangan produksi yang berharga. Dengan membayar sedikit biaya untuk BPJS, petani dapat memberikan perlindungan medis kepada pekerjaannya dengan tetap mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi.</p>
	<p>Dari Sumatera Selatan, Koperasi Pemura telah membangun pesantren bernama Al-Istiqomah yang mulai beroperasi pada awal 2020. Dari seratus santri yang belajar di pesantren saat ini, 27 di antaranya tinggal di asrama, dan semuanya adalah anak-anak dari desa setempat.</p> <p>Responden yang mewakili Koperasi Pemura mengatakan, pesantren Al-Istiqomah dilengkapi dengan ruang kelas serta kamar tidur, aula, dan dapur umum, sementara staf di pesantren terdiri dari lima guru, juru masak, dan tenaga administrasi. Yayasan yang menjalankan pesantren telah disahkan dan beroperasi penuh, tambahna.</p> <p>Al-Istiqomah siap karena warga Pemura sangat setuju untuk membangun sekolah sebagai kontribusi untuk desa, tegasnya lagi. “pekebun menjadi sadar akan praktik berkelanjutan dalam budidaya kelapa sawit, menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Kita hidup dari alam; mata pencaharian kita bergantung pada alam, jadi penting juga untuk mewarisi alam dalam kondisi yang baik dan mewariskannya kepada generasi berikutnya, anak-anak kita. Sedangkan mendidik anak juga merupakan upaya mempersiapkan generasi penerus.”</p> <p>Dari provinsi yang sama, KUD Mekar Sari memberikan perhatian khusus terhadap generasi muda di desa mereka dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan serta olahraga bagi remaja. Perwakilan KUD mengatakan mereka mendukung anak-anak di desa melalui program beasiswa bagi siswa berprestasi di taman kanak-kanak dan sekolah dasar desa. Senada dengan itu, untuk mendukung generasi muda, KUD Mekar Sari telah membantu sekolah sepak bola, SSB Mandala, sebagai bagian dari partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>Di Seruyan, Kalimantan Tengah, Koperasi Sawit Bangkit telah memberikan beasiswa senilai 20 juta rupiah untuk 80 siswa berprestasi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berdomisili di sekitar desa mereka. Bantuan beasiswa ini berasal dari dana insentif minyak sawit berkelanjutan yang diterima oleh pihak koperasi.</p>

	<p>Di Jambi, APBML pada bulan Oktober lalu telah menyediakan anggaran sebesar 73 juta rupiah untuk beasiswa yang diberikan kepada 120 anak petani yang menjadi anggota APBML. Bagi APBML pendidikan anak anggota menjadi perhatian khusus. Karena disekitar mereka banyak anak – anak yang putus sekolah. Selain itu <i>mindset</i> kebanyakan petani disini belum begitu mementingkan Pendidikan karena merasa cukup dengan berkebun kelapa sawit. APBML perlahan berusaha merubah <i>mindset</i> dengan memberikan beasiswa kepada anak anggota. Sehingga mereka merasa terbantu dan anak-anaknya dapat lanjut sekolah.</p>
	<p>Dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama pada tujuan nomor lima yaitu kesetaraan gender dalam industri kelapa sawit, Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Amanah yang berada di Riau melibatkan perempuan dalam salah satu kegiatan penting dalam perkebunan kelapa sawit yaitu dalam tahap penyemprotan. Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Amanah yang diketuai oleh H. Narno memiliki kelompok penyemprot kelapa sawit yang beranggotakan 12-13 orang perempuan yang merupakan istri dari pekebun sawit dan anggota dari asosiasi. Kelompok perempuan penyemprot bekerja 6 hari dalam satu minggu Setiap hari kelompok perempuan tersebut harus bekerja selama 5 jam per hari untuk menyemprot seluruh kebun kelapa sawit milik anggota Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Amanah seluas 1.048 ha. Kelompok perempuan tersebut direkrut dengan menggunakan sistem upah bulanan seperti karyawan/staff pengelola asosiasi.</p> <p>Kegiatan menyemprot tanaman kelapa sawit memiliki risiko yang besar karena para anggota harus berhadapan dengan racun yang terkandung dalam cairan pestisida misalnya pada saat penyemprotan tidak memperhatikan arah angin sehingga cairan semprot mengenai tubuhnya atau tanpa disadari bahan kimia beracun masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, didukung dengan adanya sertifikasi RSPO, keamanan dan keselamatan pekerja termasuk perempuan.</p> <p>Asosiasi memiliki SOP keselamatan kerja saat melakukan penyemprotan seperti wajib menggunakan APD, masker, kacamata, dan sepatu boot. SOP tersebut wajib diikuti oleh seluruh anggota kelompok dan diawasi oleh tim pengawas yang sengaja dibentuk oleh asosiasi untuk mengawasi kepatuhan dalam menjalankan SOP yang telah ditentukan. Selain SOP keselamatan kerja, asosiasi juga menyediakan asuransi dan fasilitas kesehatan seperti BPJS, <i>medical checkup</i> rutin untuk para</p>

	<p>anggota dan menyediakan makanan sehat untuk para anggota. Selain itu asosiasi juga menyediakan tempat khusus untuk mandi, dan mencuci APD yang digunakan untuk menyemprot agar kandungan racun yang menempel pada baju yang digunakan tidak terbawa hingga ke rumah.</p> <p>Sertifikasi RSPO mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan peluang yang sama kepada perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Diimbangi dengan adanya SOP keselamatan kerja, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana yang mendukung membuat perempuan dapat bekerja dengan lebih aman dan berkontribusi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>
 <p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p>	<p>Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan seluruh responden, mereka menganggap sertifikasi RSPO kurang relevan untuk dikaitkan ke TPB No. 6. Hal ini dikarenakan menurut mereka sebelum sertifikasi berlangsung, mereka sudah mampu mengakses sarana air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, mulai dari air sungai hingga air sumur, bahkan untuk beberapa wilayah sendiri, sarana air bersih sudah terakomodasi oleh keberadaan PAM daerah setempat.</p>
 <p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>	<p>Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan seluruh responden, mereka menganggap sertifikasi RSPO kurang relevan untuk dikaitkan ke TPB No. 7. Hal ini dikarenakan menurut mereka sebelum sertifikasi berlangsung, mereka sudah mampu mengakses sumber energi listrik karena terakomodasi oleh keberadaan PLN di sekitar wilayah mereka.</p>
 <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	<p>Dengan menerapkan prinsip-prinsip RSPO, anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri telah memberikan pengetahuan kepada para anggotanya terkait cara bekerja yang lebih baik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, hal ini menyebabkan adanya penghematan biaya karena efisiensi yang cukup besar. Saat ini, proses pemupukan telah dilakukan melalui metode yang jauh lebih baik dengan menggunakan dosis dan ukuran yang tepat. Ketika tiba saatnya untuk memproduksi, para petani menghasilkan minyak sawit baik dalam jumlah mau pun kualitas yang lebih baik.</p> <p>Selain itu, petani kecil mulai mempraktikkan langkah-langkah keselamatan secara lebih konsisten, seperti mengenakan sepatu bot dan helm jika diperlukan. Berkat inisiatif tersebut, petani lain di luar kelompok mereka mulai menerapkan metode yang sama yang diajarkan kepada anggota kelompok. Misalnya, non-anggota telah menerapkan</p>

	<p>teknik yang cocok untuk tingkat kemiringan yang berbeda, sehingga mencegah erosi di daerah tersebut.</p> <p>Dari BUMDES Karya Mandala Makmur, anggota kelompok mendapatkan pengetahuan untuk menanam tanaman lain dengan sistem tumpang sari di lahan mereka. Salah satu manfaat dari tumpang sari adalah menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki akses ke tanah dan menjadi sumber pendapatan tambahan, karena tanaman akan meningkatkan kualitas tanah di perkebunan.</p>
 <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>	<p>Di Provinsi Jambi, Ketua KUD Marga Jaya, Taufik Hidayat mengatakan, sertifikasi tersebut telah memungkinkan pekebun kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam peningkatan akses jalan pedesaan utama di daerah tersebut. “Sebagian dana dari penjualan kredit telah dialokasikan untuk meningkatkan akses jalan di desa yang menghubungkan ke pabrik kelapa sawit terdekat.”</p> <p>Ia melanjutkan, ini merupakan dedikasi untuk meningkatkan salah satu fasilitas sosial masyarakat setempat, dimana transportasi kendaraan menjadi lebih mudah karena tanah dipadatkan dengan material seperti kerikil atau batu pecah. “Kondisi baru ini memungkinkan lewatnya kendaraan dengan aman dan cepat untuk membawa hasil panen ke pabrik. Akses ini juga berguna untuk keperluan lain seperti pengangkutan pupuk dan lain-lain.”</p> <p>Ditambahkannya, kontribusi terhadap infrastruktur sosial hanyalah contoh dari apa yang bisa Koperasi berikan kepada masyarakat secara umum. Dikatakannya, juga sudah ada alokasi untuk penguatan unit credit union di Koperasi. “Kami berharap unit credit union dapat menjadi tempat yang benar-benar aman untuk menabung dan mendapatkan pinjaman serta memberikan layanan yang lebih baik; dengan rangkaian fasilitas yang lebih luas, termasuk pendidikan keuangan dan penjangkauan kepada anggota.”</p>
 <p>10 REDUCED INEQUALITIES</p>	<p>Dari KUD Karya Mulya, yang terdapat di Sumatera Selatan, terdapat program sosial yang rutin dilakukan oleh pengurus KUD, misalnya pada saat menjelang Idul Fitri ketika program sosial diluncurkan dan didedikasikan untuk membantu orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan oleh pengurus KUD untuk berkontribusi dalam program peningkatan kesejahteraan pedesaan ini tidak terlepas dari keberhasilan Koperasi mendapatkan Sertifikasi RSPO.</p> <p>Sementara itu, pada KUD Tani Subur di Kalimantan Tengah, terdapat dana sosial yang disisihkan dari kredit RSPO anggotanya untuk mendukung pengembangan beberapa aspek yang terdapat di wilayah mereka, seperti pendidikan (sumbangan bagi PAUD sampai SMP),</p>

	<p>kesehatan terutama kelompok lanjut usia, dan pembangunan daerah setempat (seperti pembangunan jalan yang rusak).</p>
 <p>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</p>	<p>Di Provinsi Jambi, Ketua KUD Marga Jaya, Taufik Hidayat mengatakan, sertifikasi tersebut telah memungkinkan pekebun kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam peningkatan akses jalan pedesaan utama di daerah tersebut. “Sebagian dana dari penjualan kredit telah dialokasikan untuk meningkatkan akses jalan di desa yang menghubungkan ke pabrik kelapa sawit terdekat.”</p> <p>Ia melanjutkan, ini merupakan dedikasi untuk meningkatkan salah satu fasilitas sosial masyarakat setempat, dimana transportasi kendaraan menjadi lebih mudah karena tanah dipadatkan dengan material seperti kerikil atau batu pecah. “Kondisi baru ini memungkinkan lewatnya kendaraan dengan aman dan cepat untuk membawa hasil panen ke pabrik. Akses ini juga berguna untuk keperluan lain seperti pengangkutan pupuk dan lain-lain.”</p> <p>Ditambahkannya, kontribusi terhadap infrastruktur sosial hanyalah contoh dari apa yang bisa Koperasi berikan kepada masyarakat secara umum. Dikatakannya, juga sudah ada alokasi untuk penguatan unit credit union di Koperasi. “Kami berharap unit credit union dapat menjadi tempat yang benar-benar aman untuk menabung dan mendapatkan pinjaman serta memberikan layanan yang lebih baik; dengan rangkaian fasilitas yang lebih luas, termasuk pendidikan keuangan dan penjangkauan kepada anggota.”</p>
 <p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p>	<p>Sebelum adanya sertifikasi sawit RSPO, para pekebun sawit tidak mengelola sampah kegiatan perkebunannya dengan baik. Biasanya mereka akan meninggalkan sampah plastik bekas tempat pupuk dan sampah makanan di kebun begitu saja, selain itu banyak juga pekebun yang mengubur sampah plastik begitu saja di perkebunan atau membakar sampah yang ada. Setelah adanya sertifikasi RSPO, pengelolaan sampah perkebunan sudah diatur dalam SOP di beberapa kelompok seperti UD Lestari dan Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Mandiri.</p> <p>SOP yang diterapkan dalam mendukung pengelolaan sampah adalah seperti SOP pembuangan limbah yang tidak diperbolehkan untuk membakar sampah di area kebun. Selain itu kelompok juga memfasilitasi pekebun untuk pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan dengan cara membuat kelompok yang bertugas untuk mengumpulkan sampah. Setelah itu sampah akan dikumpulkan dan dipilah kembali, untuk sampah plastik yang dapat didaur ulang biasanya akan disetorkan ke pengepul sampah untuk diolah kembali dan sisanya akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).</p>

13 CLIMATE ACTION



Dalam wawancara dengan responden, mereka menegaskan bahwa pada mulanya mereka tidak memiliki catatan penggunaan pestisida tiap melakukan penyemprotan di kebun, setelah dibentuk kelompok, pendamping menyediakan buku panduan dan buku catatan (Buku Pintar) untuk mencatat penggunaan pestisida oleh anggota pekebun. Pada konteks pengelola Kelompok PCPH, mereka telah memberikan catatan data penggunaan pestisida oleh pekebun anggota periode 2019/2020, namun catatan penggunaan pestisida tidak termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50-nya, luas area yang dirawat, jumlah bahan aktif diterapkan per ha dan jumlah aplikasi.

ICS PCPH dan Group Manager melakukan sosialisasi kepada anggota untuk membuat catatan penggunaan pestisida secara berkala, dan memastikan catatan/dokumentasi tersebut rapi dalam buku catatan (Buku Pintar) yang disediakan oleh PCPH. Sosialisasi dilakukan pada 27 Agustus - 1 September 2020. Buku catatan juga telah diberikan oleh ICS PCPH kepada kurang lebih 200 anggota baru dan sekitar 20 orang diberikan bentuk catatan penggunaan pestisida. Bukti sosialisasi dan penyediaan buku catatan anggota dapat ditunjukkan saat verifikasi. Bukti catatan aplikasi pestisida oleh anggota pekebun kecil dapat ditunjukkan selama audit.

Monitoring pencatatan pestisida dilakukan oleh unit monitoring ICS. Pemantauan dilakukan setelah setiap kegiatan penyemprotan pestisida dilakukan oleh anggota dan dengan pemantauan pengumpulan pestisida di KUD Budi Sari dan kunjungan lapangan langsung oleh ketua kelompok tani. Catatan pemantauan tersedia di kantor ICS dan terpelihara dengan baik. Ketika audit rekapitulasi berlangsung, penggunaan pestisida oleh anggota pekebun dapat ditunjukkan oleh mereka.

15 LIFE ON LAND



Kebun kelapa sawit milik anggota Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Amanah di Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau rata-rata terletak jauh dari kawasan hutan. Untuk sampai ke Kawasan hutan terdekat dari perkebunan sawit masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 50km. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak Pak Suparjo melakukan migrasi ke Provinsi Riau, "Sejak saya datang sudah tidak ada hutan di sekitar sini, isinya sudah sawit semua. Jadi kalau mau buka lahan, mau buka lahan yang mana wong sudah tidak lada lahan". Kondisi tersebut yang membuat pekebun kelapa sawit terutama anggota asosiasi tidak lagi membuka lahan untuk menanam kelapa sawit. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh asosiasi untuk turut mendukung TPB adalah dengan melakukan penanaman hutan di sepanjang sungai.

	<p>Penanaman pohon di sepadan sungai dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor pada saat musim hujan dan media penyimpanan air pada saat musim kemarau. Oleh karena itu Pohon Pulai dipilih sebagai tumbuhan yang ditanam di sepadan sungai karena memiliki akar tunjang yang bersifat lebih kuat untuk mencengkeram tanah dan lebih banyak menyimpan air tanah daripada sifat akar yang lain. Hingga sekarang, asosiasi telah menanam pohon sepanjang 4,5km dari rencana total sepanjang 7km.</p>
	<p>Manfaat penerapan standar berkelanjutan tidak hanya keuntungan finansial dari hasil panen yang lebih baik dan penjualan kredit RSPO tetapi juga kesadaran bahwa dokumen atau legalitas lahan merupakan modal penting bagi petani. Di APSKS Tayo Barokah, sebelum terdapat sertifikasi tidak ada desakan untuk mendapatkan legalitas tanah yang lebih tinggi. Kebanyakan petani senang hanya untuk memiliki Surat Keterangan Tanah (surat dari kepala desa) dan bahkan tidak tahu bahwa mereka bisa dan perlu mendapatkan legalitas yang lebih tinggi.</p> <p>Manfaat yang paling utama, menurut responden, adalah peningkatan kapasitas petani untuk menjalankan sistem pengendalian internal. Asosiasi juga berfokus pada kapasitas petani perempuan. Pada kelompok tersebut, perempuan telah memainkan peran penting dalam Asosiasi. Beberapa posisi kunci dalam sistem pengendalian internal dipegang oleh perempuan antara lain bendahara, penanggung jawab pelatihan keselamatan, penyuluhan, dan pendaftaran,.</p>

Bab 4. Dampak Sertifikasi RSPO terhadap TPB Tingkat Desa

Dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas, kelompok pekebun bukan sekedar merupakan kelompok yang bekerja dan berada secara mandiri. Kelompok pekebun merupakan bagian dari kesatuan administratif dan kesatuan sosial dalam suatu desa. Ke dalam, capaian-capaian dari sertifikasi dirasakan oleh para anggota. Tapi di luar kelompok, adanya perubahan praktik dan perilaku di tingkat kelompok mempunyai dampak terhadap kelompok sosial yang lebih besar di tingkat desa.

Pengamatan mengenai dampak sertifikasi RSPO terhadap kontribusi TPB tingkat desa dilakukan dengan pertama-tama memperkirakan potensi dampak dari apa yang dilakukan di tingkat kelompok ke tingkat desa. Indikator pertama untuk melihat hal ini ialah dari proporsi dari pekebun dan keluarganya terhadap total penduduk di desa, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan kemungkinan pengaruh ini, analisis yang dilakukan ialah terhadap dampak yang diamati dari sertifikasi RSPO. Tentunya tidak semua dampak terangkat secara otomatis dari tingkat kelompok ke tingkat desa. Dari hasil studi yang sudah dilakukan, kami melakukan pembagian dampak yang dirasakan oleh desa terhadap keberadaan sertifikasi RSPO, yakni berdampak langsung, tidak langsung, dan tidak memiliki dampak.

- Aspek dampak langsung antara sertifikasi RSPO dengan TPB tingkat desa adalah dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik anggota koperasi/perkumpulan maupun non-anggota. Dampak ini secara langsung dirasakan pada tingkat desa, bukan terbatas pada tingkat kelompok semata.
- Aspek dampak tidak langsung adalah dampak yang secara langsung hanya dirasakan oleh anggota koperasi/perkumpulan yang merupakan bagian dari masyarakat desa. Namun adanya dampak tersebut dirasakan juga oleh masyarakat seluruh desa, bukan terbatas dalam lingkup kelompok saja.
- Selain aspek yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung tersebut, ada juga aspek yang tidak mempunyai dampak terhadap kehidupan desa. Aspek ini terbatas dirasakan dampaknya pada tingkat individu dan tidak meluas ke strata sosial selanjutnya. Dan terakhir adalah aspek tidak memiliki dampak karena poin TPB tersebut sudah tercakup oleh pemerintah/swasta sebelum diadakannya sertifikasi RSPO.

Analisis apakah dampak teridentifikasi di tingkat kelompok akan berpengaruh pada dampak di tingkat desa dilakukan berdasarkan jawaban responden terhadap apakah dampak yang mereka rasakan di tingkat kelompok akan mempunyai dampak di tingkat desa. Namun demikian, jawaban responden ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi apakah dampak tersebut sifatnya langsung, tidak langsung atau tidak ada dampak. Untuk setiap TPB, dampak itu diidentifikasi seperti tertera pada Tabel 2.

Dampak-dampak yang diamati, baik itu langsung atau tidak langsung atau tidak ada dampak kemudian ditabulasi seperti dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Proporsi Kelompok terhadap Populasi Desa

Kelompok/Desa	Lokasi	Jumlah Anggota	Jumlah Penduduk Desa	Persen Anggota terhadap Penduduk Desa	Rata-rata Banyaknya Anggota Keluarga*	Jumlah Anggota Keluarga	Persen Keluarga Pekebun terhadap Penduduk Desa
KUD Sawit Jaya (Desa Suka Maju)	Seruyan, Kalimantan Tengah	332	1298	25,57%	3.55	1178.6	90.80%
KUD Tani Subur (Desa Pangkalan Tiga)	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	707	3187	22,18%	3.82	2700.74	84.74%
KSU Marga Indah (Desa Marga Mulia)	Kutai Timur, Kalimantan Timur	169	5080	3,32%	3.92	662.48	13.04%
KSU Pantun Sejahtera (Desa Sri Pantun)	Kutai Timur, Kalimantan Timur	131	1047	12,51%	3.92	513.52	49.05%
Perkumpulan Cahaya Putra Harapan (Desa Karya Mukti)	Muaro Jambi, Jambi	406	3765	48,97%	4.01	1628.06	43.24%
KUD Pemura (Desa Bina Karya)	Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan	188	2231	8,42%	3.95	742.6	33.29%
Koperasi Sawit Bangkit (Desa Sukorejo)	Seruyan, Kalimantan Tengah	326	1620	20,12%	3.86	1258.36	77.68%
KUD Tuhu Asih (Desa Setia Marga)	Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan	237	3659	6,48%	3.95	936.15	25.58%
KSU Makarti (Desa Sidomulyo)	Kutai Timur, Kalimantan Timur	172	2254	7,63%	3.92	674.24	29.91%

KUD Mitra Bersama (Desa Makarti Jaya)	Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan	30	1653	1,81%	4.16	124.8	7.55%
Forum Pekebun Sawit Swadaya Semarak Mudo (Desa Tandun)	Rokan Hulu, Riau	294	7796	3,77%	4	1176	15.08%
Asosiasi Pekebun Swadaya Sawit Pelalawan Siak (Desa Sei Kijang)	Pelalawan, Riau	367	5283	6,95%	4	1468	27.79%
PPKS Beringin Jaya (Desa Koto Ringin)	Siak, Riau	209	1774	11,78%	4	836	47.13%
Koperasi Konsumen Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera (Desa Tebing Tinggi)	Labuhanbatu, Sumatera Utara	239	1794	13,32%	4.44	1061.16	59.15%
APSKS Tayo Barokah (Desa Dayo & Desa Tapung Jaya)	Rokan Hulu, Riau	150	7128	2,1%	4	600	8.42%
Forum Pekebun Swadaya Merlung Renah Mendalu (Desa Pulau Pauh)	Tanjung Jabung Barat, Jambi	318	4949	25,98%	3.99	1268.82	25.64%
Asosiasi Pekebun Berkah Mandah Lestari (Desa Taman Raja)	Tanjung Jabung Barat, Jambi	290	2327	12,46%	3.99	1157.1	49.72%

Gapoktan Tanjung Sehati (Desa Mekar Jaya)	Merangin, Jambi	412	4651	18,31%	3.96	1631.52	35,07%
Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya (Desa Nagori Boluk)	Simalungun, Sumatera Utara	271	3280	8,26%	3.93	1065.03	32.47%
Koperasi Produsen Gaharu Seratus Bosar Maligas (Kecamatan Bosar Maligas)	Simalungun Sumatera Utara	406	3585	11,32%	3.93	1595.58	44.51%
UD Lestari (Desa Simpang Kopi)	Batu Bara, Sumatera Utara	980	35094	85,14%	4.37	4282.6	12.20%
Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri (Desa Sungai Buluh)	Kuantan Singingi, Riau	86	5094	1,69	4	344	6.75%
Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Amanah (Desa Trimulya Jaya)	Pelalawan, Riau	501	4071	31,35%	4	2004	49.23%
KUD Karya Mulya (Desa Bumi Makmur)	Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan	110	4498	2,45%	3.95	434.5	9.66%
KUD Mekar Sari (Desa Mekar Sari)	Musi Rawas, Sumatera Selatan	171	1956	8,74%	3.95	675.45	34.53%
KUD Permai Jaya (Desa Kencana Sari)	Lahat, Sumatera Selatan	125	1401	8,92%	3.95	493.75	35.24%

KUD Damai (Desa Sukaharjo)	Lahat, Sumatera Selatan	104	931	11,17%	3.95	410.8	44.12%
KUD Karya Lestari (Desa Karya Mulya)	Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan	164	1610	10,19%	3.95	647.8	40.24%
KUD Makarti (Desa Sidomukti)	Muaro Jambi, Jambi	179	1283	57,37%	4.01	717.79	55.95%
KUD Marga Jaya (Desa Petaling Jaya)	Muaro Jambi, Jambi	303	2611	35,31%	4.01	1215.03	46.54%
KUD Teratai Biru (Desa Peninggalan)	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	157	4963	3,16%	4.1	643.7	12.97%
Koperasi Rimba Harapan (Desa Merarai Satu)	Sintang, Kalimantan Barat	74	3313	2,23%	5	370	11.17%
BUMDES Karya Mandala Makmur (Desa Lada Mandala Jaya)	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	214	2868	7,46%	3.82	817.48	28.50%
Koperasi Mulia Bakti (Desa Banjar Sari)	Banyuasin, Sumatera Selatan	94	825	11,39%	4.08	383.52	46.49%

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa di tingkat desa, para pekebun sawit merupakan populasi yang cukup signifikan. Hal ini bisa dipahami karena perkebunan kelapa sawit merupakan penghidupan utama bagi banyak desa yang sudah mengalami ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Lokasi kelompok-kelompok yang diwawancarai berada di Sumatera dan Kalimantan di mana kelapa sawit sudah merupakan mata pencaharian umum dan dominan.

Secara jumlah anggota koperasi atau gapoktan, persentase terhadap penduduk desa tidak terlalu tinggi. Namun demikian, keanggotaan koperasi biasanya mewakili satu KK. Persentase dari anggota koperasi atau gapoktan terhadap desa didekati dengan menghitung perkiraan jumlah anggota keluarga dari para anggota koperasi. Perkiraan jumlah anggota ini menggunakan data dari BPS terkait rata-rata banyaknya anggota keluarga yang ada datanya untuk setiap kecamatan.

Tabel 2. Potensi Dampak Kelompok Dirasakan di Tingkat Desa untuk Setiap TPB

No	TPB	Potensi Dampak Tingkat Desa
1.	Tanpa Kemiskinan	Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 22 kelompok yang berpendapat bahwa sertifikasi RSPO berdampak tidak langsung terhadap pengurangan kemiskinan di desa mereka. Pendapat ini dilatarbelakangi bahwa peningkatan pendapatan fokusnya baru sebatas yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok. Sementara itu, terdapat 12 kelompok merasa tidak ada dampak yang signifikan dari adanya sertifikasi RSPO terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, indikasi adanya pengurangan kemiskinan di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat desa.
2.	Tanpa Kelaparan	Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 22 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO berdampak tidak langsung terhadap pengurangan kelaparan di desa mereka. Indikasinya ialah adanya peningkatan jumlah pengeluaran bahan pangan dan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan pertanian non-sawit/peternakan yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok. Sementara itu, terdapat 12 kelompok merasa tidak ada dampak yang signifikan dari adanya sertifikasi RSPO. Oleh karena itu, indikasi adanya pengurangan kelaparan di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap pengurangan kelaparan di tingkat desa
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 24 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO berdampak tidak langsung terhadap terciptanya kehidupan sehat dan sejahtera di desa mereka. Dampak ini dirasakan dengan adanya peningkatan akses fasilitas kesehatan dan layanan asuransi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok. Sementara itu, terdapat 10 kelompok merasa tidak ada dampak yang signifikan dari adanya sertifikasi RSPO. Oleh karena itu, indikasi adanya peningkatan kehidupan sehat dan sejahtera di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap terciptanya kehidupan sehat dan sejahtera di tingkat desa
4.	Pendidikan Berkualitas	Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 29 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO berdampak langsung terhadap tersedianya pendidikan berkualitas di desa mereka. Dampak terhadap pendidikan berkualitas ini ialah melalui adanya penambahan sarana pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta akses keterampilan yang sama. Hanya terdapat

		<p>5 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO berdampak tidak langsung di desa mereka, melalui akses keterampilan yang sama bagi anggota kelompok.</p> <p>Oleh karena itu, indikasi adanya kontribusi terhadap pendidikan berkualitas di tingkat kelompok berdampak langsung terhadap peningkatan pendidikan berkualitas di tingkat desa</p>
5.	Kesetaraan gender	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, seluruh kelompok merasa sertifikasi RSPO berdampak tidak langsung terhadap terciptanya kesetaraan gender di desa mereka, melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang diterapkan di dalam kelompok.</p> <p>Oleh karena itu, indikasi adanya kesetaraan gender di tingkat kelompok berdampak langsung terhadap terciptanya peningkatan kesetaraan gender di tingkat desa</p>
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 30 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO tidak memberikan dampak terhadap TPB 6 di desa mereka, hal ini dikarenakan sebelum adanya sertifikasi, masyarakat sudah mampu mengakses sumber air seperti air sumur dan PAM. Hanya terdapat 4 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung di desa mereka, melalui adanya peralihan sumber air bersih di anggota kelompok pasca melakukan sertifikasi.</p> <p>Oleh karena itu, indikasi adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di tingkat desa</p>
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, seluruh kelompok merasa sertifikasi RSPO tidak memberikan dampak terhadap TPB 7 di desa mereka, hal ini dikarenakan sebelum adanya sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.</p> <p>Oleh karena itu, tidak ada dampak terindikasi dalam pengadaan energi bersih dan terjangkau di tingkat kelompok dan tingkat desa.</p>
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, seluruh kelompok merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung terhadap tersedianya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di desa mereka, melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian bagi anggota kelompok.</p>

		Oleh karena itu, indikasi adanya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap peningkatan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa
9.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 32 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak langsung terhadap industri, inovasi dan infrastruktur di desa mereka. Dampak ini dirasakan melalui adanya peningkatan infrastruktur berupa fasilitas umum/fasilitas sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, selain itu terdapat pula kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan bagi anggota kelompok. Hanya terdapat 2 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung di desa mereka. Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan merupakan hal yang dirasakan oleh semua responden. Oleh karena itu, indikasi adanya industri, inovasi dan infrastruktur di tingkat kelompok berdampak langsung terhadap peningkatan industri, inovasi dan infrastruktur di tingkat desa
10.	Berkurangnya Kesenjangan	Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 29 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kesenjangan di desa mereka. Pengurangan kesenjangan ini dirasakan melalui berkurangnya penduduk miskin di desa mereka, serta terbukanya kesempatan kerja, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Hanya terdapat 5 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung di desa mereka. Oleh karena itu, indikasi adanya pengurangan kesenjangan di tingkat kelompok berdampak langsung terhadap pengurangan kesenjangan di tingkat desa
11.	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Dari 34 kelompok yang menjadi responden, terdapat 33 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan permukiman di desa mereka. Indikasi yang dirasakan ialah meningkatnya permukiman layak dan berkurangnya Kawasan kumuh di sekitar wilayah desa mereka. Selain itu, terdapat juga pengaruh pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan. Hanya terdapat 1 kelompok yang merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung di desa mereka. Oleh karena itu, indikasi adanya peningkatan permukiman di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap peningkatan permukiman di tingkat desa

12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, seluruh kelompok merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung terhadap terciptanya produksi berkelanjutan di desa mereka. Peningkatan produksi berkelanjutan ini terjadi melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok. Namun demikian peningkatan konsumsi berkelanjutan tidak dirasakan oleh para responden.</p> <p>Oleh karena itu, indikasi adanya produksi berkelanjutan di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap produksi berkelanjutan di tingkat desa</p>
13.	Penanganan Perubahan Iklim	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, seluruh kelompok merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung terhadap penanganan perubahan iklim di desa mereka, melalui pendirian MPA, adanya APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut yang dilakukan oleh anggota kelompok.</p> <p>Oleh karena itu, indikasi adanya peningkatan penanganan perubahan iklim di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap penanganan perubahan iklim di tingkat desa</p>
15.	Ekosistem Daratan	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, seluruh kelompok merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung terhadap TPB 15 di desa mereka, melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi yang dilakukan oleh anggota kelompok.</p> <p>Oleh karena itu, indikasi adanya perlindungan ekosistem daratan di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap perlindungan ekosistem daratan di tingkat desa</p>
16.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	<p>Dari 34 kelompok yang menjadi responden, seluruh kelompok merasa sertifikasi RSPO memberikan dampak tidak langsung terhadap TPB 16 di desa mereka, melalui pendirian lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.</p> <p>Oleh karena itu, indikasi adanya aktivitas untuk perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh di tingkat kelompok berdampak tidak langsung terhadap penciptaan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh di tingkat desa</p>

Tabel 3. Dampak Sertifikasi RSPO terhadap Kontribusi TPB Tingkat Desa

Keterangan **Berdampak Langsung** ○
 Berdampak Tidak Langsung △
 Tidak Berdampak X

Kelompok/Desa	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
KUD Sawit Jaya (Desa Suka Maju)	△	△	△	○	△	△	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
KUD Tani Subur (Desa Pangkalan Tiga)	△	△	X	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
KSU Marga Indah (Desa Marga Mulia)	△	X	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
KSU Pantun Sejahtera (Desa Sri Pantun)	X	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
Perkumpulan Cahaya Putra Harapan (Desa Karya Mukti)	X	X	△	○	△	X	X	△	○	△	△	△	△	△	△	
KUD Pemura (Desa Bina Karya)	△	X	X	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
Koperasi Sawit Bangkit (Desa Sukorejo)	△	△	X	○	△	△	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
KUD Tuhu Asih (Desa Setia Marga)	X	△	X	○	△	△	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
KSU Makarti (Desa Sidomulyo)	△	△	X	○	△	△	X	△	○	○	△	△	△	△	△	
KUD Mitra Bersama (Desa Makarti Jaya)	X	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△	

Forum Pekebun Sawit Swadaya Semarak Mudo (Desa Tandun)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	△	△	△	△	△	△
Asosiasi Pekebun Swadaya Sawit Pelalawan Siak (Desa Sei Kijang)	X	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
PPKS Beringin Jaya (Desa Koto Ringin)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Koperasi Konsumen Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera (Desa Tebing Tinggi)	X	X	X	△	△	X	X	△	△	△	△	△	△	△	△
APSKS Tayo Barokah (Desa Dayo & Desa Tapung Jaya)	X	X	△	△	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Forum Pekebun Swadaya Merlung Renah Mendalu (Desa Pulau Pauh)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Asosiasi Pekebun Berkah Mandah Lestari (Desa Taman Raja)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Gapoktan Tanjung Sehati (Desa Mekar Jaya)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya (Desa Nagori Boluk)	△	△	X	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Koperasi Produsen Gaharu Seratus Bosar Maligas (Kecamatan Bosar Maligas)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
UD Lestari (Desa Simpang Kopi)	X	X	X	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri (Desa Sungai Buluh)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Amanah (Desa Trimulya Jaya)	△	X	X	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
KUD Karya Mulya (Desa Bumi Makmur)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
KUD Mekar Sari (Desa Mekar Sari)	△	X	X	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△

KUD Permai Jaya (Desa Kencana Sari)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
KUD Damai (Desa Sukaharjo)	X	X	△	△	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
KUD Karya Lestari (Desa Karya Mulya)	X	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
KUD Makarti (Desa Sidomukti)	X	X	△	△	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
KUD Marga Jaya (Desa Petaling Jaya)	△	X	△	△	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
KUD Teratai Biru (Desa Peninggalan)	△	X	△	○	△	X	X	△	△	△	△	△	△	△	△
Koperasi Rimba Harapan (Desa Merarai Satu)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△
BUMDES Karya Mandala Makmur (Desa Lada Mandala Jaya)	X	△	△	○	△	X	X	△	○	△	△	△	△	△	△
Koperasi Mulia Bakti (Desa Banjar Sari)	△	△	△	○	△	X	X	△	○	○	△	△	△	△	△

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar TPB yang dirasakan di tingkat kelompok berdampak pada tingkat desa. Untuk sebagian TPB, ada yang dirasakan mempunyai dampak yang sifatnya langsung berkontribusi terhadap pencapaian TPB di tingkat desa. Namun demikian sebagian besar dampak dari TPB lebih dirasakan di tingkat kelompok. Pengaruh adanya dampak di tingkat kelompok terhadap dampak di tingkat desa memerlukan penelitian lebih lanjut.

Ada juga pada beberapa TPB yang indikasinya tidak ada dampak baik di tingkat kelompok maupun tingkat desa, walaupun ada perbaikan kondisi yang dirasakan secara riil oleh para responden. Hal ini karena dampak tersebut muncul lebih dari adanya program pembangunan dan perubahan di tingkat desa. Ada atau tidaknya sertifikasi tidak mempengaruhi program pembangunan dan perubahan yang diinisiasi dari tingkat desa tersebut.

Di sisi lain, dari dampak-dampak di tingkat desa ini terlihat bahwa peningkatan TPB merupakan upaya bersama berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Adanya sertifikasi RSPO memberikan dampak pertama-tama di tingkat kelompok, namun untuk menjadi dampak terhadap pencapaian TPB di tingkat desa dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan lain yang ada di desa tersebut. Adanya manfaat dari sertifikasi RSPO baik dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengorganisasian masyarakat maupun tersedianya modal tambahan melalui RSPO Credit memang terbatas pada kelompok. Namun demikian manfaat-manfaat ini bisa ditingkatkan menjadi manfaat di tingkat lebih luas dengan adanya peran dari berbagai pemangku kepentingan. Peran berbagai pemangku kepentingan ini dibahas pada bab berikut.

Bab 5. Meningkatkan Peran Stakeholders dalam Memperkuat Kontribusi Sertifikasi RSPO terhadap SDGs

Platform TPB dirumuskan dengan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pembangunan menuju 2030. Berbeda dengan MDGs (2000 – 2015) yang lebih mengutamakan peran pemerintah, TPB 2030 menuntut partisipasi bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat sesuai peran masing-masing stakeholder oleh karena itu, TPB tersebut harus diterjemahkan pada level nasional, sektoral, industri, daerah bahkan sampai level perusahaan dan setiap tahun dievaluasi sejauh mana pencapaian atau kontribusinya pada TPB setiap level.

Peranan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berkomitmen luas akan nilai-nilai berkelanjutan menjadikan para pelaku bisnis industri minyak sawit nasional juga terus membangun perkebunan kelapa sawit menjadi lebih maju dan berkelanjutan. Terlebih, berbagai perbaikan prinsip dan standar juga telah banyak dilakukan oleh RSPO.

Pengembangan perbaikan pengelolaan usaha minyak sawit, tak hanya persoalan bisnis semata, namun keberadaan industri minyak sawit telah menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Para pelaku dunia usaha juga memiliki tujuan bersama guna menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pada tingkat paling awal rantai pasok minyak sawit yaitu di tingkat pekebun swadaya sertifikasi RSPO telah berkontribusi terhadap SDG's dalam hal menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Pendidikan bermutu, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menjaga ekosistem dan, kemitraan untuk mencapai tujuan. Keseluruhan tujuan TPB ini berlaku untuk semua (universal) negara–negara baik negara maju, miskin, dan negara berkembang.

Berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam rantai pasok minyak sawit dan juga sektor lain yang mendukungnya memiliki peran dan perlu memberikan kontribusi mereka sendiri dalam menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai sebuah tindakan nyata. Tanggung jawab bersama adalah kesempatan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan untuk menunjukkan kepemimpinan yang berkelanjutan untuk mendukung SDG, agar inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Seruan Tanggung Jawab Bersama untuk memperkuat dampak minyak sawit berkelanjutan yang bersertifikat RSPO dalam mendukung SDG's harus dilakukan, karena tanggung jawab dalam melaksanakan prinsip berkelanjutan tidak hanya dipikul oleh sektor hulu namun juga oleh seluruh rantai pasok bisnis kelapa sawit dan sektor yang terlibat di dalamnya sehingga sertifikasi RSPO tidak hanya menunjukkan keberlanjutannya, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dari Sistem sertifikasi RSPO itu sendiri.

Pihak-pihak yang harus terlibat dimulai dari para pekebun swadaya, plasma, perusahaan perkebunan, perusahaan pengolah hingga konsumen akhir, LSM lingkungan dan sosial, bank dan investor, pengecer, pengolah dan pedagang, pemerhati lingkungan, para peneliti hingga media massa. Semua harus melakukan bagian mereka masing-masing untuk mencapai tujuan menjadikan praktik minyak sawit berkelanjutan benar-benar dilakukan di seluruh rantai pasokan hingga di tangan konsumen akhir. Konsep tanggung jawab bersama juga menyangkut tentang kepemimpinan berkelanjutan, serta bisnis yang bertanggung jawab.

Organisasi multi-stakeholder juga mengakui bahwa semua anggota bertanggung jawab untuk berbagi visi dan bahwa mereka masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam mentransformasikan pasar dan menjadikan prinsip keberlanjutan benar-benar dilakukan

5.1. Peningkatan Peran Para Pemangku Kepentingan

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan memiliki peranan penting dalam memasok dan memenuhi permintaan minyak nabati di tingkat global. Meskipun di 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19, tapi nilai ekspor produk kelapa sawit tetap menunjukkan angka positif di kisaran US\$22,97 miliar, atau tumbuh sebesar 13,6% dari 2019. Hal ini menunjukkan kontribusi kelapa sawit yang signifikan terhadap devisa negara untuk menjaga neraca perdagangan nasional tetap positif. (Kemeko Perekonomian RI, April 2021)

Produk minyak sawit dan turunannya telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri, mulai dari industri makanan, kecantikan, farmasi, hingga energi. Saat ini, luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,3 juta hektare, dengan melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja, dan menghasilkan produksi minyak sawit lebih dari 35 juta ton di 2020.

Industri kelapa sawit di Indonesia senantiasa dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek pilar pengarusutamaan dengan tujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat, serta menjaga lingkungan hidup sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berangkat dari konteks tersebut, maka Indonesia memiliki posisi strategis dalam menentukan arah industri kelapa sawit global ke depannya. Indonesia juga telah berkomitmen menghadirkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan, bukan hanya di tingkat nasional, namun juga di dunia internasional.

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengakselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Peraturan ini mewajibkan seluruh perusahaan dan pekebun sawit di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dijalankannya telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan,” kata Menko Airlangga Hartanto.

Sebelum adanya Perpres tersebut sudah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia.

Kerja sama dan kolaborasi dalam membangun kelapa sawit berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, mulai dari perusahaan hulu hingga hilir, hingga masyarakat. Kita di Indonesia pun tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari dunia internasional.

Maka itu, Pemerintah Indonesia terus menggalang kolaborasi multipihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperdalam pengetahuan tentang tata kelola kelapa sawit berkelanjutan. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua pihak dapat melaksanakan mandat peraturan yang sudah diterbitkan dengan baik.

Pendataan pekebun – STDB & legalitas lahan

Keterlibatan pemerintah dalam membuat program-program yang ditujukan untuk membangun perekonomian bagi para pekebun sudah dilakukan sejak lama, seperti penanaman kelapa hibrida dan coklat, namun banyak dari program-program tersebut yang tidak berjalan dengan lancar. Akan tetapi, pada tahun 2001 saat sawit masuk ke kalangan para pekebun peningkatan ekonomi sudah bisa mulai dirasakan.

Pada kenyataannya proses untuk mencapai suatu peningkatan ekonomi pekebun sawit tidak semudah yang dibayangkan. Mulanya pemerintah membuat program STDB-SPPL guna mendata para pekebun sawit yang ada, dalam program ini pekebun merasa kesulitan terkait hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan itu sendiri contohnya seperti wajib memiliki NPWP dan kewajiban-kewajiban lainnya. Selain itu banyak dari pekebun yang tidak memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup untuk menerapkan penanaman dan perawatan kelapa sawit yang baik sehingga menghambat produktivitas pada awal masa penanaman kelapa sawit.

Melihat adanya berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh pekebun sawit, RSPO menyelenggarakan program sertifikasi bagi para pekebun guna membangkitkan organisasi-organisasi di perkebunan. Program ini memberikan ruang belajar bersama bagi para pekebun dengan berbagai macam *benefit* yang diberikan, seperti mendapatkan harga premium dari penjualan RSPO dan dengan pemberian pupuk supaya produktivitas perkebunan semakin meningkat.

Permasalahan awal yang dihadapi oleh lembaga dalam proses penerapan program sertifikasi yaitu rendahnya kepedulian pekebun terhadap aspek legalitas. Banyak tanah pekebun merupakan hasil warisan yang tidak memiliki surat dan entitas yang jelas sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping untuk memperkenalkan sertifikasi. Pada praktiknya Pada kenyataannya dalam jangka panjang legalitas lahan berguna untuk menghindari konflik yang terkait dengan batas dan kepemilikan lahan. Rendahnya kepedulian para pekebun didasari oleh minimnya pengetahuan terhadap

pengelolaan lahan, sehingga dalam proses sertifikasi ini banyak sekali hal yang harus diterjemahkan. Tidak sedikit dari para pekebun yang menanyakan apa manfaat sertifikasi bagi pekebun dan banyak dari mereka yang belum berorientasi pada produksi. Permasalahan ini juga ditambah dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya, misalnya pekebun swadaya di Sumatera berbeda dengan pekebun Kalimantan, sehingga pola pendekatan dan pendampingan sangat mempengaruhi bagaimana para pekebun terbuka terhadap proses sertifikasi RSPO ini.

Proses pendekatan untuk membangun pola sawit yang berkelanjutan tidaklah instan. RSPO dari tahun 2004 sampai sekarang ini pertumbuhannya baru beberapa persen saja, sehingga tantangan yang dihadapi oleh pendamping masih sangat banyak. Bahkan peran pemerintah kurang terlihat, sehingga pihak yang lebih banyak berperan kepada pekebun adalah tokoh adat/agama, kelompok tani, pendamping, dan perusahaan. Hingga saat ini belum ada dukungan yang bersifat material/fisik dari pemerintah, namun hanya sebatas bantuan perizinan.

Tantangan terberat yang dihadapi oleh para pendamping adalah mengubah *mindset* para pekebun bahwa kelapa sawit merupakan produk yang penting dan tidak bisa dikonsumsi setiap hari, sehingga mereka membutuhkan pasar dengan standar tersendiri yang harus diikuti dan disesuaikan oleh para pekebun agar tidak terjebak ke dalam pasar konvensional.

Hal signifikan yang bisa dirasakan oleh para pekebun yaitu dari segi pendapatan. Contohnya sebagai dampak kontribusi RSPO yang pada mulanya pendapatan pekebun dimulai dari 1 ton per bulan atau 12 - 13 ton per tahun bisa naik menjadi 18-19 ton per tahun. Namun dampak yang dirasakan sebenarnya tergantung dari kondisi awal penanganannya, apabila penanganan dimulai dari 0 maka marginnya bisa tinggi. Akan tetapi jika pekebun sudah memiliki pengetahuan dan proses pendampingan hanya melengkapi maka naiknya margin tidak akan terlalu tinggi, kecuali bibit yang digunakan adalah bibit unggul maka marginnya bisa naik lebih tinggi.

Pengaruh dari meningkatnya sumber pendapatan pekebun bisa dilihat dari perubahan gaya hidup seperti rumah-rumah yang mulai dibangun secara permanen, banyak pekebun yang sudah bisa membeli motor dan mobil sendiri, juga menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tak hanya itu, lapangan pekerjaan juga semakin mudah untuk dicari dengan upah yang lumayan tinggi. Peningkatan gaya hidup ini selain bersumber dari peningkatan pendapatan hasil kebun pekebun juga karena peran besar koperasi sebagai salah satu syarat sertifikasi RSPO. Misalnya, kegiatan CSR yang memberikan bansos kepada orang yang tidak mampu, memberikan beasiswa, mengadakan kegiatan sosial, dan adanya dana perputaran ekonomi yang dapat membantu perbaikan-perbaikan jalan terutama untuk akses ke perkebunan. Dalam konteks perekonomian, selain dampak yang dirasakan oleh pekebun itu sendiri ternyata banyak pihak yang juga ikut merasakan dampaknya, seperti banyaknya pekebun yang mulai membentuk unit jualannya sendiri akan mempengaruhi penurunan margin tengkulak yang tidak mau kehilangan pelanggannya.

Pendampingan

Apa pun komoditasnya, ketika pendampingan ditujukan untuk produktivitas maka hal yang harus dikorbankan adalah aspek lingkungan yang menjadikan pendamping harus melakukan internalisasi pengetahuan kepada pekebun mengenai efek dari kerusakan lingkungan dan cara menjaganya. Sebelumnya masih banyak pekebun yang menggunakan herbisida, dalam 1 hektar bisa menghabiskan

hingga 5 liter cairan. Hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap kesuburan tanah sehingga salah satu materi pelatihan yaitu mengenai pentingnya perawatan lahan yang tidak melulu tentang herbisida/pestisida. Para pendamping tak luput untuk menyampaikan bahwa selandainya pekebun terus menyemprotkan herbisida, lahannya akan gersang, akan terjadi penguapan tinggi, mikroorganisme sulit berkembang bahkan punah yang akan mempengaruhi kesuburan tanah dan kualitas tumbuhan. Hasil dari pelatihan tersebut menjadikan banyak pekebun yang mengurangi penggunaan herbisida bahkan ada yang sampai meninggalkannya.

Tidak hanya pada tumbuhan perkebunan itu sendiri, penggunaan bahan kimia juga memberikan dampak pada lingkungan sekitar seperti menurunnya kualitas air sungai. Kondisi sungai-sungai yang ada di sekitar kawasan perkebunan dulunya sangat jernih, namun karena sudah banyak lahan yang dibuka menjadikan sungai jernih sulit untuk ditemukan. Salah satunya dikarenakan terdapat pekebun yang terlanjur menanam di sempadan sungai dan kawasan rentan lainnya, para pekebun harus tahu dan memahami bahwa tidak bisa mengaplikasikan bahan kimia di sempadan sungai.

Selain efek dari proses penanaman yang menggunakan bahan kimia, terganggunya ekosistem sungai juga dikarenakan oleh pola perilaku pekebun dan masyarakat sekitar. Permasalahan tersebut menjadikan para pendamping membentuk diskusi dengan masyarakat setempat untuk mengatasi penyelamatan sumber-sumber air dengan membuat lubang larangan. Kebijakan pun dibentuk, seperti perilaku meracuni dan menyetrum ikan dilarang dan akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu di bagian pinggir aliran sungai juga ditanami tanaman kayu kehutanan, disebar benih, dan dibuat lubang memancing. Para pendamping berusaha untuk mendorong pekebun agar mereka menjaga aset yang mereka miliki, dengan begitu secara tidak sadar mereka akan menjaga lingkungan di sekitarnya juga. Sehingga pola pendekatan yang diterapkan adalah memunculkan rasa kepedulian terhadap area tanam mereka terlebih dahulu kemudian baru ke lingkungan sekitar. Menurut pendamping, perubahan perilaku tidak bisa ditangani 100%, meskipun pendamping tidak pernah melakukan survei secara langsung namun menurutnya 50% perubahan perilaku masyarakat terutama terhadap lingkungan sudah bisa dibilang sangat baik.

Upaya mengubah perilaku pekebun terhadap lingkungan memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi, dalam modul pelatihan juga terdapat materi perbaikan gizi. Para pekebun diajarkan cara membuat kolam, menanam sayuran, dan sebagainya baik untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Dengan seperti itu para pendamping berharap pekebun akan terhindar dari zat-zat berbahaya dan hidup lebih sehat. Selain itu, para pendamping juga mengajak para pekebun untuk berpartisipasi di program BPJS ketenagakerjaan dengan iuran yang tidak begitu mahal sebagai nilai plus sehingga pola hidup pekebun dapat terbantu agar menjadi lebih baik. Akan tetapi perubahan perilaku khususnya dalam hal konsumsi ini persentasenya belum terlalu banyak, hal ini tergantung dari tingkat pendidikan para pekebun itu sendiri. Contoh kasus, agar pekebun dapat mengurangi biaya belanja sayuran dan bisa mendapat pemasukan tambahan dari berjualan sayuran maka Koperasi Sepakat Mekar Bersama menjual hasil panennya ke kantin Unilever, pasarnya sendiri sudah ada namun untuk mendorong ibu-ibu supaya mau menanam sayur itu cukup sulit.

Para pendamping sendiri melihat sulitnya mengubah pola perilaku para pekebun sebagai sebuah proses belajar, bukan sebagai kegagalan. Pola-pola insentif dinilai kurang efektif karena untuk mengubah perilaku harus murni dari kesadaran diri sendiri. Apabila diberlakukan embel-embel insentif khawatir dilaksanakan hanya karena ada insentif dan tidak terjadi keberlanjutan. Dalam

proses sertifikasi, lembaga tentu saja berusaha untuk membangun kesadaran kepada para pekebun untuk terus bergerak maju melalui pengetahuan sebab akibat yang diberikan oleh lembaga kepada para pekebun.

Perusahaan

Kemitraan yang telah terjalin antara perusahaan dan pekebun sawit harus lebih diperkuat guna menjaga keberlangsungan rantai pasok dan pasar yang stabil bagi pekebun swadaya.

Kemitraan yang sinergis antara korporasi dan pekebun bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan di tingkat pekebun dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan tata kelola manajemen sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pekebun dan perkebunan kelapa sawit.

Kemitraan merupakan elemen penting dalam industri sawit karena terkait aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan, kemitraan pekebun dengan perusahaan perkebunan sawit merupakan kunci dasar kekuatan dalam peningkatan daya saing.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bidang Urusan Organisasi Kacuk Sumarto mengatakan, rantai pasok industri sawit tidak bisa dipisahkan antara pekebun dan perusahaan. Jika ada hambatan dalam rantai pasok tersebut maka akan berdampak pada keberlangsungan industri sawit itu sendiri. "Pola kemitraan pekebun-perusahaan sawit harus sejalan dan satu visi, jangan sampai ada salah paham, ini bisa membahayakan industri sawit,"

Pemerintah telah mengatur pola kemitraan antara perusahaan dan pekebun sawit melalui Permentan No 1 Tahun 2018 mengenai pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit produksi pekebun yang disesuaikan ketentuan masing-masing provinsi setiap bulannya.

Kelembagaan pekebun harus bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dan Permentan tersebut berlaku bagi pekebun swadaya dan pekebun plasma. Kemitraan hendaknya berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, saling memerlukan, dan saling menguntungkan. Biasanya, perselisihan yang terjadi antara pekebun dan perusahaan adalah mengenai penentuan harga TBS maka dari itu perlu keterbukaan.

Usaha perkebunan sawit mempunyai karakteristik bisnis tertentu yaitu produk utama yang diperjualbelikan adalah minyak mentah, TBS memerlukan pengolahan segera pada PKS untuk menghasilkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak kernel (palm kernel oil/PKO).

Dengan situasi tersebut, aturan yang sudah dibuat pemerintah telah menciptakan sebuah kelembagaan kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang biasanya dimulai dari fase perancangan dan dikembangkan menjadi berbagai variasi sesuai perkembangan zaman.

Secara historis, pola kebijakan kemitraan perkebunan sawit dibagi tiga fase, yaitu inisiasi, implementasi, serta perluasan dan pengembangan pola kemitraan. kerja sama antara perusahaan dan pekebun harus berdasarkan asas persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan kemitraan. Pada dasarnya, kemitraan adalah kerja sama yang kuat antara usaha besar (perusahaan) dengan usaha kecil (pekebun). Upaya mendorong terwujudnya kemitraan yang hebat butuh peran pemerintah pusat dan daerah, juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas.

"Banyak pola kemitraan yang sudah dijalankan dalam industri sawit, yaitu pola PIR, perdagangan umum melalui jual beli TBS, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dan peremajaan sawit rakyat," kata Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan Achmad Mangga Barani.

Memproduksi kelapa sawit dengan sertifikasi merupakan hal penting bagi pekebun kecil sawit di Indonesia agar dapat memperluas pemasaran mereka, terutama setelah komoditas ini banyak disoroti berbagai pihak terkait isu deforestasi.

Pemerintah Indonesia kini juga sedang giat menggalakkan penggunaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk menjamin produksi berkelanjutan di industri sawit. Namun, kebanyakan pekebun masih menghadapi banyak kesulitan, baik administratif maupun pembiayaan, dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

Legalitas lahan menjadi salah satu kendala yang dimiliki pekebun kecil sawit, pasalnya kepemilikan bukti lahan tidak merata, padahal bukti ini menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan sertifikasi ISPO maupun Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Kesulitan lainnya adalah dalam mengorganisir pekebun, seperti ke dalam koperasi atau kelompok tani. pekebun kecil sawit cenderung lebih suka hidup dan bekerja secara mandiri, dan ini menyebabkan lemahnya tata kelola organisasi pekebun yang menjadi kriteria standar RSPO. Butuh dampingan aktif untuk menggerakkan tata kelola koperasi agar sesuai dengan prasyarat organisasi yang diminta standar sertifikasi RSPO.

Banyak pekebun kecil sawit juga belum mampu untuk memenuhi standar sertifikasi yang ada, terutama yang diterapkan RSPO. Tingkat mutu bahan maupun produksi yang diminta masih jauh dari apa yang dipakai sehari-hari oleh pekebun. Pada dasarnya masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pekebun swadaya yang menggunakan bibit di bawah standar karena tidak ada yang mendukung pembekalan mereka. Biaya juga menjadi kendala besar bagi pekebun kecil sawit, karena nominal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi tidak kecil karena banyaknya proses registrasi dan audit.

Investasi swasta dinilai mempunyai peran penting dalam membantu pekebun untuk meningkatkan kemampuan produksi yang berkelanjutan. Hadirnya perusahaan di sebuah daerah juga dapat menyeimbangkan kebutuhan konservasi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Perusahaan punya peran penting dalam memberikan *capacity building* bagi pekebun, terutama pekebun yang merupakan bagian dari rantai pasok mereka.

Menyadari pentingnya partisipasi pekebun kecil sawit setempat dalam proses produksi kelapa sawit, perusahaan harus secara aktif melibatkan pekebun kecil dalam rantai pasokannya untuk membantu meningkatkan hasil panen mereka dan kebijakan penanaman yang berkelanjutan.

Namun sering kali program baik yang dilakukan perusahaan juga memiliki kendala yang sebenarnya di luar kemampuan perusahaan, seperti kepemilikan lahan yang membutuhkan intervensi dari pemerintah dan pekebun sawit cenderung tidak mau dikelompokkan dengan orang yang tidak mereka kenal dalam suatu organisasi padahal kelembagaan menjadi syarat mutlak untuk memulai proses sertifikasi. Pengelompokan pekebun bisa memakan satu minggu hingga 10 bulan karena membutuhkan pendekatan pribadi untuk memahami kendala yang sebenarnya dihadapi pekebun

kecil sawit. Rasa saling percaya adalah faktor penting untuk menjalankan program kelembagaan bagi pekebun.

5.2. Peningkatan Peran RSPO

Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya, tidak bisa dipungkiri bahwa sertifikasi RSPO telah memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi keberlanjutan kualitas lingkungan secara umum, namun juga memberikan dampak yang positif bagi para pekebun kelapa sawit mandiri bersertifikasi RSPO di kawasan-kawasan pedesaan di seluruh Indonesia.

Menilik lebih jauh dampak positif yang diterima oleh para pekebun mandiri pemegang sertifikat RSPO, secara umum setidaknya bisa dikelompokkan ke dalam empat dampak positif, yaitu:

Pertama, sertifikasi RSPO memberikan pengetahuan kepada pekebun tentang teknik berkebun kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan. Seperti kita ketahui, pekebun kelapa sawit rakyat tidaklah berangkat dari titik awal yang sama. Sebagian pekebun berasal dari pekebun plasma yang setelah beberapa waktu berganti menjadi pekebun mandiri, sementara sebagian pekebun lainnya sejak awal memang telah menjadi pekebun mandiri.

pekebun mandiri yang berasal dari pekebun plasma secara teknis memiliki keunggulan pengetahuan bercocok tanam kelapa sawit yang lebih baik karena sejak awal sudah dilatih teknik berkebun kelapa sawit yang baik dan benar oleh perusahaan kelapa sawit yang menaungi mereka. Sementara pekebun yang sejak awal menjadi pekebun kelapa sawit mandiri tidak memiliki "kemewahan" tersebut, sehingga mereka bertani kelapa sawit secara tradisional dengan berbekal pengetahuan yang mereka punya. Itu semua bermuara pada tingkat produktivitas di mana pekebun yang berasal dari pekebun plasma memiliki tingkat produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan pekebun tradisional.

Sertifikasi RSPO mendorong pekebun memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya lewat serangkaian pendampingan baik oleh LSM, perusahaan kelapa sawit, maupun lewat organ-organ pemerintahan. Hal ini mutlak dilakukan karena sertifikasi RSPO tidak hanya mensyaratkan teknik bertani kelapa sawit yang baik, juga mensyaratkan teknik bertani kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan untuk dilakukan menjadi sebuah keharusan. Misalnya bagaimana melakukan pemupukan yang baik, pemberantasan hama dan gulma secara terukur dan terarah, penggunaan alat pelindung diri dengan baik dan benar, larangan penggunaan api untuk pembukaan lahan, pemilihan bibit yang baik, teknik menjaga kualitas kesuburan tanah perkebunan, dan lain sebagainya.

Kedua, sertifikasi RSPO mendorong pekebun untuk lebih memberikan perhatian pada aspek legal dari lahan yang digarapnya. Sebagian pekebun memperoleh lahan garapan untuk ditanami kelapa sawit dalam kaitan mereka sebagai transmigran. Sebagian lagi memperoleh lahan lewat cara membuka lahan hutan untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sebagian lagi memperoleh lahan lewat cara-cara lainnya. Semua lahan perkebunan tersebut haruslah dilindungi oleh dokumen-dokumen pertanahan yang sah agar status kepemilikan lahannya jelas dan menghindari terjadinya sengketa tanah.

Salah satu syarat dari sertifikasi RSPO adalah adanya kejelasan status kepemilikan atas lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit. Oleh karenanya menjadi penting untuk memastikan bahwa lahan perkebunan sawit memiliki legalitas yang memadai.

Di sisi lain, pengurusan legalitas atas lahan perkebunan sawit terkadang cukup menyulitkan. Setidaknya ada dua hal yang membuat pengurusan legalitas lahan sawit terkadang menjadi sulit untuk dilakukan. Pertama, lahan yang berada di kawasan perbatasan administratif. Di kawasan perkebunan di Jambi misalnya, ada bidang lahan kelapa sawit yang masih sulit diurus legalitasnya karena berada di daerah perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, kurang kooperatifnya perangkat pemerintahan di daerah yang mengurus legalitas perkebunan. Hal ini terkait dengan mentalitas lama di mana hal yang sebenarnya sulit, untuk apa dipermudah?:

Ketiga, sertifikasi RSPO memberikan tambahan pendapatan bagi pekebun untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian desa lewat insentif kredit sertifikasi RSPO yang jumlahnya cukup signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2020 sekitar 26 Kelompok pekebun Mandiri yang telah bersertifikat RSPO di Indonesia melalui FORTASBI berhasil mempromosikan credit sertifikasi RSPO milik pekebun Mandiri dengan jumlah transaksi mencapai 1.123.000 Juta US Dolar. Dana tersebut dinikmati oleh 26 Kelompok pekebun Mandiri dengan jumlah pekebun mencapai 5.886 pekebun Mandiri dengan luas lahan bersertifikat mencapai 13.226 Ha.

Dana itu adalah dana yang diterima oleh Kelompok pekebun Mandiri dari para pembeli produk minyak kelapa sawit, sebagai insentif usaha mereka dalam mengimplementasikan standar minyak sawit berkelanjutan dalam praktik kebunnya dan kelembagaannya. Jumlah itu memang tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah produksi TBS yang dihasilkan pekebun Mandiri yang mencapai 259.259 ton/tahun. karena jika dihitung, maka insentif yang diterima hanyalah sebesar 4,3 U\$/ton saja. Meskipun kecil, jumlah tersebut telah memberikan impact luar biasa bagi peningkatan perbaikan manajemen kelembagaan, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan keluarga pekebun anggota. Di salah satu kelompok pekebun Mandiri di Provinsi Jambi, menggunakan dana insentif itu untuk perlindungan sungai yang masuk dalam Kawasan Nilai Konservasi Tinggi. Sekitar 2000 Km sungai dilindungi sebagai zona perlindungan sejak tahun 2016. Perlindungan tersebut berdampak pada membaiknya kualitas hidup perempuan di sekitar desa, karena hampir setiap hari perempuan dan anak-anak memanfaatkan sungai untuk mandi dan cuci.

Tak hanya perlindungan lingkungan, dana insentif juga digunakan beberapa kelompok untuk mengembangkan usaha kelompok, seperti yang dilakukan oleh KUD Tani Subur di Kalimantan

Tengah, dana insentif yang diterima tersebut mereka gunakan untuk mengembangkan Wisata Agro di desa (kolam renang, pertanian untuk edukasi, dan wisata lainnya). Hingga kini tamu di Wisata Agro tersebut tidak pernah sepi pengunjung, dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Pangkalan Bun. Rata-rata pendapatan KUD dari wisata ini mencapai 2,3 Milyar/tahun.

APBML (Asosiasi pekebun Swadaya Berkah Mandah Lestari) yang beroperasi di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, provinsi Jambi memiliki program rutin yaitu program Beasiswa, untuk membantu anak-anak usia sekolah dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan agar anak-anak usia sekolah tetap dapat melanjutkan sekolahnya hingga selesai, karena di beberapa desa di sekitar, banyak sekali anak-anak usia sekolah tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi dan akses. Program Beasiswa ini menyediakan dana sekitar Rp 60 Juta per tahun untuk anak-anak dengan bagian Rp 500.000-1.000.000/tahun/orang anak. Ada sekitar 100 orang anak dengan usia sekolah yang dapat dijangkau oleh program ini. Dana ini adalah kontribusi dari dana insentif penjualan Kredit RSPO yang mereka terima tiap tahun. Rata-rata penerimaan APBML dari penjualan Kredit RSPO adalah mencapai 66.350 US\$/ tahun atau setara dengan Rp 962.000.000/tahun.

Di berbagai daerah lainnya, dana insentif digunakan untuk bermacam kebutuhan produktif yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan gedung pertemuan, maupun digunakan untuk membeli mobil ambulans.

Keempat, sertifikasi RSPO mengintegrasikan pekebun kecil ke dalam rantai pasokan minyak sawit dunia. Dengan memperoleh sertifikasi RSPO, pekebun swadaya memenuhi syarat untuk bergabung dengan platform perdagangan PalmTrace RSPO. Menjual di platform memungkinkan pekebun swadaya mendapatkan premium dari produksi kelapa sawit bersertifikat mereka. Karena produk yang diperdagangkan di PalmTrace sudah tersertifikasi sebagai kelapa sawit berkelanjutan, banyak perusahaan besar global menggunakan platform RSPO ini sebagai sumber pasokan. Transaksi terakhir oleh empat asosiasi pekebun ini melibatkan perusahaan global sebagai pembeli, yaitu Unilever, Nestlé, ACT Commodities, dan Waitrose Ltd.

Pembelian kredit RSPO sangat penting untuk mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat dan memastikan rantai pasokan yang berkelanjutan. Mengingat pekebun swadaya bergantung pada alam sekitarnya untuk mata pencaharian mereka, penting untuk mempromosikan budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bab 6. Kesimpulan

Sektor kelapa sawit hingga saat ini memiliki dua perspektif yang berbeda, yang pertama kelapa sawit dianggap berperan penting terhadap pembangunan nasional Indonesia, di sisi lain kelapa sawit membawa dampak negatif terutama bagi kondisi sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Perspektif yang cukup imbang datang dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki legitimasi yang kuat dan merupakan inisiatif multi pihak dari tingkat global yang melibatkan berbagi pemangku kepentingan untuk melihat dampak dari industri kelapa sawit itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan pelaksanaan langsung di bawah kepemimpinan Presiden yang menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam TPB untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Guna melihat sejauh mana capaian Indonesia dalam capaian TPB, di tingkat global terdapat sertifikasi yang memiliki tujuan untuk mempromosikan produksi, perdagangan dan penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan melalui Kerjasama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan yang dapat dilihat dari tingkat global sampai ke tingkat desa yaitu *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Akan tetapi RSPO sebagai rezim tertinggi dalam minyak sawit yang berkelanjutan masih dikritik karena dinilai tidak cukup efektif untuk menangani masalah perubahan iklim terutama pada emisi gas rumah kaca, ketahanan atas melemahnya harga minyak kelapa, tidak melindungi hak masyarakat adat dan pedesaan dan cenderung mahal. Di tingkat desa, faktor-faktor seperti kurangnya ketahanan sistem pangan lokal, ketidaksetaraan, tingginya tingkat pengangguran dan konflik atas sumber daya alam sering kali dirasakan oleh pekebun.

Dampak dari sertifikasi RSPO terhadap TPB di tingkat desa nyatanya secara empiris dapat terlihat dari beberapa indikator yang ada, di antaranya adalah : (1) secara ekonomi, sertifikasi RSPO berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan; (2) pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan rata-rata sudah mencapai pengeluaran ideal bagi standar rumah tangga di Indonesia; (3) meningkatnya fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan yang dapat diakses oleh pekebun; (4) sertifikasi memberi akses dan kesempatan yang sama untuk peningkatan keterampilan bagi laki-laki dan perempuan; (5) meningkatkan kesetaraan dalam pembagian peran bagi laki-laki dan perempuan, selain itu juga perempuan diberikan ruang aman untuk pencegahan tindak kekerasan seksual dalam kelompok; (6) meningkatnya akses pekebun untuk air bersih dan ketersediaan sarana air bersih untuk membersihkan diri pasca melakukan penyemprotan; (7) meningkatnya pemahaman pekebun terhadap pentingnya SOP keselamatan kerja dan waktu efektif bekerja; (8) meningkatnya kemudahan akses untuk sarana produksi pertanian dan perbankan; (9) mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di level desa; (10) meningkatnya kesadaran masyarakat akan praktik perkebunan berkelanjutan, hal ini termasuk penggunaan api di dalam kebun dan penggunaan pupuk yang tidak merusak lingkungan; (11) meningkatnya kesadaran pekebun akan perlindungan sumber daya alam; dan (12) meningkatnya kesadaran pekebun untuk melakukan resolusi konflik.

Beberapa perubahan yang dirasakan oleh pekebun seperti penguatan akses dari desa ke kota melalui perbaikan jalan, peningkatan infrastruktur di tingkat desa tidak dirasakan langsung oleh pekebun karena adanya sertifikat. Semenjak adanya dana desa yang bertujuan untuk membentuk desa yang mandiri, banyak pembangunan infrastruktur di tingkat desa baik berupa fasilitas kesehatan,

perbaikan jalan dan lain-lain di dukung oleh program pemerintah. pekebun yang telah melakukan sertifikasi RSPO kurang dari satu tahun merasa belum terlalu merasakan manfaat secara signifikan terutama dari segi peningkatan produktivitas maupun peningkatan penghasilan. Akan tetapi mereka merasakan beberapa kemudahan akses seperti sarana produksi pertanian, sarana perbankan, kesehatan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Sedangkan pekebun yang telah melakukan RSPO di atas 2-5 tahun sudah merasakan peningkatan dari segi produktivitas hasil kebun, peningkatan pendapatan dan kemudahan untuk mengakses platform kerjasama dengan berbagai perusahaan kelapa sawit yang ada karena rata-rata perusahaan cenderung akan membeli kelapa sawit yang memiliki sertifikat dibandingkan dengan yang tidak memiliki sertifikat.

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia memiliki kontribusi besar bagi pembangunan berkelanjutan. Peranan RSPO yang berkomitmen luas akan nilai-nilai berkelanjutan menjadikan para pelaku bisnis industri minyak sawit nasional terus membangun perkebunan kelapa sawit yang lebih maju dan berkelanjutan. Tidak hanya pelaku bisnis, pihak lain seperti pekebun swadaya, plasma, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial, bank, investor, pengecer, pengolah dan pedagang, pemerhati lingkungan dan peneliti juga harus melakukan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan menjadikan praktik kelapa sawit berkelanjutan dilakukan untuk seluruh rantai pasok hingga di tangan konsumen akhir.

Peran pemerintah Indonesia dalam mencapai praktik kelapa sawit berkelanjutan diwujudkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dijalankan telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membangun kolaborasi multi pihak untuk memperdalam pengetahuan mengenai tata kelola kelapa sawit berkelanjutan melalui beberapa kegiatan seperti pendataan pekebun (STDB dan legalitas lahan) dan pendampingan untuk pekebun kelapa sawit.

Referensi

Abdul Majid, N. et al. (2021) Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts: A Systematic Literature Review. *Sustainability* 2021, 13 (3263).

Ayompe, L.M., Schaafsma, M., & Egoh, B.N. (2021). Towards sustainable palm oil production: The positive and negative impacts on ecosystem services and human wellbeing. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123914.

Bacon, C. M., Mendez, V. E., Gomez, M. E. F., Stuart, D. & Florez, S. R. D., (2008). Are sustainable coffee certifications enough to secure farmer livelihoods? : The millennium development goals and Nicaragua's fair trade cooperatives. *Globalizations*, 5 (2): 259-274. doi:10.1080/14747730802057688

Bidarbakhtnia, A. (2019). Measuring Sustainable Development Goals (SDGs): An Inclusive Approach. *Global Policy*.

Biermann, F. et al. (2022). Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*.

Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2013). Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector: Benefits and challenges for smallholders. *Deutsches Institut für Entwicklungspolitik*.

Cazzolla Gatti, R., & Velichevskaya, A. (2020). Certified "sustainable" palm oil took the place of endangered Bornean and Sumatran large mammals habitat and tropical forests in the last 30 years. *Science of the Total Environment*, 742. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140712>

Cesario, S. (2012). Organic cacao farming in Transamazônica: An assessment of sustainable livelihood development. *Independent Study Project (ISP) Collection*. Paper 1489. Retrieved from http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1489.

Chalil, D. (2013). Cases on the diffusion and adoption of sustainable development practices. *Assessment of smallholders' barriers to adopt sustainable practices* (pp. 439-467). USA: IGI Global. doi:10.4018/978-1- 4666-2842-7.ch016.

Chiriaco, M. V. et al. (2022). Palm Oil's Contribution to the United Nations Sustainable Development Goals: Outcomes of A Review of Socio-Economic Aspects. *Environmental Research Letters*, 17 (063007).

Chiriaco, M. V. et al. (2022). Palm Oil's Contribution to the United Nations Sustainable Development Goals: Outcomes of A Review of Socio-Economic Aspects. *Environmental Research Letters*, 17 (063007).

Colchester, M., & Chao, S. (2011). Oil palm expansion in South East Asia: An overview. *Oil Palm Expansion in South East Asia*, 1.

Ditjenbun. (2021). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022. Kementerian Pertanian.

Donough, C. R., Witt, C., & Fairhurst, T. H. (2009). Yield intensification in oil palm plantations through best management practice. *Better Crops*, 93(1): 12-14.

EIA, & Grassroots. (2019). Who Watches the Watchmen? www.eia-global.org

Greenpeace. (2021). Destruction: Certified.

Hanafiah, K. M. et al. (2022). Impact of Malaysian Palm Oil on Sustainable Development Goals: Co-Benefits and Trade-Offs Across Mitigation Strategies. *Sustainability Science*, 17.

Hasan, M.F. & Hidayat, A.N. (2018) Sustainable Development From Perspective Economic and Social: The Case of Indonesia Palm Oil Industry. Book of Proceedings. 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective".

Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015). Sustainability certification and palm oil smallholders' livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 18(3): 25-48.

Jacobsen, D. M. (1998). Adoption patterns and characteristics of faculty who integrate computer technology for teaching and learning in higher education. Doctoral Dissertation. Retrieved from http://people.ucalgary.ca/~dmjacobs/phd/diss/chapter_2.html#related-contexts.

Jespersen, K., Matsutakeya, N., & Svocáková, K. (2022). SDG Materiality Report: Sustainable Palm Oil (RSPO). Preferred by Nature <https://preferredbynature.org/library/report/sdg-materiality-report-sustainable-palm-oil-rspo>.

Kusumaningtyas, R. (2018). External Concerns on the RSPO and ISPO Certification Schemes. www.profundo.nl.

Mardiharini, M., et al. (2021). Palm Oil Industry Towards Sustainable Development Goals (SDGs) Achievements. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 892 (012068).

Meijaard et al. (2020). The Environmental Impacts of Palm Oil in Context. *Nature Plants*, 6.

Miola, A., & Schiltz, F. (2019). Measuring sustainable development goals performance: How to monitor policy action in the 2030 Agenda implementation? *Ecological Economics*, 164 (106373).

Naidu, L. & Moorthy, R. (2021). A Review of Key Sustainability Issues in Malaysian Palm Oil Industry. *Sustainability*, 13, 10839.

Nesadurai, H. E. (2013). Food security, the palm oil–land conflict nexus, and sustainability: a governance role for a private multi-stakeholder regime like the RSPO?. *The Pacific Review*, 26(5): 505-529.

Ogahara, Z., Jespersen, K., Theilade, I., & Nielsen, M. R. (2022). Review of smallholder palm oil sustainability reveals limited positive impacts and identifies key implementation and knowledge gaps. *Land Use Policy*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106258>

Parveez, G. K. A., Kamil, N. N., Zawawi, N. Z., Ong-Abdullah, M., Rasuddin, R., Loh, S. K., Selvaduray, K. R., Hoong, S. S., & Idris, Z. (2022). Oil Palm Economic Performance in Malaysia and R&D Progress in 2021. *Journal of Oil Palm Research*. <https://doi.org/10.21894/jopr.2022.0036>

Purba, J.H.V. (2019). Replanting Policy of Indonesian Palm Oil Plantation in Strengthening the Implementation of Sustainable Development Goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 336 (012012).

Schmidt, J., & de Rosa, M. (2020). Certified palm oil reduces greenhouse gas emissions compared to non-certified. *Journal of Cleaner Production*, 277. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124045>

Schoonhoven-Speijer, M. (2012). *Maintaining a sustainable livelihood: An analysis of the effect of UTZ certification on market access, risk reduction and livelihood strategies of Kenyan coffee farmers* (Master's Thesis). Radboud University Nijmegen, Netherland.

Serrat, O. (2008). The sustainable livelihoods approach. Knowledge solutions 15. Asian Development Bank. Retrieved from www.adb.org/sites/default/files/.../sustainable-livelihoodsapproach.pdf

Sukiyono, K. et al. (2022). The Contribution of Oil Palm Smallholders Farms to the Implementation of the Sustainable Development Goals-Measurement Attempt. *Sustainability*, 14, 684

USDA. (2022). Oilseeds: World Markets and Trade - December 2022. <https://public.govdelivery.com/accounts/USDAFAS/subscriber/ne>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Pertanyaan Survei SDGs

ID Kuesioner	<input type="text"/>	Enumerator	<input type="text"/>
Tanggal	<input type="text"/>	Provinsi	<input type="text"/>
Kabupaten	<input type="text"/>	Kecamatan	<input type="text"/>
Desa	<input type="text"/>	Dusun	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan	Umur	<input type="text"/>

A. Informasi Umum

- A01 Kapan terakhir dilakukan sertifikasi RSPO?
- Kurang dari 1 tahun Lebih dari 5 tahun
 Antara 1-5 tahun Tepatnya tahun
- A02 Berapa luas perkebunan sawit yang telah disertifikasi RSPO?
- Kurang dari 2 ha Lebih dari 10 ha
 Antara 2 ha – 5 ha Tepatnya ha
 Antara 6 ha – 10 ha
- A03 Berapa luas perkebunan sawit yang belum disertifikasi RSPO?
- Kurang dari 2 ha Lebih dari 10 ha
 Antara 2 ha – 5 ha Tepatnya ha
 Antara 6 ha – 10 ha
- A04 Berapa luas lahan kebun atau sawah yang ditanami tanaman bukan sawit?
- Kurang dari 2 ha Lebih dari 10 ha
 Antara 2 ha – 5 ha Tepatnya ha
 Antara 6 ha – 10 ha
- A05 Seberapa besar SOP manajemen budidaya di kelompok Anda sudah diterapkan?
- Kurang dari 30% Lebih dari 50%
 Antara 30% - 50% Tepatnya %
- A06 Seberapa banyak produksi kebun sawit Anda setiap bulannya?
- < 1 ton 3-4 ton
 1-2 ton > 4 ton
 2-3 ton

B. SDGs 01. No Poverty

- B01 Apa status kepemilikan rumah yang Anda tinggal saat ini?
- Pribadi Kontrak Menumpang dengan orang tua Lainnya ...
- B02 Bagaimana kondisi rumah Anda saat ini?
- tapak/panggung
 kayu/beton
- B03 Jenis kendaraan apa saja yang Anda miliki?

D01 Jenis penyakit apa yang sering diderita oleh anggota kelompok Anda? (beri ✓ pada jawaban yang dipilih!)

No	Penyakit	Sebelum Sertifikasi	Setelah Sertifikasi
1.	Pegal linu		
2.	Batuk pilek		
3.	Kolesterol		
4.	Jantung		
5.	Stroke		
6.	Diabetes		
7.	Kudis/kurap		
8.	ISPA		
9.	Lainnya ...		

D02 Apakah anggota kelompok Anda dapat mengakses fasilitas kesehatan sebelum adanya sertifikasi? Ya Tidak

D03 Apakah anggota kelompok Anda dapat mengakses fasilitas kesehatan setelah adanya sertifikasi? Ya Tidak

D04 Fasilitas kesehatan apa saja yang biasa diakses oleh anggota kelompok Anda sebelum adanya sertifikasi?

- Rumah sakit Polindes
 Puskesmas Mantri/Dukun
 Lainnya ...

D05 Fasilitas kesehatan apa saja yang biasa diakses oleh anggota kelompok Anda setelah adanya sertifikasi?

- Rumah sakit Polindes
 Puskesmas Mantri/Dukun
 Lainnya ...

D06 Apakah anggota kelompok Anda memiliki asuransi/jaminan kesehatan sebelum adanya sertifikasi? Ya Tidak

D07 Apakah anggota kelompok Anda memiliki asuransi/jaminan kesehatan setelah adanya sertifikasi? Ya Tidak

E. SDGs 04. Quality Education

E01 Apa tingkat pendidikan terakhir Anda?

- Tidak sekolah Diploma
 SD Sarjana
 SMP Lainnya ...
 SMA

E02 Apakah ada penambahan jumlah sarana pendidikan setelah adanya sertifikasi di desa Anda?

- Paud (Ya/Tidak) SMP (Ya/Tidak)
 TK (Ya/Tidak) SMA (Ya/Tidak)
 SD (Ya/Tidak)

E03 Apakah jumlah anak di desa Anda yang bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi menjadi lebih banyak setelah adanya sertifikasi? Ya Tidak

E04 Apakah jumlah anak di desa Anda yang bisa bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya menjadi lebih banyak setelah adanya sertifikasi? Ya Tidak

- E05 Apakah anggota kelompok (koperasi/perkebunan) baik perempuan dan laki-laki mendapatkan akses peningkatan keterampilan yang sama setelah adanya sertifikasi? Ya
 Tidak

F. SDGs 05. Kesetaraan Gender

- F01 Apakah di kelompok Anda upah yang diterima perempuan lebih rendah dibandingkan yang diterima oleh laki-laki? Ya
 Tidak
- F02 Apakah di kelompok Anda perempuan dilibatkan dalam kegiatan pelatihan yang ada? Ya
 Tidak
- F03 Apakah kelompok Anda memiliki aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan setelah adanya sertifikasi? Ya
 Tidak
- F04 Apakah dengan adanya sertifikasi, kelompok Anda memiliki ruang/orang yang dapat menampung dan menindaklanjuti pengaduan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual? Ya
 Tidak
- F05 Apakah kelompok Anda memberikan dukungan terkait hak waris, kepemilikan tanah/rumah, dan pengelolaan keuangan yang menjadi hak perempuan? Ya
 Tidak

G. SDGs 06. Clean Water and Sanitation

- G01 Darimana Anda menggunakan sumber air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, dll saat ini?
 Air sumur PAM
 Air sungai Air hujan
 Air tanah (sumur bor) Lainnya ...
 Mata air
- G02 Darimana Anda menggunakan sumber air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, sebelumnya?
 Air sumur PAM
 Air sungai Air hujan
 Air tanah (sumur bor) Lainnya ...
 Mata air
- G03 Apakah sumber air bersih Anda pernah berganti? Ya Tidak
- G04 Jika G3 Ya, kapan sumber air bersih Anda berganti? Sebelum sertifikasi
 Setelah sertifikasi
- G05 Apakah Anda di rumah melakukan penghematan air?
Jika Ya, jelaskan! Ya Tidak
- G06 Apakah Anda memiliki jamban di rumah? Ya Tidak
- G07 Jika G6 Ya, apa jenis jamban yang Anda gunakan?
 Leher angsa Jamban Plengsengan
 Jamban cemplung Lainnya ...
- G08 Kapan Anda mulai menggunakan jamban di rumah anda? Sebelum sertifikasi
 Setelah sertifikasi

- G09 Apakah terdapat fasilitas air bersih dan sanitasi untuk Anda atau pekerja lainnya untuk mencuci dan berganti pakaian setelah penyemprotan pestisida? Ada Tidak ada

H. SDGs 07. Affordable Clean Energy

- H01 Darimana sumber penerangan utama di rumah Anda dan kapan Anda mulai menggunakan sumber penerangan tersebut? (beri \surd pada jawaban yang dipilih!)

Sumber Penerangan	Sebelum Sertifikasi	Setelah Sertifikasi
Listik PLN		
Genset		
Mikrohidro		
Solar PV		
Bio Gas		
Lampu Minyak		
Lainnya ...		

- H02 Jika Anda menggunakan listrik, berapa daya energi yang terpasang di rumah Anda?

- 450 VA 1300 VA
 900 VA Lebih dari 1300 VA

- H03 Kapan di rumah Anda terdapat aliran listrik? Sebelum sertifikasi Setelah sertifikasi

- H04 Menurut Anda, bagaimana harga energi listrik yang Anda gunakan saat ini?

- Murah Biasa saja Mahal

- H05 Apakah Anda mengetahui sumber energi dari pembangkit listrik untuk menerangi rumah Anda saat ini? Ya Tidak
 Jika Ya, sebutkan!

- H06 Apa bahan bakar yang biasanya Anda gunakan untuk memasak di rumah saat ini?

- Minyak tanah Gas 12kg
 Kayu bakar Lainnya ...
 Gas 3kg

- H07 Menurut Anda, bagaimana harga bahan bakar untuk memasak yang Anda gunakan saat ini?

- Murah Biasa saja Mahal

- H08 Apakah Anda melakukan penghematan energi untuk penerangan dan memasak saat ini? Ya Tidak
 Jika Ya, jelaskan!

- H09 Apakah di lingkungan Anda saat ini tersedia sumber energi terbarukan? Misal nya pembangkit listrik tenaga surya? Ya Tidak

- H10 Jika H8 Ya, apakah Anda bersedia untuk pindah dan menggunakan sumber energi tersebut? Ya Tidak

- H11 Jika H9 Ya, apakah Anda akan pindah menggunakan sumber energi tersebut meskipun harganya lebih mahal dari yang Anda gunakan saat ini? Ya Tidak

I. SDGs 08 : Decent Work and Economy Growth

- I01 Apakah kelompok Anda saat ini memiliki SOP keselamatan kerja? Ya Tidak
Jika Ya, jelaskan!
- I02 Berapa jam biasanya Anda bekerja dalam satu hari?
 < 8 jam > 8 jam
 8 jam
- I03 Setelah mendapatkan sertifikasi, apakah kelompok Anda mengalami kesulitan untuk mengadakan atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota? Ya Tidak
Jika Ya, jelaskan!
- I04 Menurut Anda, pelatihan apa saja yang masih dibutuhkan oleh kelompok Anda saat ini?
 Penguatan kelembagaan Pengembangan diri (leadership)
 Diversifikasi produk pertanian Kewirausahaan
 Diversifikasi komoditas pertanian Lainnya ...

J. SDGs 09. Industry, Innovation and Infrastructur

- J01 Dengan adanya sertifikasi, apakah kelompok Anda melakukan beberapa terobosan dalam cara budidaya kelapa sawit? (beri \sqrt pada jawaban yang dipilih!)

Jenis Inovasi	Sebelum Sertifikasi	Setelah Sertifikasi
Pengembangan pupuk kompos		
Pengembangan pestisida alami		
Penanganan hama terpadu		
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif		
Lainnya ...		

- J02 Setelah sertifikasi, apakah Anda semakin mudah untuk mengakses sarana produksi pertanian? Ya Tidak
Jika Ya, jelaskan!

- J02 Setelah sertifikasi, apakah Anda mengalami peningkatan akses terhadap modal dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya? Ya Tidak
Jelaskan!

- J03 Pilihlah dari beberapa daftar fasilitas umum di bawah ini yang dibangun setelah sertifikasi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa Anda!
 Posyandu Sekolah dasar
 Kantor desa Lainnya ...
 Balai desa

F04 Apakah Anda merasakan adanya peningkatan akses terhadap informasi setelah adanya sertifikasi? (beri \surd pada jawaban yang dipilih!)

Akses Informasi	Ya	Tidak
Pos		
Telepon kabel		
Telepon seluler		
Internet		
Lainnya ...		

K. SDGs 10. Reduced Inequalities

- K01 Menurut Anda, apakah masih banyak orang miskin di desa Anda setelah adanya sertifikasi? Ya
 Tidak
- K02 Apakah kelompok Anda membuka/meningkatkan akses dan ruang/kesempatan bagi setiap orang/kelompok social/gender/kelamin? Ya
 Tidak
- K03 Setelah sertifikasi, apakah terdapat kebijakan yang diadopsi atau diterapkan oleh kelompok Anda untuk menjamin kesetaraan kesempatan di antara anggota kelompok? Ya
 Tidak
- K04 Apakah ada pendapata dari kelompok Anda yang didisihkan untuk kegiatan pemberdayaan yang mendukung pengurangan kesenjangan? Ya
 Tidak

L. SDGs 11. Sustainable Cities and Communities

- L01 Apakah sertifikasi berpengaruh pada pemukiman yang layak dan pengurangan Kawasan kumuh di desa Anda? Ya
 Tidak
- L02 Apakah sertifikasi berpengaruh pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa Anda? Ya
 Tidak
- L03 Apakah sertifikasi berpengaruh pada perpindahan atau mobilitas penduduk desa-kota? Ya
 Tidak
- L04 Apakah sertifikasi berpengaruh pada hubungan desakota yang saling mendukung atau menguntungkan? Ya
 Tidak

M. SDGs 12. Responsible Consumption and Production

- M01 Apakah Anda sudah menerapkan GAP atau BMP setelah adanya sertifikasi? Ya
 Tidak
- M02 Apakah Anda mengurangi dan mengelola bahan kimia atau limbah yang tidak ramah lingkungan? Ya
 Tidak
- M03 Apakah Anda bekerjasama dengan perusahaan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan? Ya
 Tidak
- M04 Setelah sertifikasi, apakah masyarakat menjadi lebih sadar dalam mengelola kebun secara berkelanjutan? Ya
 Tidak

N. SDGs 13. Climate Action

- N01 Setelah sertifikasi, apakah Anda menggunakan energi bersih seperti tenaga surya, mikrohidro, dan lainnya? Ya
 Tidak
- N02 Setelah sertifikasi, apakah kelompok Anda mendirikan lembaga pemadam api/masyarakat peduli api/desa peduli api? Ya
 Tidak

- | | | |
|-----|--|---|
| N03 | Setelah sertifikasi, apakah kelompok Anda membeli alat perlengkapan pemadaman api? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| N04 | Setelah sertifikasi, apakah Anda/kelompok Anda lebih hati-hati dalam menggunakan api di kebun? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| N05 | Setelah sertifikasi, apakah Anda mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| N06 | Setelah sertifikasi, apakah Anda menggunakan pupuk organik dalam budidaya sawit? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| N07 | Setelah sertifikasi, apakah Anda tidak lagi membuka lahan di Kawasan gambut? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |

O. SDGs 15. Life on Land

- | | | |
|-----|---|---|
| O01 | Setelah sertifikasi, apakah Anda tidak lagi menebang pohon/hutan di areal-areal yang dilindungi seperti di area sepadan sungai, danau, atau Kawasan hutan? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| O02 | Setelah sertifikasi, apakah Anda melakukan upaya perlindungan satwa liar di areal-areal yang dilindungi seperti di area sepadan sungai, danau atau Kawasan hutan? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| O03 | Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda mendirikan kelompok petani peduli konservasi/hutan/lingkungan? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |

P. SDGs 16. Peace, Justice, and Strong Institutions

- | | | |
|-----|---|---|
| P01 | Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda mendirikan lembaga penyelesaian konflik? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| P02 | Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda mengadakan atau mengikuti pelatihan penyelesaian konflik? | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| P03 | Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan? (misalnya dalam proses penanaman, pembibitan, pemupukan, dan pemanenan) | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |
| P04 | Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan kelompok? (misalnya pengurusan kelompok, manajemen penjualan, dll) | <input type="checkbox"/> Ya
<input type="checkbox"/> Tidak |

Lampiran 2: Rekapitulasi Temuan Survei

Tabel 4. Data Diri Responden

Nama	Lembaga	Tanggal	Kabupaten	Desa	Jenis Kelamin	Enumerato r	Provinsi	Kecamatan	Dusun	Umur
Ali Sobirin	KUD Sawit Jaya	02/09/2022	Seruyan	Sukamaju	Laki-laki	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Seruyan Tengah	Sukamaju	37
-	KUD Tani Subur	05/09/2022	Kotawaringin Barat	Pangkalan Tiga	Laki-laki	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	32
Jamal	KSU Marga Indah	06/09/2022	Kutai Timur	Marga mulia	Laki-laki	Rahman - Desmi	Kalimantan Timur	Kongbeng	1	35
Siswadi	Perkumpulan Cahaya Harapan	06/09/2022	Batang Hari	Karya Mukti	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Maro Sebo Ilir	4	50
Novi	Perkumpulan Cahaya Harapan	06/09/2022	Batang Hari	Tidar Kuranji	Perempuan	Farhan - Irfan	Jambi		4	35
Sodikin	KUD Pemura	06/09/2022	Musi Rawas Utara	Bina Karya	Laki-laki	Nanda	Sumatera Selatan	Karang Dapo	Dusun 4 Blok D	47
Agung Mujiono	Koperasi Sawit Bangkit	06/09/2022	Seruyan	Sukorejo	Laki-laki	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Seruyan Tengah	Sukorejo	53
Juwito	KSU Marga Indah	07/09/2022	Kutai Timur	Marga Mulia	Laki-laki	Rahman - Desmi	Kalimantan Timur	Kombeng	-47	44
Muhammad Anwar Aras	Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera	09/09/2022	Kutai Timur	Sri Pantun	Laki-laki	Nyoman - Aria	Kalimantan Timur	Kongbeng	1	54
Ahmad Fairuz	KUD Tuhu Asih	09/09/2022	Musi Rawas Utara	Setiamaega	Laki-laki	Nanug - Widyar	Sumatera Selatan	Karangdapo	Dusin Tigo	45
	Koperasi Serba Usaha	09/09/2022	Kutai Timur	Sri pantun	Laki-laki	Nyoman - Aria	Kalimantan Timur	Kongbeng	2	33

	Pantun Sejahtera									
Nur Adi Rahman	Koperasi Serba Usaha Makarti	09/09/2022	Kutai Timur	Sidomulyo	Laki-laki	Nyoman - Aria	Kalimantan Timur	kongbeng	II	39
Infatul Hasanah	Koperasi Serba Usaha Makarti	09/09/2022	Kutai Timur	Sidomulyo	Perempuan	Nyoman - Aria	Kalimantan Timur	Kongbeng	1	42
I Nyoman Sucipta	KUD Mitra Bersama	12/09/2022	Ogan Komering Ulu	Desa Makarti Jaya	Laki-laki	Rahman - Desmi	Sumatera Selatan	Peninjauan	I	51
Suwarno	Forum Petani Sawit Swadaya Semarak Mudo	12/09/2022	Rokan Hulu	Tandun	Laki-laki	Rahman - Desmi	Riau	Tandun	Tandun	39
Hj.norma	Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera	13/09/2022	Kutai Timur	Sri pantun	Perempuan	Nyoman - Aria	Kalimantan Timur	Kongbeng	1	47
Jumiati	Koperasi Serba Usaha Makarti	13/09/2022	Kutai Timur	Sidomulyo	Perempuan	Nyoman - Aria	Kalimantan Timur	KONGBENG	1	43
Joko Prasetyo	Asosiasi Pekebun Swadaya Sawit Pelalawan Siak	06/09/2022	Pelalawan	Lubuk Ogung	Laki-laki	Fahri - Asep	Riau	Bandar Sekijang	Mekar Sari	48
Badri	PPKS Beringin Jaya	15/09/2022	Siak	Kotoringin	Laki-laki	Fahri - Asep	Riau	Mempura	Sungai Pinang	45

Khairul Anam	Koperasi Konsumen Tening Tinggi Pangkatan Sejahtera	15/09/2022	Labuhan Batu	Tebing Tinggi Pangkatan	Laki-laki	Nyoman - Aria	Sumatera Utara	Pangkalan	Batulima	39
Muli Junaidi	Koperasi Konsumen Tening Tinggi Pangkatan Sejahtera	15/09/2022	Labuhan Batu	Tebing Tinggi Pangkatan	Laki-laki	Nyoman - Aria	Sumatera Utara	Pangkalan	Karanganyar	42
Yusniar	Koperasi Konsumen Tening Tinggi Pangkatan Sejahtera	15/09/2022	Labuhan Batu	Tebing Tinggi Pangkatan	Perempuan	Nyoman - Aria	Sumatera Utara	Pangkalan	Gapuk	41
Kasih	PPKS Beringin Jaya	12/09/2022	Siak	Kotoringin	Perempuan	Fahri - Asep	Riau	Mempura	Sungai Pinang	26
Sawalmi	PPKS Beringin Jaya	12/09/2022	Siak	Kotoringin	Laki-laki	Fahri - Asep	Riau	Mempura	Sungai Pinang	46
Djoemal	PPKS Tayo Barokoah	06/09/2022	Rokan Hulu	Tapung Jaya	Laki-laki	Fahri - Asep	Riau	Tandun	Harapan Maju	32
Mulyadi	PPKS Tayo Barokoah	13/09/2022	Rokan Hulu	Tapung Jaya	Laki-laki	Fahri - Asep	Riau	Tandun	Harapan Makmur	48
Nuraini	PPKS Tayo Barokoah	06/09/2022	Rokan Hulu	Tapung Jaya	Perempuan	Fahri - Asep	Riau	Tandun	Harapan Maju	45
Dema Apriyanti	Forum Petani Sawit Swadaya	08/09/2022	Tanjung Jabung Barat	Sungai Rotan	Perempuan	Farhan - Irfan	Jambi	Renah Mendalu	Sungai Rotan	27

	Merlum Ranah Mendalu									
Deni Eprianza	Forum Petani Sawit Swadaya Merlum Ranah Mendalu	06/09/2022	Tanjung Jabung Barat	Sungai Rotan	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Renah Mendalu	Nelang	35
Suhaili	Forum Petani Sawit Swadaya Merlum Ranah Mendalu	06/09/2022	Tanjung Jabung Barat	Merlung	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Merlung	Merlung	55
Jamil	Perkumpulan Cahaya Harapan	31/08/2022	Batang Hari	Bukit Sari	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Maro Sebo Ilir	Dusun 1	58
Seftina Eriyani	Asosiasi Petani Berkah Mandah Lestari	15/09/2022	Tanjung Jabung Barat	Pematang Tembesu	Perempuan	Farhan - Irfan	Jambi	Tungkal Ulu	-	28
Sutrisno	Asosiasi Petani Berkah Mandah Lestari	14/09/2022	Tanjung Jabung Barat	Taman Raja	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Tungkal Ulu	-	44
Budi Yudiawan	Asosiasi Petani Berkah Mandah Lestari	14/09/2022	Tanjung Jabung Barat	Pematang Tembesu	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Tungkal Ulu	-	49

Sumaryatun	Gapoktan Tanjung Sehati	15/09/2022	Merangin	Mekar Jaya	Perempuan	Farhan - Irfan	Jambi	Tabir Selatan	-	28
Marino Saputra	Gapoktan Tanjung Sehati	14/09/2022	Merangin	Mekar Jaya	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Tabir Selatan	-	40
Sukardi	Gapoktan Tanjung Sehati	15/09/2022	Merangin	Bungo Raya Bungo Tanjung (?)	Laki-laki	Farhan - Irfan	Jambi	Tabir Selatan	-	51
Ardiyansyah	Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya	30/08/2022	Simalungun	Boluk	Laki-laki	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bosar Maligas	Huta Dua Penggalangan	47
Ngadiyo	Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya	30/08/2022	Simalungun	Boluk	Laki-laki	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bosar Maligas	Huta Dua Penggalangan	60
Tumi	Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya	30/08/2022	Simalungun	Boluk	Perempuan	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bosar Maligas	Huta Dua Penggalangan	41
Ade Fachrizal	Koperasi Gaharu Seratus Bosar Maligas	30/08/2022	Simalungun	Pasar Baru	Laki-laki	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bosar Maligas	01 Tengah	34
Jumadi	UD Lestari	31/08/2022	Batubara	Tanjung Gading	Laki-laki	Panca - Asti	Sumatera Utara	Sei Suka	Dusun Anggrek	45
Sutris	UD Lestari	31/08/2022	Simalungun	Bandar Masilam 2	Laki-laki	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bandar Masilam	Uta 5	53

Nurhayati	UD Lestari	01/09/2022	Simalungun	Bandar Gunung	Perempuan	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bandar Masilam	Dusun Tiga	48
Winarsih	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Mandiri	01/09/2022	Kuantan Singingi	Sungai Bulu	Perempuan	Panca - Asti	Riau	Singingi Hilir	Bulu Mulia	42
Sutiono	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Mandiri	02/09/2022	Kuantan Singingi	Sungai Bulu	Laki-laki	Panca - Asti	Riau	Singingi Hilir	Sungai Kuning	42
Reni	Koperasi Gaharu Seratus Bosar Maligas	03/09/2022	Simalungun	Nagori Saitorop	Perempuan	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bosar Maligas	Huta Dua Serambe	38
Suparjo	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Amanah	03/09/2022	Pelalawan	Trimulya Jaya	Laki-laki	Panca - Asti	Riau	Ukui	Dusun 1 Trimulya Jaya	61
Kunik	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Amanah	03/09/2022	Pelalawan	Airmas	Perempuan	Panca - Asti	Riau	Ukui	RT 17, RW 04	46
Junaedi	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Mandiri	07/09/2022	Kuantan Singingi	Sungai Bulu	Laki-laki	Panca - Asti	Riau	Singingi Hilir	Sungai Kuning	53
Ahmad Safri	Koperasi Gaharu Seratus Bosar Maligas	07/09/2022	Simalungun	Bosar Maligas	Laki-laki	Panca - Asti	Sumatera Utara	Bosar Maligas	01 Tengah	47

H. Narno	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Amanah	10/09/2022	Pelalawan	Trimulya Jaya	Laki-laki	Panca - Asti	Riau	Ukui	RT/RW 24	50
Suyono	KUD Karya Mulya	29/08/2022	Musi Rawas Utara	Bumi Makmur	Laki-laki	Nanda	Sumatera Selatan	Nibung	-	47
Fransiska Yuliariani	KUD Karya Mulya	29/08/2022	Musi Rawas Utara	Bumi Makmur	Perempuan	Nanda	Sumatera Selatan	Nibung	-	43
Ratiman	KUD Mekar Sari	31/08/2022	Musi Rawas	Mekar Sari	Laki-laki	Nanda	Sumatera Selatan	Megang Sakti	V	50
Zainuddin	KUD Mekar Sari	30/08/2022	Musi Rawas	Mekar Sari	Laki-laki	Nanda	Sumatera Selatan	Megang Sakti	IV	47
Prihati	KUD Mekar Sari	29/08/2022	Musi Rawas	Mekar Sari	Perempuan	Nanda	Sumatera Selatan	Megang Sakti	-	42
Sugito	KUD Pemura	30/08/2022	Musi Rawas Utara	Bina Karya	Laki-laki	Nanda	Sumatera Selatan	Karang Dapo	-	50
Mutingah	KUD Pemura	30/08/2022	Musi Rawas Utara	Bina Karya	Perempuan	Nanda	Sumatera Selatan	Karang Dapo	Wono Rejo Blok D	40
Narman	KUD Permai Jaya	29/08/2022	Lahat	Kencana Sari	Laki-laki	Nanda	Sumatera Selatan	Kikim Timur	-	50
Trio Saputro	KUD Permai Jaya	29/08/2022	Lahat	Kencana Sari	Laki-laki	Nanda	Sumatera Selatan	Kikim Timur	Dusun Cirebon	32
Mike Wijaya Saleh	KUD Permai Jaya	29/08/2022	Lahat	Kencana Sari	Perempuan	Nanda	Sumatera Selatan	Kikim Timur	Dusun 1	38
Edy Suroso	KUD Sawit Jaya	19/09/2022	Seruyan	Sukamaju	Laki-laki	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Seruyan Tengah	-	39
Ranisi	KUD Sawit Jaya	20/09/2022	Seruyan	Sukamaju	Perempuan	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Seruyan Tengah	-	43
Suparman	KUD Tani Subur	19/09/2022	Kotawaringin Barat	Pangkalan Tiga	Laki-laki	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Pangkalan Lada	-	58

Apong Titin	KUD Tani Subur	19/09/2022	Kotawaringin Barat	Pangkalan Tiga	Perempuan	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Pangkalan Lada	-	48
Sarmini	KUD Tani Subur	19/09/2022	Kotawaringin Barat	Pangkalan Tiga	Perempuan	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Pangkalan Lada	-	44
Sudar	KUD Sawit Jaya	19/09/2022	Seruyan	Sukamaju	Laki-laki	Lukas - Dewi	Kalimantan Tengah	Seruyan Tengah	-	46
Sugiyanto	KUD Damai	16/09/2022	Lahat	Sukaharjo	Laki-laki	Woko	Sumatera Selatan	Kikim Timur	-	36
Suratman Undayono	KUD Damai	19/09/2022	Lahat	Sukaharjo	Laki-laki	Woko	Sumatera Selatan	Kikim Timur	-	38
Samhudi	KUD Karya Lestari	31/08/2022	Musi Rawas	Karya Mulya	Laki-laki	Woko	Sumatera Selatan	Megang Sakti	-	42
Ana	KUD Karya Lestari	09/09/2022	Musi Rawas	Karya Mulya	Perempuan	Woko	Sumatera Selatan	Megang Sakti	-	27
H. Taslim	KUD Karya lestari	04/09/2022	Musi Rawas	Karya Mulya	Laki-laki	Woko	Sumatera Selatan	Megang Sakti	-	48
Sufyan Sahuri	KUD Makarti	30/08/2022	Muaro Jambi	Sidomukti	Laki-laki	Woko	Jambi	Sungai Gelam	-	33
Alfi	KUD Makarti	30/08/2022	Muaro Jambi	Sidomukti	Perempuan	Woko	Jambi	Sungai Gelam	-	31
Subagyo	KUD Makarti	02/09/2022	Muaro Jambi	Sidomukti	Laki-laki	Woko	Jambi	Sungai Gelam	-	53
Agus Susanto	KUD Marga Jaya	05/09/2022	Muaro Jambi	Petaling Jaya	Laki-laki	Woko	Jambi	Sungai Gelam	-	37
Supriyanti	KUD Marga Jaya	06/09/2022	Muaro Jambi	Petaling Jaya	Perempuan	Woko	Jambi	Sungai Gelam	-	42
Hartato	KUD Marga Jaya	06/09/2022	Muaro Jambi	Petaling Jaya	Laki-laki	Woko	Jambi	Sungai Gelam	-	38
Lam Sutarmi	KUD Teratai Biru	14/09/2022	Musi Banyuasin	Peninggalan	Perempuan	Woko	Sumatera Selatan	Tungkal Jaya	-	25
Arif Rahman	KUD Teratai Biru	17/09/2022	Musi Banyuasin	Peninggalan	Laki-laki	Woko	Sumatera Selatan	Tungkal Jaya	-	39
Paryoto	KUD Teratai Biru	21/09/2022	Musi Banyuasin	Peninggalan	Laki-laki	Woko	Sumatera Selatan	Tungkal Jaya	-	50

-	Koperasi Rimba Harapan	16/09/2022	Sintang	Merarai Satu	Laki-laki	Nyoman - Aria	Kalimantan Barat	Tebelian	Senirak	56
Sri Utami	Koperasi Rimba Harapan	16/09/2022	Sintang	Merarai Satu	Perempuan	Nyoman - Aria	Kalimantan Barat	Tebelian	Senirak	41
Sartono	Bumdes Karya Mandala Makmur	18/09/2022	Kotawaringin Barat	Padamandala Jaya	Laki-laki	Nanug - Widyar	Kalimantan Tengah	Pangkalan Lada	Pangkalan Lada	55
Kardiman	Koperasi Mulya Bakti	04/10/2022	Banyuasin	Banjar Sari	Laki-laki	Rahman - Desmi	Sumatera Selatan	Pulau Rimau	2	45
Nuryadin	Koperasi Mulya Bakti	04/10/2022	Banyuasin	Banjar Sari	Laki-laki	Rahman - Desmi	Sumatera Selatan	Pulau Rimau	2	39
Sulatri	Koperasi Mulya Bakti	04/10/2022	banyuasin	Banjar Sari	Perempuan	Rahman - Desmi	Sumatera Selatan	Pulau Rimau	2	45

Tabel 5. Screening Awal

A01. Kapan terakhir dilakukan sertifikasi RSPO ?	A02. Berapa luas perkebunan sawit yang telah disertifikasi RSPO?	A03. Berapa luas perkebunan sawit yang belum disertifikasi RSPO?	A04. Berapa luas lahan kebun atau sawah yang ditanami tanaman bukan sawit?	A05. Seberapa besar SOP manajemen budidaya di kelompok Anda sudah diterapkan?	A06. Seberapa banyak produksi kebun sawit Anda setiap bulannya?
Antara 1-5 tahun	antara 6 ha-10 ha	Antara 6 ha - 10 ha	Kurang dari 2 ha	Tepatnya %	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Tepatnya ha	Tepatnya ha		Tepatnya %	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Tepatnya ha	Tepatnya ha	Antara 30% - 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha			Lebih dari 50%	3-4 ton
Antara 1-5 tahun	Tepatnya ha	Tepatnya ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Antara 1-5 tahun			Antara 2 ha - 5 ha	Lebih dari 50%	

Kurang dari 1 tahun	antara 6 ha-10 ha	Kurang dari 2 ha	Tepatnya ha	Antara 30% - 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	lebih dari 10 ha	Lebih dari 10 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	lebih dari 10 ha	Lebih dari 10 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	lebih dari 10 ha	Lebih dari 10 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun		Antara 2 ha - 5 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tepatnya ha	Antara 30% - 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	lebih dari 10 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada		Antara 30% - 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada		Antara 30% - 50%	2-3 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Antara 30% - 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Tepatnya ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton

Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Tepatnya ha	Tepatnya %	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Tepatnya ha	Tepatnya ha	Tepatnya ha	Tepatnya %	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Kurang dari 2 ha	Tepatnya %	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Antara 30% - 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	2-3 ton
Kurang dari 1 tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	3-4 ton
Antara 1-5 tahun	Tidak ada	Tepatnya ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton

Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Antara 30% - 50%	< 1 ton
Antara 1-5 tahun	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Lebih dari 50%	< 1 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	3-4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	antara 6 ha-10 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Antara 1-5 tahun	lebih dari 10 ha	Antara 2 ha - 5 ha	antara 6 ha - 10 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Lebih dari 10 ha	Lebih dari 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	lebih dari 10 ha	Lebih dari 10 ha	Lebih dari 10 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Antara 1-5 tahun	antara 6 ha-10 ha	Tidak ada	Antara 2 ha - 5 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Antara 1-5 tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	2-3 ton
Antara 1-5 tahun	antara 6 ha-10 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	2-3 ton

Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	> 4 ton
Lebih dari 5 tahun	lebih dari 10 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Lebih dari 5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 30%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	1-2 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 30%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Antara 30% - 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Antara 30% - 50%	1-2 ton
Antara 1-5 tahun	lebih dari 10 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Kurang dari 2 ha	Tidak tahu	> 4 ton
Antara 1-5 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Antara 30% - 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Tidak ada	Tidak ada	Antara 30% - 50%	3-4 ton

Kurang dari 1 tahun	antara 6 ha-10 ha	Tidak ada	Tidak ada	Kurang dari 30%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	antara 6 ha-10 ha	Tidak ada	Tidak ada	Lebih dari 50%	> 4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Tidak ada	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Kurang dari 2 ha	Lebih dari 50%	< 1 ton
Kurang dari 1 tahun	lebih dari 10 ha	Lebih dari 10 ha	Lebih dari 10 ha	Lebih dari 50%	2-3 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Antara 2 ha – 5 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Antara 2 ha - 5 ha	Antara 2 ha – 5 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton
Kurang dari 1 tahun	Antara 2 ha – 5 ha	Kurang dari 2 ha	Antara 2 ha – 5 ha	Lebih dari 50%	3-4 ton

Tabel 6. TPB 1. Tanpa Kelaparan

B01. Apa status kepemilikan rumah yang Anda tinggali saat ini?	B02. Bagaimana kondisi rumah Anda saat ini?	B03. Jenis kendaraan apa saja yang Anda miliki?	B04. Berapa pendapatan per bulan yang Anda terima sebelum Adanya sertifikasi?	B05. Berapa pendapatan per bulan yang Anda terima setelah Adanya sertifikasi?	B06. Berapa pengeluaran per bulan yang Anda keluarkan sebelum Adanya sertifikasi?	B07. Berapa pengeluaran per bulan yang Anda setelah Adanya sertifikasi?	B08. Menurut Anda, apakah kelompok perempuan dan kalangan marginal (kelompok berkebutuhan khusus, lansia, buruh tani) memiliki
--	---	---	---	---	---	---	--

							peranan di dalam kelompok?
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	1,000,000 – 3,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	tepatnya, (isi nominalnya)	tepatnya, (isi nominalnya)	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Kayu	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Kayu	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	>5,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Ya
Pribadi	Tapak Kayu	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Tidak
Pribadi	Panggung Kayu	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Kayu	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya

Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Panggung Kayu	Motor dan Mobil	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Kayu	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000		3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Panggung Kayu	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Lainnya	Tapak Beton	Motor dan Mobil	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya

Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Lainnya	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya

Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	tepatnya, (isi nominalnya)	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya

Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	<1,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Tidak
Pribadi	Panggung Beton	Motor	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	<1,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	<1,000,000	<1,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya

Pribadi	Panggung Beton	Motor	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	<1,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	Ya
Menumpang dengan orang tua	Lainnya	Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Ya
Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor	>5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya

Menumpang dengan orang tua	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor dan Mobil	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	>5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Kayu	Motor	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya
Pribadi	Tapak Beton	Motor	3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Ya

Tabel 7. TPB 2. Tanpa Kemiskinan

C01. Berapa biasanya pengeluaran makanan Anda keluarkan selama satu bulan sebelum Adanya sertifikasi?	C02. Berapa biasanya pengeluaran makanan Anda keluarkan selama satu bulan setelah Adanya sertifikasi?	C03. Berapa jenis tanaman bukan sawit Yang Anda tanam?	C04. Setelah melakukan sertifikasi, apakah Anda dapat menanam semakin banyak jenis tanaman selain sawit?	C05. Apa hewan ternak Yang anda pelihara dan konsumsi?	C06. Setelah melakukan sertifikasi, apakah Anda dapat memelihara dan mengkonsumsi beragam jenis ternak?
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000		Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Lainnya ...	Tidak
<1,000,000	<1,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak

<1,000,000	<1,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
<1,000,000	<1,000,000		Ya		
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	4 jenis	Ya		Tidak
<1,000,000	<1,000,000		Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	2 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
>5,000,000	>5,000,000	4 jenis	Ya	Lainnya ...	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1 jenis	Ya	Unggas dan Sapi/kerbau	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Unggas dan Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	3 jenis	Tidak	Lainnya ...	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000		Tidak		Tidak

1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak		Tidak
1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	2 jenis	Ya	Lainnya ...	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	4 jenis	Ya	Lainnya ...	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
>5,000,000	>5,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Lainnya ...	Ya
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Lainnya ...	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Lainnya ...	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Ya	Unggas dan Sapi/kerbau	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas dan Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Unggas dan Sapi/kerbau	Ya
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Lainnya ...	Tidak

1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3 jenis	Ya	Sapi/kerbau	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Ya	Unggas dan Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Ya	Unggas dan Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	4 jenis	Ya	Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas dan Sapi/kerbau	Tidak
<1,000,000	<1,000,000	2 jenis	Tidak	Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas dan Sapi/kerbau	Ya
1,000,000 – 3,000,000	<1,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Lainnya ...	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Lainnya ...	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3 jenis	Ya	Sapi/kerbau	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Sapi/kerbau	Tidak
3,000,000 – 5,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Tidak ada	Ya

1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	4 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	4 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Tidak ada	Tidak
3,000,000 – 5,000,000	>5,000,000	4 jenis	Tidak	Tidak ada	Tidak
>5,000,000	>5,000,000	tepatnya, (isi nominalnya)	Tidak	Lainnya ...	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	4 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
<1,000,000	<1,000,000	3 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya

1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
3,000,000 – 5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	4 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	2 jenis	Tidak	Lainnya ...	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	3 jenis	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
>5,000,000	>5,000,000	3 jenis	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	1,000,000 – 3,000,000	Tidak ada	Tidak	Tidak ada	Tidak
1,000,000 – 3,000,000	3,000,000 – 5,000,000	2 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Ya	Lainnya ...	Ya
>5,000,000	3,000,000 – 5,000,000	1 jenis	Ya	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Tidak
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Sapi/kerbau	Ya
<1,000,000	1,000,000 – 3,000,000	1 jenis	Tidak	Unggas (ayam, bebek, itik)	Ya

Tabel 8. TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

D01a. Jenis penyakit apa Yang sering diderita oleh anggota kelompok Anda? Sebelum sertifikasi	D01b. Jenis penyakit apa Yang sering diderita oleh anggota kelompok Anda? Setelah sertifikasi	D02. Apakah anggota kelompok Anda dapat mengakses fasilitas kesehatan sebelum Adanya sertifikasi?	D03. Apakah anggota kelompok Anda dapat mengakses fasilitas kesehatan setelah Adanya sertifikasi?	D04. Fasilitas kesehatan apa saja Yang biasa diakses oleh anggota kelompok Anda sebelum Adanya sertifikasi?	D05. Fasilitas kesehatan apa saja Yang biasa diakses oleh anggota kelompok Anda setelah Adanya sertifikasi?	D06. Apakah anggota kelompok Anda memiliki asuransi/jaminan kesehatan sebelum Adanya sertifikasi?	D07. Apakah anggota kelompok Anda memiliki asuransi/jaminan kesehatan setelah Adanya sertifikasi?
Kolesterol	Kolesterol	Tidak	Ya	Puskesmas	Lainnya ...	Tidak	Ya
Kolesterol	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Lainnya ...	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Tidak
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Polindes	Polindes	Ya	Ya
Batuk pilek	Pegal linu	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Tidak	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Tidak	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya		Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
Kolesterol	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Lainnya	Lainnya	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Ya
Diabetes	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Tidak	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Tidak	Ya

Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Stroke	Stroke	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
ISPA	Kolesterol	Ya	Ya	Lainnya ...	Puskesmas	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Lainnya	Lainnya	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
Pegal linu	Diabetes	Ya	Ya	Lainnya ...	Rumah Sakit	Tidak	Tidak
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Lainnya ...	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Lainnya	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Lainnya ...	Puskesmas	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Tidak	Ya	Lainnya ...	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
Jantung	Jantung	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Tidak	Ya
Kudis/Kurap	Pegal linu	Tidak	Ya	Lainnya ...	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Tidak	Ya	Mantri/Dukun	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Tidak	Ya	Mantri/Dukun	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Ya	Ya
Diabetes	Diabetes	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya

Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Lainnya	Lainnya	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Batuk pilek	Lainnya	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...	Tidak	Tidak
Pegal linu	Pegal linu	Tidak	Ya	Mantri/Dukun	Puskesmas	Ya	Tidak
Lainnya	Kolesterol	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Ya
Diabetes	Diabetes	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Tidak	Tidak
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Tidak
Tidak ada	Tidak ada	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Tidak
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Tidak ada	Pegal linu	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Ya
Asam Lambung	Kolesterol	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Tidak ada	Batuk pilek	Ya	Ya	Rumah Sakit	Lainnya ...	Ya	Ya
Tidak ada	Kolesterol	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Polindes	Ya	Ya
ISPA	ISPA	Ya	Ya	Polindes	Polindes	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Tidak	Tidak	Polindes	Polindes	Ya	Ya
Pegal linu	Kolesterol	Ya	Ya	Polindes	Polindes	Ya	Ya
Kolesterol	Kolesterol	Ya	Ya	Polindes	Polindes	Ya	Ya
ISPA	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
ISPA	Kolesterol	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya

ISPA	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Diabetes	Diabetes	Tidak	Ya	Polindes	Puskesmas	Tidak	Tidak
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Ya
Batuk pilek	Batuk pilek	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Tidak	Ya	Polindes	Puskesmas	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Puskesmas	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Ya	Ya
Pegal linu	Asam urat	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya
Lainnya	Lainnya	Ya	Ya	Puskesmas	Rumah Sakit	Tidak	Tidak
Pegal linu	Lainnya	Ya	Ya	Polindes	Rumah Sakit	Tidak	Ya

Pegal linu	Pegal linu	Tidak	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Tidak
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Puskesmas	Puskesmas	Tidak	Tidak
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Lainnya ...	Polindes	Ya	Ya
Pegal linu	Pegal linu	Ya	Ya	Lainnya ...	Polindes	Ya	Ya

Tabel 9. TPB 9. Pendidikan Berkualitas

E01. Apa tingkat pendidikan terakhir Anda?	E02. Apakah Ada penambahan jumlah sarana pendidikan setelah Adanya sertifikasi di desa Anda?	E03. Apakah jumlah anak di desa Anda Yang bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat Yang lebih tinggi menjadi lebih banyak setelah Adanya sertifikasi?	E04. Apakah jumlah anak di desa Anda Yang bisa bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya menjadi lebih banyak setelah Adanya sertifikasi?	E05. Apakah anggota kelompok (koperasi/perkebunan) baik perempuan dan laki-laki mendapatkan akses peningkatan keterampilan Yang sama setelah Adanya sertifikasi?
Sarjana	Tidak	Ya	Ya	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SD	Tidak	Ya	Ya	Tidak
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMP	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
Diploma	Tidak	Tidak	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Tidak
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya

SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Sarjana	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
SMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Diploma	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Sarjana	ya	Ya	Ya	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya
Sarjana	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SD	Tidak	Ya	Ya	Ya
Sarjana	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya

SMP	ya	Ya	Ya	Ya
SMP	ya	Ya	Ya	Ya
SMP	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Tidak	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
Diploma	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
Lainnya	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Tidak
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya

SD	Tidak	Ya	Ya	Ya
Sarjana	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMP	ya	Ya	Ya	Ya
SD	Tidak	Ya	Ya	Ya
SD	Tidak	Ya	Ya	Ya
Sarjana	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMA	ya	Ya	Ya	Ya
SMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Sarjana	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Sarjana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Diploma	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SMA	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
SMA	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya

SMP	ya	Ya	Ya	Ya
SMP	Tidak	Ya	Ya	Ya
Sarjana	ya	Ya	Ya	Tidak
SMP	ya	Ya	Ya	Ya
SMP	ya	Ya	Ya	Ya
Sarjana	ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 10. TPB 5. Kesetaraan Gender

F01. Apakah di kelompok Anda upah Yang diterima perempuan lebih rendah dibandingkan Yang diterima oleh laki-laki?	F02. Apakah di kelompok Anda perempuan dilibatkan dalam kegiatan pelatihan Yang Ada?	F03. Apakah kelompok Anda memiliki aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan setelah Adanya sertifikasi?	F04. Apakah dengan Adanya sertifikasi, kelompok Anda memiliki ruang/orang Yang dapat menampung dan menindaklanjuti pengaduan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual?	F05. Apakah kelompok Anda memberikan dukungan terkait hak waris, kepemilikan tanah/rumah, dan pengelolaan keuangan Yang menjadi hak perempuan?
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 11. TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

G01. Darimana Anda menggunakan sumber air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, dll saat ini?	G02. Darimana Anda menggunakan sumber air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, sebelumnya?	G03. Apakah sumber air bersih Anda pernah berganti?	G04. Jika G3 Ya, kapan sumber air bersih Anda berganti?	G05. Apakah Anda di rumah melakukan penghematan air?	G06. Apakah Anda memiliki jamban di rumah?	G07. Jika G6 Ya, apa jenis jamban Yang Anda gunakan?	G08. Kapan Anda mulai menggunakan jamban di rumah anda?	G09. Apakah terdapat fasilitas air bersih dan sanitasi untuk Anda atau pekerja Lainnya untuk mencuci dan berganti pakaian setelah penyemprotan pestisida?
Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Setelah sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	PAM	Tidak		ya	ya	lainnya	Setelah sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada

Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	ya	ya	lainnya	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	PAM	Tidak	Sebelum sertifikasi	ya	tidak			Ada
Air Hujan	Air Hujan	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Setelah sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	ya	ya	Jamban Plengsengan	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	Air sumur	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air Hujan	Air Hujan	Tidak		ya	ya	Jamban Plengsengan	Sebelum sertifikasi	Ada
Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada

Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	tidak	ya	lainnya	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	lainnya	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Lainnya ...	Air sumur	Tidak		ya	ya	lainnya	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	lainnya	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Setelah sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Setelah sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sungai	Ya	Sebelum sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sungai	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada

Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	PAM	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	PAM	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sungai	Ya	Sebelum sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada

Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Sebelum sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	PAM	Ya	Setelah sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada

Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	tidak	tidak	Tidak Ada	-	Ada
Mata Air	PAM	Ya	Setelah sertifikasi	ya	ya	lainnya	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	PAM	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Ya	Setelah sertifikasi	tidak	tidak	Tidak Ada	-	Ada
Air tanah (sumur bor)	PAM	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	PAM	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
PAM	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	PAM	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada

Air sumur	Air tanah (sumur bor)	Ya	Sebelum sertifikasi	tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air tanah (sumur bor)	Tidak		tidak	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air tanah (sumur bor)	Air sumur	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
Air sumur	Air sumur	Tidak		ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Tidak Ada
Air tanah (sumur bor)	PAM	Ya	Setelah sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	Sebelum sertifikasi	Ada
PAM	Air sungai	Ya	Setelah sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	sebelum sertifikasi	Ada
PAM	Air sungai	Ya	Sebelum sertifikasi	ya	ya	Leher angsa	sebelum sertifikasi	Ada

Tabel 12. TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau

H01.a. Darimana sumber penerangan utama di	H01b. Darimana sumber penerangan	H02. Jika Anda menggunakan listrik,	H03. Kapan di rumah Anda	H04. Menurut Anda, bagaimana	H05. Apakah Anda mengetahui	H06. Apa bahan bakar	H07. Menurut Anda, bagaimana	H08. Apakah Anda melakukan penghematan	H09. Apakah di lingkungan Anda saat	H10. Jika H9 Ya, apakah Anda bersedia	H11. Jika H9 Ya, apakah Anda akan pindah
--	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

rumah Anda dan kapan Anda mulai menggunakan sumber penerangan tersebut? (sebelum sertifikasi)	utama di rumah Anda dan kapan Anda mulai menggunakan sumber penerangan tersebut? (setelah sertifikasi)	berapa daya energi Yang terpasang di rumah Anda?	terdapat aliran listrik?	a harga energi listrik Yang Anda gunakan saat ini?	ui sumber energi dari pembangkit listrik untuk menerangi rumah Anda saat ini?	Yang biasanya Anda gunakan untuk memasak di rumah saat ini?	a harga bahan bakar untuk memasak Yang Anda gunakan saat ini?	n energi untuk penerangan dan memasak saat ini?	ini tersedia sumber energi terbarukan ? Misalnya pembangkit listrik tenaga surya?	untuk pindah dan menggunakan sumber energi tersebut?	menggunakan sumber energi tersebut meskipun harganya lebih Mahal dari Yang Anda gunakan saat ini?
Lainnya	Listik PLN	1300 VA	Setelah sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Setelah sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Lainnya ...	Mahal	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Ya	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		

Lainnya	Lainnya	Lebih dari 1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 12kg	Mahal	Ya	Ya	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal			Mahal	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Ya	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Listik PLN	Genset	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 12kg	Biasa saja	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 12kg	Biasa saja	Ya	Ya	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Ya	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	Lebih dari 1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 12kg	Biasa saja	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Murah	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Ya	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Tidak	Tidak		

Listik PLN	Listik PLN	450 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Ya	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak		
Solar PV	Listik PLN	Lebih dari 1300 VA	Setelah sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 12kg	Biasa saja	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		

Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	450 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 12kg	Biasa saja	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Murah	Ya	Gas 3kg	Murah	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Ya		

Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Murah	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Murah	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	450 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Murah	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	Lebih dari 1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Genset	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Ya	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Ya	Ya	Tidak

Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Murah	Tidak	Ya	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Ya	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	Lebih dari 1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Lainnya ...	Mahal	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		

Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 12kg	Mahal	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Mahal	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Lainnya ...	Biasa saja	Tidak	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	Lebih dari 1300 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		

Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 12kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	sebelum sertifikasi	Mahal	Tidak	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Ya	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	1300 VA	sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Ya	Ya	Ya
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	sebelum sertifikasi	Mahal	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Tidak		
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Mahal	Ya	Ya	Ya	Tidak
Listik PLN	Listik PLN	900 VA	Sebelum sertifikasi	Biasa saja	Ya	Gas 3kg	Biasa saja	Ya	Tidak		

Tabel 13. TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

I01. Apakah kelompok Anda saat ini memiliki SOP keselamatan kerja?	I02. Berapa jam biasanya Anda bekerja dalam satu hari?	I03. Setelah mendapatkan sertifikasi, apakah kelompok Anda mengalami kesulitan untuk mengadakan atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota?	I04. Menurut Anda, pelatihan apa saja yang masih dibutuhkan oleh kelompok Anda saat ini?
Ya	8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	>8 jam	Ya	Penguatan kelembagaan
Ya	8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Ya	Lainnya ...
Ya	>8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	8 jam	Tidak	Diversifikasi produk pertanian
Ya	<8 jam	Ya	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	8 jam		Kewirausahaan
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Kewirausahaan

Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Diversifikasi produk pertanian
Ya	<8 jam	Tidak	Diversifikasi komoditas pertanian
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	<8 jam	Ya	Pengembangan diri (leadership)
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Ya	Kewirausahaan
Ya	<8 jam	Ya	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	>8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	<8 jam	Tidak	Diversifikasi komoditas pertanian
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	8 jam	Tidak	Lainnya ...

Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	>8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Ya	Lainnya ...
Ya	>8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	>8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Diversifikasi produk pertanian
Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	8 jam	Tidak	Diversifikasi produk pertanian
Ya	8 jam	Ya	Penguatan kelembagaan
Ya	<8 jam	Tidak	Kewirausahaan

Ya	<8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	8 jam	Tidak	Penguatan kelembagaan
Ya	8 jam	Tidak	Diversifikasi produk pertanian
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Ya	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Ya	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Ya	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	<8 jam	Tidak	Pengembangan diri (leadership)
Ya	8 jam	Tidak	Diversifikasi komoditas pertanian
Ya	8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	< 8 jam	Tidak	Kewirausahaan
Ya	< 8 jam	Tidak	Lainnya ...
Ya	< 8 jam	Tidak	Kewirausahaan

Tabel 14. TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

J01a. Dengan Adanya sertifikasi, apakah kelompok Anda melakukan beberapa terobosan dalam cara budidaya kelapa sawit? (Sebelum sertifikasi)	J01a. Dengan Adanya sertifikasi, apakah kelompok Anda melakukan beberapa terobosan dalam cara budidaya kelapa sawit? (Setelah sertifikasi)	J02. Setelah sertifikasi, apakah Anda semakin mudah untuk mengakses sarana produksi pertanian?	J03. Setelah sertifikasi, apakah Anda mengalami peningkatan akses terhadap modal dari perbankan atau lembaga keuangan Lainnya	J03. Pilihlah dari beberapa daftar fasilitas umum di bawah ini Yang dibangun Setelah sertifikasi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa Anda!	J04. Apakah Anda merasakan Adanya peningkatan akses terhadap informasi setelah Adanya sertifikasi?
Pengembangan pupuk kompos	Lainnya ...	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...
Pengembangan pupuk kompos	Lainnya ...	Tidak	Tidak		Internet
Lainnya ...	Lainnya ...	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Lainnya ...
Lainnya ...	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Lainnya ...	Pengembangan pestisida alami	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Lainnya ...	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...
Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Ya	Balai Desa	Internet
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Ya		Internet
Penanganan hama terpadu	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...
Penanganan hama terpadu	Pengembangan pestisida alami	Ya	Ya	Balai Desa	Internet
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Posyandu	Telepon seluler
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Ya	Lainnya ...	Telepon seluler
Lainnya ...	Lainnya ...	Ya	Ya	Lainnya ...	Telepon seluler

Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Lainnya ...	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Posyandu	Internet
Lainnya ...	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Pengembangan pupuk kompos	Lainnya ...	Ya	Tidak	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Ya		
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Tidak	Tidak		
Tidak ada	Tidak ada	Ya	Ya		
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Penanganan hama terpadu	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pestisida alami	Tidak	Ya	Lainnya ...	Internet
Pengembangan pupuk kompos	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Lainnya ...	Lainnya ...	Tidak	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Internet

Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Tidak	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pestisida alami	Tidak	Ya	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak

Pengembangan pupuk kompos	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Penanganan hama terpadu	Penanganan hama terpadu	Ya	Tidak	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Tidak	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Tidak	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Internet
Pengembangan pupuk kompos	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pestisida alami	Ya	Tidak	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Tidak	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pestisida alami	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak

Tidak ada	Tidak ada	Ya	Tidak	Tidak ada	Internet
Tidak ada	Pengembangan pestisida alami	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Tidak ada	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pestisida alami	Ya	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Posyandu	Internet
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Pengembangan pestisida alami	Ya	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Pengembangan pestisida alami	Pengembangan pestisida alami	Ya	Ya	Lainnya ...	Tidak
Pengembangan pestisida alami	Pengembangan pestisida alami	Ya	Ya	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Penanganan hama terpadu	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	penanganan hama terpadu	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Lainnya ...	Tidak	Tidak	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Lainnya ...	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Lainnya ...	Tidak	Tidak	Lainnya ...	Tidak
Tidak ada	Tidak ada	Tidak	Tidak	Tidak ada	Tidak

Tidak ada	Lainnya ...	Tidak	Tidak	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Tidak ada	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Tidak ada	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Tidak ada	Tidak ada	Ya	Ya	Tidak ada	Tidak
Pengembangan pupuk kompos	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Lainnya ...
Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Pengembangan kegiatan usaha yang sifatnya inovatif	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Balai Desa	Internet
Lainnya ...	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Posyandu	Internet
Tidak ada	Tidak ada	Tidak	Ya	Lainnya ...	Internet
Tidak ada	Pengembangan pupuk kompos	Ya	Ya	Lainnya ...	Internet

Tabel 15. TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan

K01. Menurut Anda, apakah masih banyak orang miskin di desa Anda setelah Adanya sertifikasi?	K02. Apakah kelompok Anda membuka/meningkatkan akses dan ruang/kesempatan bagi setiap orang/kelompok social/gender/kelamin?	K03. Setelah sertifikasi, apakah terdapat kebijakan Yang diadopsi atau diterapkan oleh kelompok Anda untuk menjamin kesetaraan kesempatan di antara anggota kelompok?	K04. Apakah Ada pendapatan dari kelompok Anda Yang disisihkan untuk kegiatan pemberdayaan Yang mendukung pengurangan kesenjangan?
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
ya	tidak	Tidak	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya

tidak		Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Tidak
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	tidak	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Tidak
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Tidak
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Tidak	Tidak
ya	ya	Tidak	Tidak
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Tidak
tidak	ya	Ya	Tidak
tidak	ya	Tidak	Tidak
tidak	ya	Ya	Ya

tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Tidak
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Tidak

tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Tidak
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Tidak	Ya
ya	ya	Tidak	Ya
tidak	ya	Tidak	Ya
tidak	ya	Ya	Tidak

tidak	ya	Ya	Tidak
Tidak	ya	Ya	Tidak
ya	ya	Tidak	Ya
Tidak	ya	Tidak	Ya
Tidak	ya	Tidak	Ya
ya	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
Tidak	ya	Ya	Ya
ya	ya	Ya	Ya
ya	ya	ya	Ya
ya	ya	ya	Ya
ya	ya	ya	Ya

Tabel 16. TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

L01. Apakah sertifikasi berpengaruh pada pemukiman Yang layak dan pengurangan Kawasan kumuh di desa Anda?	L02. Apakah sertifikasi berpengaruh pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa Anda?	L03. Apakah sertifikasi berpengaruh pada perpindahan atau mobilitas penduduk desa-kota?	L04. Apakah sertifikasi berpengaruh pada hubungan desa-kota Yang saling mendukung atau menguntungkan?
Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Ya

Tidak	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya

Ya	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya

Ya	Tidak	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 17. TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

M01. Apakah Anda sudah menerapkan GAP (Good Agricultural Practices) atau BMP (Best Management Practices) setelah Adanya sertifikasi?	M02. Apakah Anda mengurangi dan mengelola bahan kimia atau limbah Yang Tidak ramah lingkungan?	M03. Apakah Anda bekerjasama dengan perusahaan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit Yang berkelanjutan?	M04. Setelah sertifikasi, apakah masyarakat menjadi lebih sadar dalam mengelola kebun secara berkelanjutan?
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya

Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya

Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya

Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	ya	ya
Ya	Ya	ya	ya
Ya	Ya	ya	ya
Ya	Ya	ya	ya
Ya	Ya	ya	ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 18. TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim

N01. Setelah sertifikasi, apakah Anda menggunakan energi bersih seperti tenaga surya, mikrohidro, dan Lainnya?	N02. Setelah sertifikasi, apakah kelompok Anda mendirikan lembaga pemadam api/masyarakat peduli api/desa peduli api?	N03. Setelah sertifikasi, apakah kelompok Anda membeli alat perlengkapan pemadaman api?	N04. Setelah sertifikasi, apakah Anda/kelompok Anda lebih hati-hati dalam menggunakan api di kebun?	N05. Setelah sertifikasi, apakah Anda mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida?	N06. Setelah sertifikasi, apakah Anda menggunakan pupuk organik dalam budidaya sawit?	N07. Setelah sertifikasi, apakah Anda Tidak lagi membuka lahan di Kawasan gambut?
--	--	---	---	--	---	---

Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya

Tabel 19. TPB 15. Ekosistem Daratan

O01. Setelah sertifikasi, apakah Anda Tidak lagi menebang pohon/hutan di areal-areal Yang	O02. Setelah sertifikasi, apakah Anda melakukan upaya perlindungan satwa liar di areal-areal Yang	O03. Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda mendirikan kelompok petani peduli konservasi/hutan/lingkungan?
---	---	---

dilindungi seperti di area sepadan sungai, danau, atau Kawasan hutan?	dilindungi seperti di area sepadan sungai, danau atau Kawasan hutan?	
Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak

Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak

Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak
Tidak	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak

Tabel 20. TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

P01. Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda mendirikan lembaga penyelesaian konflik?	P02. Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda mengadakan atau mengikuti pelatihan penyelesaian konflik?	P03. Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan perkebunan? (misalnya dalam proses penanaman, pembibitan, pemupukan, dan pemanenan)	P04. Setelah sertifikasi, apakah Anda atau kelompok Anda melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan kelompok? (misalnya pengurusan kelompok, manajemen penjualan, dll)
Ya	Ya	Ya	
Tidak	Ya	Ya	
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya		Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya		Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya

Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Ya	Tidak	Ya	Tidak

Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Ya
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ya	Tidak	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya

Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Lampiran 2: Data Rinci Kontribusi Kelompok ke TPB Desa

KUD Sawit Jaya (Desa Suka Maju)

- KUD Sawit Jaya merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Seruyah Tengah. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 332 berasal dari Desa Suka Maju, dengan komposisi 263 anggota laki-laki, dan 69 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan mulai Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000. Dampak lain yang dirasakan oleh anggota kelompok adalah adanya kesempatan untuk menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui akses faskes, di mana rata-rata anggota sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang terdapat di ibukota kecamatan. Selain itu, anggota kelompok saat ini juga dapat memiliki layanan asuransi pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peralihan sumber air bersih pasca melakukan sertifikasi, dari yang sebelumnya memanfaatkan mata air kemudian dapat beralih ke PAM.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada

- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan Gedung Posyandu yang diperuntukkan kegiatan posyandu desa.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman layak dan berkurangnya Kawasan kumuh di sekitar wilayah desa mereka. Selain itu, terdapat juga pengaruh pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian MPA, adanya APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Tani Subur (Desa Pangkalan Tiga)

- KUD Tani Subur merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 707 berasal dari Desa Pangkalan Tiga, dengan komposisi 553 anggota laki-laki, dan 154 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000, kini bisa memiliki pendapatan mulai Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000.

- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum sertifikasi anggota kelompok dan masyarakat sudah mampu mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas kecamatan.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum adanya sertifikasi, masyarakat sudah mampu mengakses sumber air seperti air sumur dan PAM.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk perkembangan pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya APAR di dalam kelompok, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi

- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KSU Marga Indah (Desa Marga Mulia)

- KSU Marga Indah merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 169 berasal dari Desa Marga Mulia, dengan komposisi 136 anggota laki-laki, dan 33 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan mulai dari Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan mulai Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui akses faskes, di mana rata-rata anggota sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang terdapat di ibukota kecamatan. Selain itu, anggota kelompok saat ini juga dapat memiliki layanan asuransi pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum adanya sertifikasi, masyarakat sudah mampu mengakses sumber air seperti air sumur dan PAM.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan Gedung Posyandu yang diperuntukkan kegiatan posyandu desa.

- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk perkembangan pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya APAR di dalam kelompok, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KSU Pantun Sejahtera (Desa Sri Pantun)

- KSU Pantun Sejahtera merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 131 berasal dari Desa Sri Pantun, dengan komposisi 112 anggota laki-laki, dan 19 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui akses faskes, di mana rata-rata anggota sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Selain itu, anggota kelompok saat ini juga dapat memiliki layanan asuransi pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum adanya sertifikasi, masyarakat sudah mampu mengakses sumber air seperti air sumur dan PAM.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan untuk menuju area perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman layak dan berkurangnya Kawasan kumuh di sekitar wilayah desa mereka. Selain itu, terdapat juga pengaruh pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya APAR di dalam kelompok, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Perkumpulan Cahaya Putra Harapan (Desa Karya Mukti)

- Perkumpulan Cahaya Putra Harapan merupakan asosiasi kelompok tani yang terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Maro Sebo Ilir. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 406 berasal dari beberapa desa seperti Desa Karya Mukti, Tidar Kuranji, dan Desa Bukit Sari. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 304 anggota laki-laki, dan 102 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui akses faskes, di mana rata-rata anggota sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang terdapat di ibukota kecamatan. Selain itu, anggota kelompok saat ini juga dapat memiliki layanan asuransi pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum adanya sertifikasi, masyarakat sudah mampu mengakses sumber air seperti air sumur dan PAM.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan untuk menuju area perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dalam bentuk terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.

- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk perkembangan pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian MPA, adanya APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Pemura (Desa Bina Karya)

- KUD Pemura merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 188 berasal dari Desa Bina Karya. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 153 anggota laki-laki, dan 35 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan mulai dari Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan mulai Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum adanya sertifikasi, masyarakat sudah mampu mengakses sumber air seperti air sumur dan PAM.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan untuk menuju area perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman layak dan berkurangnya Kawasan kumuh di sekitar wilayah desa mereka. Selain itu, terdapat juga pengaruh pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian MPA, adanya APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Koperasi Sawit Bangkit (Desa Sukorejo)

- Koperasi Sawit Bangkit merupakan Koperasi yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Seruyan Tengah. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 326 berasal dari Desa Sukorejo. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 270 anggota laki-laki, dan 56 anggota perempuan.

- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 5.000.000, kini bisa memiliki pendapatan lebih dari yang sebelumnya.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan sumber air bersih, dari yang sebelumnya menggunakan air tanah kemudian beralih ke air sumur.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan balai desa.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman layak dan berkurangnya Kawasan kumuh di sekitar wilayah desa mereka. Selain itu, terdapat juga pengaruh pada sistem

transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.

- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian MPA, adanya APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Tuhu Asih (Desa Setia Marga)

- KUD Tuhu Asih merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 237 berasal dari Desa Setia Marga. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 237 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 3, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan sumber air bersih dan penggunaan jamban.

- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan balai desa.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman layak dan berkurangnya Kawasan kumuh di sekitar wilayah desa mereka. Selain itu, terdapat juga pengaruh pada sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian MPA, adanya APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KSU Makarti (Desa Sidomulyo)

- KSU Makarti merupakan Koperasi Serba Usaha yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kongbeng. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 172 berasal dari Desa Sidomulyo. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 151 anggota laki-laki, dan 21 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.

- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000, kini bisa memiliki pendapatan lebih dari Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 s/d Rp 5.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi diatas Rp. 5.000.000. Dampak lain yang dirasakan oleh anggota kelompok adalah adanya kesempatan untuk menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.

- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Mitra Bersama (Desa Makarti Jaya)

- KUD Mitra Bersama merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Peninjauan. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 30 berasal dari Desa Makarti Jaya. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 30 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses layanan kesehatan, dari yang sebelumnya ke puskesmas, kini dapat mengakses rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.

- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pendirian MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Forum pekebun Sawit Swadaya Semarak Mudo (Desa Tandun)

- Forum pekebun Sawit Swadaya Semarak Mudo merupakan Kelompok Tani yang terletak di Desa Tandun, Kecamatan Tandun. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 294 berasal dari Desa Tandun. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 204 anggota laki-laki, dan 90 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16

- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000, kini bisa memiliki pendapatan lebih dari Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan untuk beberapa anggota, sementara itu, bagi yang sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan, kini mengalami perubahan akses, dari yang sebelumnya ke puskesmas, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan Posyandu.
- Pada konteks TPB 10, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.

- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Asosiasi Pekebun Swadaya Sawit Pelalawan Siak

- Asosiasi Pekebun Swadaya Sawit Pelalawan Siak merupakan Kelompok Tani yang terletak di dua kabupaten, Siak dan Pelalawan. Saat ini seluruh anggotanya berjumlah 367 dengan komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 305 anggota laki-laki, dan 62 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 s/d Rp 3.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000. Dampak lain yang dirasakan oleh anggota kelompok adalah adanya kesempatan untuk mengembangbiakkan ternak pasca melakukan sertifikasi.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke puskesmas, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.

- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

PPKS Beringin Jaya (Desa Koto Ringin)

- PPKS Beringin Jaya merupakan Koperasi yang terletak di Desa Koto Ringin, Kecamatan Mempura. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 209 berasal dari Desa Koto Ringin. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 197 anggota laki-laki, dan 12 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7

- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 s/d Rp 3.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000. Dampak lain yang dirasakan oleh anggota kelompok adalah adanya kesempatan untuk menanam tanaman non-sawit.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke puskesmas, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah

lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.

- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Koperasi Konsumen Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera (Desa Tebing Tinggi)

- Koperasi Konsumen Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera merupakan Koperasi yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pangkatan. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 239 berasal dari Desa Tebing Tinggi.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No:-.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 6, 7, 11
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi karena baru mendapatkan sertifikasi kurang dari 1 tahun.
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi karena baru mendapatkan sertifikasi kurang dari 1 tahun.
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi karena baru mendapatkan sertifikasi kurang dari 1 tahun.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi hanya oleh anggota kelompok melalui adanya akses peningkatan keterampilan yang sama.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pelibatan perempuan dalam kegiatan pelatihan.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.

- Pada konteks TPB 09, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan.
- Pada konteks TPB 10, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya akses dan ruang/kesempatan bagi setiap orang/kelompok sosial.
- Pada konteks TPB 11, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi karena baru mendapatkan sertifikasi kurang dari 1 tahun.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, dan penggunaan pupuk organik
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit (PSKS) Tayo Barokah (Desa Dayo & Desa Tapung Jaya)

- Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit (PSKS) Tayo Barokah merupakan Asosiasi pekebun yang terletak di Desa Dayo & Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 150 berasal dari dua desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 131 anggota laki-laki, dan 19 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes/puskesmas, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi hanya oleh anggota kelompok melalui adanya akses peningkatan keterampilan yang sama.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi. Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Forum pekebun Swadaya Merlung Renah Mendaluh (Desa Pulau Pauh)

- Forum pekebun Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM) merupakan Kelompok Tani yang terletak di Desa Pulau Pauh, Kecamatan Renah Mendaluh. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 318 berasal dari Desa Pulau Pauh. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 308 anggota laki-laki, dan 10 anggota perempuan.

- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke puskesmas, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi,

distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.

- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pendirian MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Asosiasi pekebun Berkah Mandah Lestari (Desa Taman Raja)

- Asosiasi pekebun Berkah Mandah Lestari (APBML) merupakan Asosiasi pekebun yang terletak di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 290 berasal dari Desa Taman Raja. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 254 anggota laki-laki, dan 36 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000. Selain itu, mereka juga dapat mengembangbiakkan beragam jenis ternak
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Gapoktan Tanjung Sehati (Desa Mekar Jaya)

- Gapoktan Tanjung Sehati merupakan Kelompok Tani yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabis Selatan. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 412 berasal dari Desa Mekar Jaya. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 363 anggota laki-laki, dan 49 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000. Selain itu, mereka juga dapat menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan beragam jenis ternak
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan untuk beberapa anggota, sementara itu, bagi yang sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan, kini mengalami perubahan akses, dari yang sebelumnya ke mantri/dukun, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal

perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.

- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya (Desa Nagori Boluk)

- Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya merupakan Koperasi yang terletak di Desa Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 271 berasal dari Desa Nagori Boluk. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 214 anggota laki-laki, dan 57 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan menanam tanaman non-sawit.

- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi

- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Koperasi Produsen Gaharu Seratus Bosar Maligas (Kecamatan Bosar Maligas)

- Koperasi Produsen Gaharu Seratus Bosar Maligas merupakan Koperasi yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 406 berasal dari beberapa desa seperti Desa Pasar Baru, Desa Bandar Masilam, Desa Bandar Gunung, Desa Nagori Saitorop, dan Desa Bosar Maligas. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 304 anggota laki-laki, dan 102 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000. Selain itu, mereka juga dapat menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan beragam jenis ternak
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan untuk beberapa anggota, sementara itu, bagi yang sudah dapat mengakses fasilitas kesehatan, kini mengalami perubahan akses, dari yang sebelumnya ke mantri/dukun, kini dapat ke puskesmas dan rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.

- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

UD Lestari (Desa Simpang Kopi)

- UD Lestari merupakan Koperasi yang terletak di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 980 berasal dari beberapa desa di sekitar wilayah tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 980 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 6, 7

- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.

- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Asosiasi pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri (Desa Sungai Buluh)

- Asosiasi pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri merupakan Kelompok Tani yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 86 berasal dari Desa Sungai Buluh. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 81 anggota laki-laki, dan 5 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan diatas Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000. Selain itu, mereka juga dapat menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan beragam jenis ternak
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke puskesmas, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.

- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Asosiasi pekebun Sawit Swadaya Amanah (Desa Trimulya Jaya)

- Asosiasi pekebun Kelapa Sawit Swadaya Amanah merupakan Kelompok Tani yang terletak di Desa Trimulya Jaya, Kecamatan Ukui. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 501 berasal dari beberapa desa di wilayah sekitar. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 501 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000, kini bisa memiliki pendapatan diatas Rp. 5.000.000.

- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi

- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Karya Mulya (Desa Bumi Makmur)

- KUD Karya Mulya merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 110 berasal dari beberapa desa di sekitar wilayah tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 110 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000, kini bisa memiliki pendapatan di atas Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000. Selain itu, mereka juga dapat menanam tanaman non-sawit dan mengembangbiakkan beragam jenis ternak
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke puskesmas.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di tingkat desa, munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal

perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.

- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Mekar Sari (Desa Mekar Sari)

- KUD Mekar Sari merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Megang Sakti. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 171 berasal dari Desa Mekar Sari. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 124 anggota laki-laki, dan 47 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000, kini bisa memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi

- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Permai Jaya (Desa Kencana Sari)

- KUD Permai Jaya merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Kencana Sari, Kecamatan Kikim Timur. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 125 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 111 anggota laki-laki, dan 14 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan di atas Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke puskesmas.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk

menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.

- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Damai (Desa Sukaharjo)

- KUD Damai merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Sukaharjo, Kecamatan Kikim Timur. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 104 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 88 anggota laki-laki, dan 16 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke puskesmas. Selain itu, anggota kelompok juga mendapatkan manfaat dari adanya asuransi.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi hanya oleh anggota kelompok melalui adanya akses peningkatan keterampilan yang sama.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Karya Lestari (Desa Karya Mulya)

- KUD Karya Lestari merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Karya Mulya. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 164 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 164 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.

- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 untuk membeli bahan makanan, namun setelah sertifikasi terdapat peningkatan menjadi Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke puskesmas.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah

lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.

- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Makarti (Desa Sidomukti)

- KUD Makarti merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 179 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 179 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi hanya oleh anggota kelompok melalui adanya akses peningkatan keterampilan yang sama.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.

- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Marga Jaya (Desa Petaling Jaya)

- KUD Marga Jaya merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 303 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 222 anggota laki-laki, dan 81 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000, kini bisa memiliki pendapatan diatas Rp. 5.000.000.

- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi hanya oleh anggota kelompok melalui adanya akses peningkatan keterampilan yang sama.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi

- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

KUD Teratai Biru (Desa Peninggalan)

- KUD Teratai Biru merupakan Koperasi Unit Desa yang terletak di Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 157 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 157 anggota laki-laki, dan 0 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000, kini bisa memiliki pendapatan di atas Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke polindes, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan.
- Pada konteks TPB 10, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi,

distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.

- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Koperasi Rimba Harapan (Desa Merarai Satu)

- Koperasi Rimba Harapan merupakan Koperasi yang terletak di Desa Merarai Satu, Kecamatan Sungai Tebelian. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 74 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 63 anggota laki-laki, dan 11 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000, kini bisa memiliki pendapatan sebesar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pangan, yang sebelumnya mengeluarkan sebesar kurang dari Rp. 1.000.000, kini menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke puskesmas/polindes, kini dapat ke rumah sakit.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di desa tersebut, serta munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan jalan menuju wilayah perkebunan.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

BUMDES Karya Mandala Makmur (Desa Lada Mandala Jaya)

- BUMDES Karya Mandala Makmur merupakan Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 214 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 196 anggota laki-laki, dan 18 anggota perempuan.

- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 6, 7
- Pada konteks TPB 01, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penurunan pengeluaran untuk kebutuhan pangan, yang sebelumnya mengeluarkan sebesar lebih dari Rp. 5.000.000, kini menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000. Selain itu, anggota kelompok juga dapat menanam tanaman non-sawit dan pengembangbiakan hewan ternak.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan dari yang sebelumnya tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan, kini dapat mengakses layanan tersebut.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di desa tersebut, serta munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan balai desa.
- Pada konteks TPB 10, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dalam bentuk terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.

- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.

Koperasi Mulia Bakti (Desa Banjar Sari)

- Koperasi Mulia Bakti merupakan Koperasi yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Pulau Rimau. Saat ini seluruh anggotanya yang berjumlah 94 berasal dari desa tersebut. Komposisi anggota kelompok tani terbagi menjadi 78 anggota laki-laki, dan 16 anggota perempuan.
- Aspek dampak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 4, 9, 10, dan 11.
- Aspek dampak tidak langsung yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
- Aspek tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat desa adalah TPB No: 6, 7
- Pada konteks TPB 01, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pendapatan, yang sebelumnya memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000, kini bisa memiliki pendapatan sebesar Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Pada konteks TPB 02, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pangan, yang sebelumnya mengeluarkan sebesar kurang dari Rp. 1.000.000, kini menjadi Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000. Selain itu, mereka dapat mengembangbiakkan hewan ternak.
- Pada konteks TPB 03, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya perubahan akses, dari yang sebelumnya ke mantri/dukun, kini dapat ke puskesmas/polindes.
- Pada konteks TPB 04, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat melalui adanya penambahan sarana Pendidikan di desa tersebut, serta munculnya kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Pada konteks TPB 05, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari adanya aturan terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

- Pada konteks TPB 06, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah memiliki sumber air bersih.
- Pada konteks TPB 07, tidak terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dari adanya sertifikasi, hal ini dikarenakan sebelum melakukan sertifikasi, masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN.
- Pada konteks TPB 08, dampak sertifikasi hanya dirasakan oleh anggota kelompok dari melalui semakin banyaknya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang ada.
- Pada konteks TPB 09, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah kemudahan untuk mengakses sarana produksi pertanian dan modal perbankan. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah adanya pembangunan Posyandu.
- Pada konteks TPB 10, terdapat dampak yang dirasakan hanya oleh anggota kelompok dan dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Dampak sertifikasi yang hanya dirasakan oleh anggota kelompok adalah terbukanya kesempatan bagi setiap orang, adanya kebijakan untuk menjamin kesetaraan, dan adanya penyisihan pendapatan untuk kegiatan pemberdayaan.. Sementara itu, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di desa mereka.
- Pada konteks TPB 11, dampak sertifikasi dapat dirasakan oleh anggota kelompok dan masyarakat dalam bentuk meningkatnya pemukiman yang layak, pengurangan Kawasan kumuh, meningkatnya sistem transportasi, kondisi jalan, akses dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun kehidupan umum di desa, serta hubungan desa kota yang saling menguntungkan.
- Pada konteks TPB 12, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya penerapan BMP/GAP, pengurangan dan pengelolaan bahan kimia tidak ramah lingkungan, Kerjasama dengan perusahaan di sekitar wilayah desa, dan kesadaran untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
- Pada konteks TPB 13, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya pembentukan MPA, kepemilikan APAR, kesadaran penggunaan api di perkebunan, pengurangan pestisida/herbisida, penggunaan pupuk organik, dan kesadaran untuk tidak membuka kebun di lahan gambut.
- Pada konteks TPB 15, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui adanya upaya perlindungan satwa liar dan pendirian kelompok pekebun peduli konservasi
- Pada konteks TPB 16, dampak sertifikasi hanya dapat dirasakan oleh anggota kelompok melalui pendirian Lembaga penyelesaian konflik, pengadaan pelatihan penyelesaian konflik, hingga pelibatan perempuan di kegiatan perkebunan dan kelompok.